

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

upaya pengendalian perubahan iklim yang dilaksanakan secara global, merupakan salah satu agenda prioritas dunia untuk menyelamatkan kehidupan di bumi dan mengamankan keberlanjutan pembangunan nasional. Guna tercapainya target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, seluruh pemangku kepentingan perlu terlibat secara aktif (KLHK, 2017).

Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan program yang diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tanggal 1 Desember 2016. ProKlim sebagai gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas merupakan respon terhadap dampak perubahan iklim yang telah terjadi. ProKlim memuat aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim oleh kelompok masyarakat dalam upaya meningkatkan ketahanan iklim dan mengurangi emisi GRK atau berkontribusi menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C seperti

tertuang dalam Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) pada tahun 2015 (KLHK, 2017).

ProKlim dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca. ProKlim dilaksanakan di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan yang paling tinggi setingkat kelurahan atau desa (KLHK, 2017).

ProKlim merupakan sebuah gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas merupakan respons terhadap dampak perubahan iklim yang telah terjadi di tingkat tapak.

Landasan hukum ProKlim adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.84/MenLHK-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, dan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Nomor:

P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim. Tumbuhnya ProKlim melalui pengayaan inovasi program adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan secara kolaborasi antara pemerintah (*party*) dengan “*Non Party Stakeholder*”.

ProKlim diharapkan menjadi salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan. ProKlim diharapkan akan memperkuat kemitraan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi perubahan iklim serta

memfasilitasi penyebaran dan pertukaran informasi mengenai upaya terbaik (*best practises*) adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Penetapan lokasi kampung iklim dilakukan melalui serangkaian proses penilaian yang dilaksanakan melalui ProKlim.

Secara umum, ProKlim dibentuk untuk meningkatkan pemahaman

masyarakat akan perubahan iklim dan dampaknya, sehingga terjadi perubahan pola hidup masyarakat yang tahan akan risiko berubahnya iklim serta rendah emisi karbon yang disesuaikan dengan prioritas, kebutuhan, pemahaman dan kapasitas masyarakat di wilayah setempat. Inovasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dapat diarahkan untuk menjawab tantangan masyarakat dengan adanya isu perubahan iklim

ProKlim menjadi sarana pendidikan non formal memiliki program-program yang mempunyai tujuan untuk melestarikan lingkungan sekitar. Berdasarkan Undang-Undang No.20 Pasal 26 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Oleh karena itu ProKlim efektif dikembangkan mengingat subjek pelaksanaan program seluruhnya adalah masyarakat desa.

Salah satu kegiatan yang ada di ProKlim adalah pemberian penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Penyuluhan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai ProKlim. Masyarakat diarahkan pada penerapan program mengenai adaptasi perubahan iklim, mitigasi perubahan iklim dan dukungan keberlanjutan oleh kelompok.

Secara administrasi Kelurahan Sungai Bilu terletak di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan termasuk salah satu wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai lokasi ProKlim yang ada di Kota Banjarmasin. Pelaksanaan ProKlim harus terus didukung oleh semua masyarakat karena ProKlim diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui tata kelola desa yang baik untuk mendukung pembangunan. Tingkat kesadaran masyarakat dalam hal pelestarian lingkungan penting karena dapat mempengaruhi perilaku dan peranan masyarakat dalam upaya pengembangan desa di Kelurahan Sunbga Bilu masih menjadi nominator agar selanjutnya dapat meraih penghargaan dengan jenjang yang lebih tinggi lagi.

Persepsi masyarakat terhadap adanya ProKlim di Kota Banjarmasin khususnya di Kelurahan Sunga Bilu menjadi suatu hal yang perlu diketahui sebab persepsi merupakan suatu dasar dari pembentukan sikap dan perilaku masyarakat itu sendiri terhadap keberadaan ProKlim di lingkungan tersebut.

Maka dari itu perlu dibangun persepsi yang benar mengenai adanya ProKlim serta peran dan fungsinya sehingga masyarakat nantinya ikut berperan aktif didalam mendukung program pemerintah.

Tujuan penyusunan buku hasil penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap ProKlim di Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, agar berpartisipasi dalam ProKlim. Pemerintah dapat menjadikan buku hasil penelitian ini sebagai bahan kajian untuk peningkatan pelaksanaan ProKlim ke depan yang baik.

1.2. Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu proses yang berwujud diterimanya stimulasi oleh individu melalui alat reseptornya, kemudian stimulasi diteruskan ke pusat susunan syaraf yaitu otak, dan otak merupakan proses psikologisnya sehingga individu bisa mempersepsi stimulasi yang di terimanya (Walgito, 2003). Sedangkan menurut Sugihartono (2007), persepsi merupakan proses untuk menerjemahkan atau menginterpretasi stimulus yang masuk dalam alat indera.

Carole Wade dan Carol Tarvis (2007) menyatakan persepsi (*perception*) adalah tindakan mental yang mengatur impuls-impuls sensorik menjadi suatu pola bermakna. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins dan

Timothy A. Judge (2008) dalam Murwati, E. (2014) persepsi (*perception*) adalah proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan memoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka.

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya (Thoha, 2010). Sedangkan menurut Luthans (2006), persepsi merupakan proses kognitif kompleks yang menghasilkan gambaran dunia yang unik, yang mungkin agak berbeda dari realita.

Menurut David Krech dan Richard S. Crutchfield dalam Rakhmad (2004), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu objek adalah faktor fungsional dan faktor struktural.

1. Faktor Fungsional

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk dalam faktor personal. Faktor fungsional ini terdiri atas:

- a. Kebutuhan, kebutuhan sesaat dan kebutuhan menetap pada diri seseorang akan menentukan persepsi seseorang.
- b. Kesiapan mental, suasana mental seseorang akan mempengaruhi persepsinya.

- c. Suasana emosi, suasana emosi seseorang baik ia dalam keadaan sedih bahagia, marah ataupun susah akan berpengaruh terhadap persepsi seseorang.
 - d. Latar belakang budaya, latar belakang dimana orang tersebut berasal akan berpengaruh terhadap suatu rangsangan
2. Faktor Struktural

Faktor struktural berasal dari sifat struktur fisik dan efek-efek saraf, yang ditimbulkan dalam sistem saraf individu yang meliputi:

- a. Kemampuan berfikir.
- b. Daya tangkap indra manusia.
- c. Kemampuan daya tangkap yang terdapat dalam diri manusia

1.3. Masyarakat

Menurut Mac Iver dan Page dalam Soekanto (2006) masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan Menurut Selo Soemardjan dalam Soekanto (2006) masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Soekanto (2006), mengemukakan bahwa masyarakat memiliki beberapa unsur-unsur, yaitu: 1) Manusia yang hidup bersama; 2) Bercampur dalam waktu yang cukup lama; 3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu sama lain; 4) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Masyarakat dapat diartikan sebagai sejumlah manusia yang hidup bersama di suatu daerah, pada suatu waktu tertentu menciptakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan bagi pergaulan hidupnya yang pada akhirnya menciptakan kebudayaan, sehingga mereka akan merasa terikat satu sama lain.

1.4. Program Kampung Iklim (ProKlim)

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun

2012 ProKlim adalah program berlingkup nasional yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal dalam meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi. Melalui pelaksanaan ProKlim, pemerintah memberikan penghargaan terhadap masyarakat di lokasi tertentu yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan.

ProKlim dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya sehingga seluruh pihak terdorong untuk melaksanakan aksi nyata yang dapat

memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Hal lain yang diharapkan dapat tercapai melalui pelaksanaan ProKlim adalah:

- 1) Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan adaptasi perubahan iklim, termasuk menjaga nilai-nilai kearifan tradisional atau lokal yang dapat mendukung upaya penanganan perubahan iklim dan pengendalian kerusakan lingkungan secara umum.
- 2) Menjembatani kebutuhan masyarakat dan pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan untuk pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- 3) Meningkatkan kerjasama seluruh pihak di tingkat nasional dan daerah dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- 4) Menumbuhkan gerakan nasional adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan kegiatan berbasis masyarakat yang bersifat aplikatif, adaptif dan berkelanjutan.
- 5) Mengoptimalkan potensi pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat memberikan manfaat terhadap aspek ekologi, ekonomi dan pengurangan bencana iklim.
- 6) Mendukung program nasional yang dapat memperkuat upaya penanganan perubahan iklim secara global seperti gerakan ketahanan

pangan, ketahanan energi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian target penurunan emisi sebesar 26% pada tahun 2020 dibandingkan dengan jika tidak dilakukan upaya apapun.

Pelaksanaan ProKlim menerapkan pendekatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat berdasarkan prinsip kemitraan. Pendekatan tersebut diharapkan para pemangku kemitraan berinteraksi secara aktif dalam proses penyelesaian masalah terkait perubahan iklim untuk memperkuat kapasitas sosial di tingkat lokal maupun nasional. Strategi pelaksanaan program secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- 2) Memperkuat kapasitas masyarakat dalam melaksanakan upaya

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

- 3) Menjalin kemitraan dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah.
- 4) Mendorong terciptanya kepemimpinan di tingkat masyarakat untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- 5) Mendorong komitmen pengambil kebijakan di tingkat nasional

dan daerah untuk mendukung pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

- 6) Menyebarluaskan keberhasilan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.
- 7) Meningkatkan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.
- 8) Mendorong optimalisasi potensi sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan ProKlim.

Ruang Lingkup ProKlim dapat dilaksanakan di pedesaan maupun perkotaan, dengan memperhatikan tipologi wilayah seperti daratan tinggi, daratan rendah, pesisir dan pulau kecil. Kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan dengan adanya peran serta aktif masyarakat dan dukungan berbagai pihak.

BAB II

KONDISI

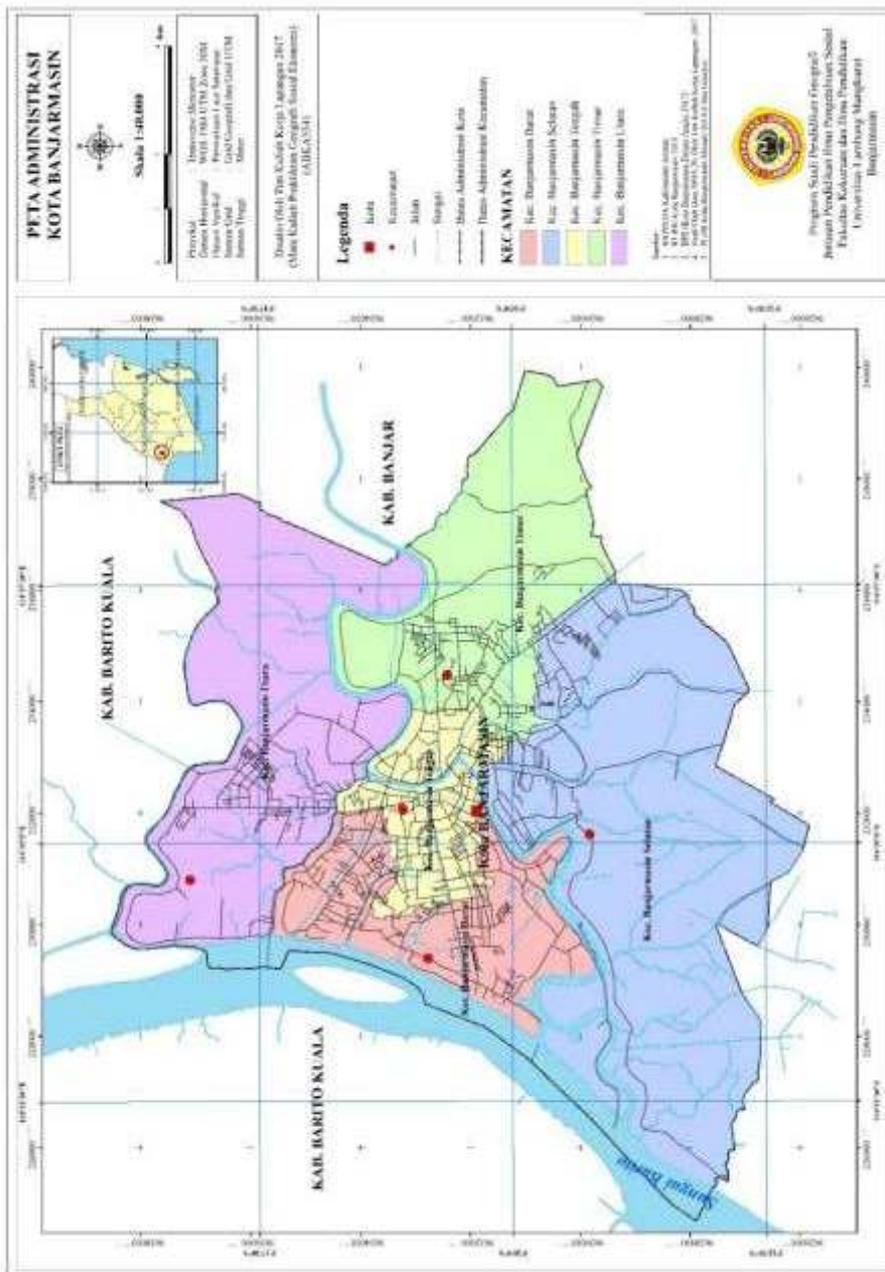
GEOGRAFIS

KOTA

BANJARMASIN

2.1. Letak, Luas dan Batas

Kota Banjarmasin sendiri secara geografis terletak antara $3,16'46''$ sampai dengan $3^{\circ}22'54''$ lintang Selatan dan $114^{\circ}31'40''$ sampai dengan $114^{\circ}39'55''$ bujur Timur. Kota Banjarmasin berada pada ketinggian rata-rata 0,16 m dibawah permukaan laut dengan kondisi daerah berpaya-paya dan relatif datar. Pada waktu air pasang hampir seluruh wilayah digenangi air. Peta administrasi Kota Banjarmasin dapat dilihat pada Gambar 1 dan batas-batas Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut: (1) sebelah utara dengan Kabupaten Barito Kuala; (2) sebelah timur dengan Kabupaten Banjar; (3) sebelah Barat dengan Kabupaten Barito Kuala; (4) sebelah selatan dengan Kabupaten Banjar.



Gambar 1. Peta Administrasi Kota Banjarmasin

Tabel 1. Luas Wilayah Kota Banjarmasin Menurut Kecamatan 2016

No	Wilayah	Luas Area (Km ²)	%
1	Banjarmasin Selatan	38,27	38,87
2	Banjarmasin Timur	23,86	24,23
3	Banjarmasin Barat	13,13	13,34
4	Banjarmasin Tengah	6,66	6,76
5	Banjarmasin Utara	16,54	16,8
6	Kota Banjarmasin	98,46	100

Sumber: Kota Banjarmasin Dalam Angka Tahun 2017

Luas Kota Banjarmasin 98,46 km persegi atau 0,26 persen dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari 5 kecamatan dengan 52 kelurahan. Kota Banjarmasin disebut sebagai Kota Seribu Sungai karena banyaknya sungai yang melintas di wilayah Kota Banjarmasin. Adapun luas Kelurahan Sungai Bilu yakni 0,55 M2.

Kota Banjarmasin terletak dekat muara Sungai Barito dan di belah dua oleh Sungai Martapura yang memiliki panjang mencapai 25.066 meter, lebar 211 meter dan besarnya mencapai 9,5% dari luas Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin mempunyai banyak anak sungai yang dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana transportasi selain dari jalan darat. Kemiringan tanah antara 0.13% dengan susunan geologi terutama bagian bawahnya didominasi oleh lempung dengan sisipan pasir halus dan endapan aluvium yang terdiri dari lempung hitam keabuan dan lunak.

Kota Banjarmasin termasuk wilayah yang beriklim tropis. Angin Muson dari arah barat yang bertiup akibat tekanan tinggi di daratan Benua Asia melewati Samudera Hindia menyebabkan terjadinya musim hujan,

sedangkan tekanan tinggi di Benua Australia yang bertiup dari arah Timur adalah angin kering pada musim kemarau.

2.2. Sejarah Permukiman Kota Banjarmasin

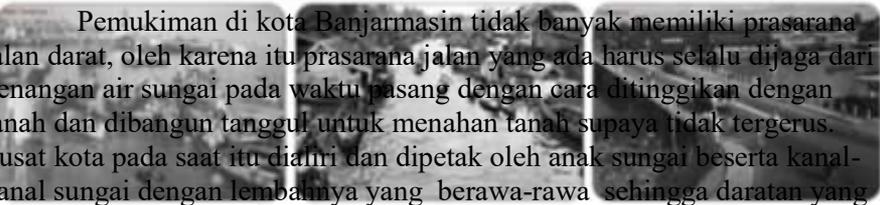
Secara geografis Banjarmasin terletak di bantaran sungai Martapura. Penduduk Banjarmasin tinggal di pinggiran sungai atau di kampung-kampung yang berada di bantaran sepanjang kedua sisi Sungai Martapura menurut laporan Residen Meijer tahun 1887. Laporan tersebut membuktikan bahwa masyarakat Banjarmasin adalah masyarakat yang sangat ketergantungan dengan sungai. Realitas tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat Banjarmasin khususnya dan pulau Kalimantan pada umumnya memiliki sungai-sungai besar maupun kecil. Pemandangan yang tampak sejak dahulu ketika mengunjungi Kota Banjarmasin adalah terlihat jelas permukiman penduduk yang berjajar di bantaran-bantaran sungai. Kondisi ini terus berjalan hingga masuknya pemerintah kolonial Belanda yang mengubah wajah permukiman penduduk Banjarmasin yang monoton mengikuti sungai menjadi permukiman di daratan.

Gambar 2. Tepi Sungai Banjarmasin Masa Lampau
Sumber: BumiBanjar.com



Awal perkembangan pola permukiman di Kota Banjarmasin berbentuk linier mengikuti alur sungai-sungainya. Hal ini dapat dilihat dari rumah-rumah tradisional yang masih bertahan hingga sekarang. Ketergantungan masyarakat yang bermukim di sepanjang jalur sungai terhadap sungai ini sangat besar, karena para pemukim mendekati sumber air untuk kegiatan mereka sehari-hari serta berkaitan dengan mata pencaharian mereka sebagai pedagang yang menggunakan sungai sebagai jalur transportasi perdagangan. Pada kiri kanan sungai yang sejajar dengan jalan didirikan atau dibangun permukiman dan berbagai bangunan yang diperlukan bagi kelengkapan permukiman penduduk seperti pabrik, pelabuhan dan kegiatan ekonomi lainnya.

Gambar 3. Sejarah Kota Banjarmasin Berbasis Budaya Perairan
Sumber: unicborneobali.com



Pemukiman di kota Banjarmasin tidak banyak memiliki prasarana jalan darat, oleh karena itu prasarana jalan yang ada harus selalu dijaga dari genangan air sungai pada waktu pasang dengan cara ditinggikan dengan tanah dan dibangun tanggul untuk menahan tanah supaya tidak tergerus. Pusat kota pada saat itu dialiri dan dipetak oleh anak sungai beserta kanal-kanal sungai dengan lembahnya yang berawa-rawa sehingga daratan yang

ada menyerupai sebuah pulau. Banjarmasin sebagai sebuah kota dengan area yang selalu digenangi air, juga disebut oleh orang-orang Eropa sebagai kota “seribu sungai” yang lebih mirip kota Venesia di negara Italia. Sebutan ini juga dikarenakan kota Banjarmasin dialiri banyak anak sungai dan kanal-kanal yang dibuat oleh penduduk. Sungai Martapura yang membelah kota dengan anak sungai dan kanal-kanal sungainya tersebut menjadi urat nadi kehidupan penduduk Banjarmasin (Lanch & Kley, 1993).

Rumah penduduk berbentuk panggung dari kayu dan rumah-rumah rakit yang ditambatkan di tiang-tiang kayu supaya tidak terbawa oleh air sungai yang menjadi ciri khas dari kota ini. Sungai menjadi jalur utama, semua kebutuhan penduduk diangkut melalui sungai di setiap depan rumah terdapat dermaga kecil dari kayu untuk menambatkan perahu (Irwanto dan Santun, 2009).

Pertengahan abad ke-17, kota Banjarmasin memiliki infrastruktur yang memadai sebagai pintu masuk pelayaran dan perdagangan di Kalimantan Selatan. Infrastruktur itu berupa pelabuhan sungai yang berfungsi sebagai tempat bertemunya para saudagar dari berbagai daerah untuk transaksi dagang.

Kombinasi antara faktor alamiah yang strategis dan kekayaan alam di daerah *hinterland* yang melimpah menyebabkan pelabuhan yang terletak di tengah kota Banjarmasin ini berkembang pesat. Komoditas perdagangan itu dikumpulkan di pelabuhan Banjarmasin untuk kemudian didistribusikan ke

seluruh daerah. Komoditas perdagangan yang banyak terdapat di Banjarmasin antara lain karet, kayu, rotan, sarang burung walet, batu besoar, lilin lebah, minyak kayu gaharu, lada dan darah naga. Komoditas perdagangan ini menjadi daya tarik para saudagar dari berbagai daerah datang ke Banjarmasin untuk berdagang. Para saudagar ini berasal dari Sulawesi, Jawa, Sumatera, Cina dan Jazirah Arab. 10 Sumber daya alam Banjarmasin sebagai komoditas perdagangan yang laku di pasar dunia juga menjadi incaran para pedagang Eropa, antara lain Portugis, Inggris dan Belanda (Fong, 2013).

Daerah tepian sungai merupakan salah satu bentuk pilihan lokasi permukiman yang pada awal pertumbuhannya ditandai dengan terbentuknya suatu konsentrasi penduduk dengan membentuk kelompok-kelompok bermukiman di sekitar daerah aliran sungai. Namun dalam perkembangannya, kota-kota air tersebut mengalami kemunduran baik fungsi maupun citra perkotaannya akibat perkembangan transportasi darat dan pusat-pusat kegiatan baru di luar kawasan tepian air. Hal ini berdampak jelas pada kondisi ruang publik perkotaan yang berkesan kumuh dan statis (Prayitno, 2004).

2.3. Penggunaan Lahan

Lahan (*land*) merupakan suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklus yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah,

batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa akan datang (Juhadi, 2007).

Segala campur tangan manusia, baik secara permanen maupun secara siklus terhadap suatu kelompok sumberdaya alam dan sumber daya buatan, yang secara keseluruhan disebut lahan, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya baik secara kebendaan maupun spiritual ataupun kedua-duanya. Dinamika eksploitasi manusia terhadap sumberdaya alam ditandai dengan penggunaan lahan pada saat ini baik secara perorangan maupun masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya (Ritohardoyo, 2009).

2.3.1. Fungsi Lahan

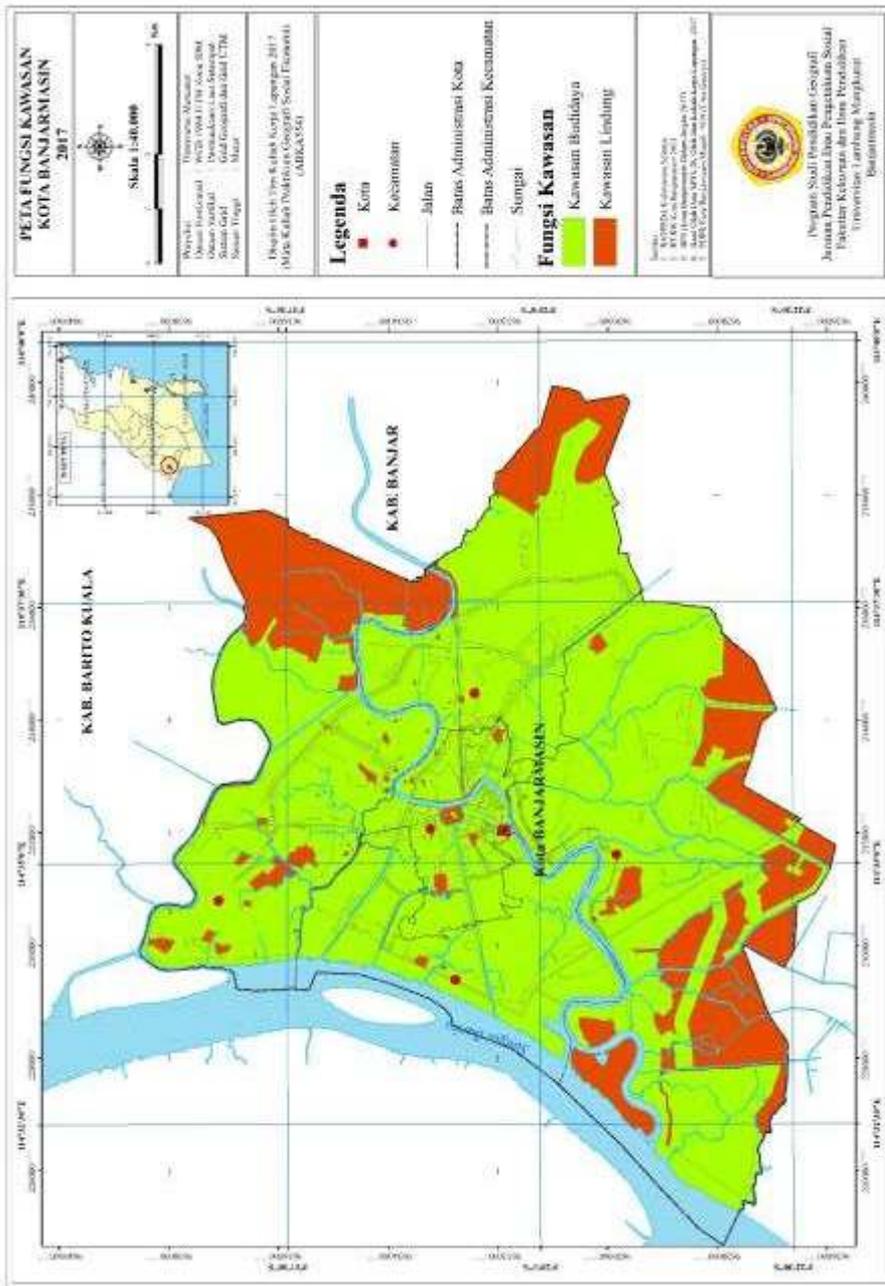
Fungsi lahan menurut Deliyanto, B. (tt) mempunyai fungsi lingkungan, sosial dan ekonomi sebagaimana dijelaskan berikut: (1) Fungsi lingkungan, yakni lahan yang dipandang sebagai muka bumi, berfungsi sebagai tempat kehidupan. Muka bumi di sini adalah *biosfer* (bulatan bumi tempat kehidupan) yang merupakan kulit bumi tempat persinggungan antara daratan (*lithosfer*), air (*hydrosfer*), dan udara (*atmosfer*). (2) Lahan dipandang sebagai sarana produksi, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman sehingga dapat menunjang kehidupan di muka bumi. Hal ini dapat dilihat dari tubuh tanah termasuk di dalamnya iklim dan air sangat penting bagi tumbuhan, baik itu yang dikembangkan melalui pertanian maupun yang tumbuh secara alami

yang berguna bagi kehidupan di muka bumi. (3) Lahan dipandang sebagai benda ekonomi, berfungsi sebagai benda yang dapat diperjualbelikan, sebagai tempat usaha, benda kekayaan, jaminan, dan sebagainya. (4) Lahan berfungsi sosial, yaitu lahan yang mempunyai fungsi sosial untuk kepentingan masyarakat umum, seperti pendidikan, kesehatan dan keagamaan.

2.3.2. Pemanfaatan Lahan Kota Banjarmasin

Pemanfaatan lahan ataupun fungsi ruang Kota Banjarmasin pada umumnya beraneka ragam di setiap kecamatan yang dapat dilihat pada Gambar 4.4 dan 4.5 serta uraian sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Banjarmasin Utara lahan didominasi oleh permukiman, terdapat juga lahan kosong yang ditanami oleh semak belukar dan pertanian;
- 2) Kecamatan Banjarmasin Tengah lahan sepenuhnya digunakan untuk lahan permukiman dan perkantoran pemerintah;
- 3) Kecamatan Banjarmasin Barat lahan dimanfaatkan untuk permukiman, industri dan pertanian;
- 4) Kecamatan Banjarmasin Timur pemanfaatan lahan didominasi oleh permukiman, terdapat juga lahan pertanian dan lahan kosong yang ditanami oleh semak belukar;
- 5) Kecamatan Banjarmasin Selatan pemanfaatan lahan didominasi oleh pertanian dan lahan kosong yang ditanami oleh semak belukar dan terdapat juga lahan yang dimanfaatkan untuk permukiman;



Gambar 5. Peta Administrasi Kota Banjarmasin

2.4. Kependudukan

2.3.3. Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin

Jumlah penduduk suatu daerah secara umum memang selalu meningkat setiap tahunnya. Peningkatan penduduk ini dapat memberikan pengaruh kebeberapa hal. Jumlah penduduk Kota Banjarmasin ada pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin Tahun 2012 - 2016

No	Kecamatan	Tahun									
		2012		2013		2014		2015		2016	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Banjarmasin	76146	75029	77228	76026	78370	77135	79528	78150	80611	79130
2	Banjarmasin Timur	57322	57825	58134	58592	58987	59442	59846	60216	60648	60963
3	Banjarmasin Barat	74222	72226	74769	72713	75351	73289	75952	73780	76468	74225
4	Banjarmasin	45833	47334	46108	47552	46392	47815	46708	48042	46971	48235
5	Banjarmasin Utara	70357	71735	72128	73528	74136	75306	76099	77119	78014	78918
JUMLAH		32388	32414	32836	32841	333236	332987	338133	337307	342712	341471
		648029		656778		666223		675440		684183	

Sumber: Kota Banjarmasin Dalam Angka Tahun 2013 – 2017

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk setiap tahunnya meningkat, dan peningkatan ini signifikan dari tahun ke tahun. Menurut Ananta (1993) menunjukkan setidaknya terdapat dua variabel yang terkait dengan kependudukan yaitu yang pertama, variabel demografi yaitu mortalitas (*mortality*), fertilitas (*fertility*) dan migrasi (*migration*) yang saling mempengaruhi terhadap jumlah, komposisi, persebaran penduduk, yang kedua, variabel non demografi yang dimaksud misalnya pendidikan, pendapatan penduduk, pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sungai Bilu merupakan bagian wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur yang mempunyai luas wilayah 0.55

km² dengan jumlah penduduk sampai akhir Tahun 2006 tercatat 9.956 jiwa dan 2.921 Kepala Keluarga yang terdiri dari 5.061 jiwa laki-laki dan 4.895 jiwa perempuan. Tingkat pendidikan masyarakat, lebih didominasi oleh lulusan SLTP dan SLTA/Sederajat, sementara dari Klasifikasi usia, didominasi pada usia produktif antara 22 sampai 59 tahun atau 55.76% dari keseluruhan jumlah penduduk, dengan mata pencaharian terdiri dari petani, pedagang, PNS, buruh, nelayan, pengusaha dan pekerjaan lainnya.

Aspek kemasyarakatan, di Kelurahan Sungai Bilu terdiri dari bermacam-macam etnis dan suku bangsa dan penganut agama, dengan mayoritas pemeluk agama islam mencapai 9.696 jiwa (97.38%), di Kelurahan Sungai Bilu keadaan suku bangsa dapat diperkirakan menurut klasifikasikan sebagai berikut: Banjar 7.016 jiwa (70.47%); Jawa 1.200 jiwa (12.05%); Madura 540 jiwa (5.42%); Lainnya (termasuk Dayak, Bugis, Batak, Keturunan Arab) 1.200 jiwa (12.05%).

Salah satu komponen yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kelahiran (*fertilitas*) yang bersifat menambah jumlah penduduk. Fertilitas adalah kemampuan menghasilkan keturunan yang dikaitkan dengan kesuburan wanita (*fekunditas*). Menurut Sugiri, Indonesia harus memiliki *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK), yang meliputi *fertilitas*, *mortalitas* dan mobilitas penduduk. Kondisi yang diinginkan adalah penduduk tumbuh seimbang sebagai prasyarat tercapainya

penduduk tanpa pertumbuhan, dimana tingkat fertilitas, mortalitas semakin menurun, dan persebaran lebih merata.

Jumlah penduduk dunia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan termasuk juga di Indonesia dan kota-kotanya seperti Kota Banjarmasin. Penyebab pertambahan penduduk yang utama karena adanya kelahiran (*fertilitas*). Beberapa komponen yang mempengaruhi *fertilitas* antara lain latar belakang pendidikan, pekerjaan, pendapatan, umur kawin pertama, persepsi nilai anak, kematian bayi/balita dan *unmet need*.

Fertilitas menjadi faktor utama dalam meningkatnya pertumbuhan penduduk, tetapi masih ada faktor lain yang juga dapat membuat jumlah penduduk Kota Banjarmasin meningkat yaitu migrasi. Kota Banjarmasin yang merupakan kota besar menjadi salah satu tujuan bagi para pendatang dari luar dengan berbagai tuntutan seperti pekerjaan, pendidikan, pernikahan dan lain-lain.

Migrasi masuk ke kota (termasuk Kota Banjarmasin) sangat erat

kaitannya dengan kebijakan pembangunan yang bersifat bias kota (*urban bias*). Kota Banjarmasin termasuk kota yang menarik para imigran dari Kalimantan Selatan ataupun dari luar Kalimantan Selatan karena Kota Banjarmasin menjadi pusat ekonomi, pusat pemerintahan, pendidikan dan lainnya di Kalimantan Selatan. Kondisi Kota Banjarmasin berkembang pesat yang berfungsi sebagai kegiatan ekonomi telah mengundang penduduk dari daerah lain maupun pedesaan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih

layak di kota, pada umumnya kota selalu dipandang sebagai pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan, dan sebagainya. Fungsi dan peranannya atau sumber pengaruh atau sumber stimulasinya banyak berasal dari kota, kota memiliki tingkat yang tertinggi, walaupun demikian menurut sejarah perkembangannya kota berasal dari tempat-tempat permukiman yang sangat sederhana (Berdame, 2013).

2.3.4. Kepadatan Penduduk Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin termasuk kota yang permukimannya padat dikarenakan pertumbuhan penduduknya setiap tahun sedangkan lahan permukiman yang tersedia hanya sedikit. Mengingat Kota Banjarmasin adalah kota yang mempunyai banyak sungai sehingga dijuluki “Kota Seribu Sungai” kepadatan penduduk dapat menjadi masalah bagi lingkungannya karena kepadatan penduduk di bantaran sungai dapat menciptakan permukiman yang kumuh. Kepadatan penduduk Kota Banjarmasin terbaru dapat dilihat pada Tabel 3.

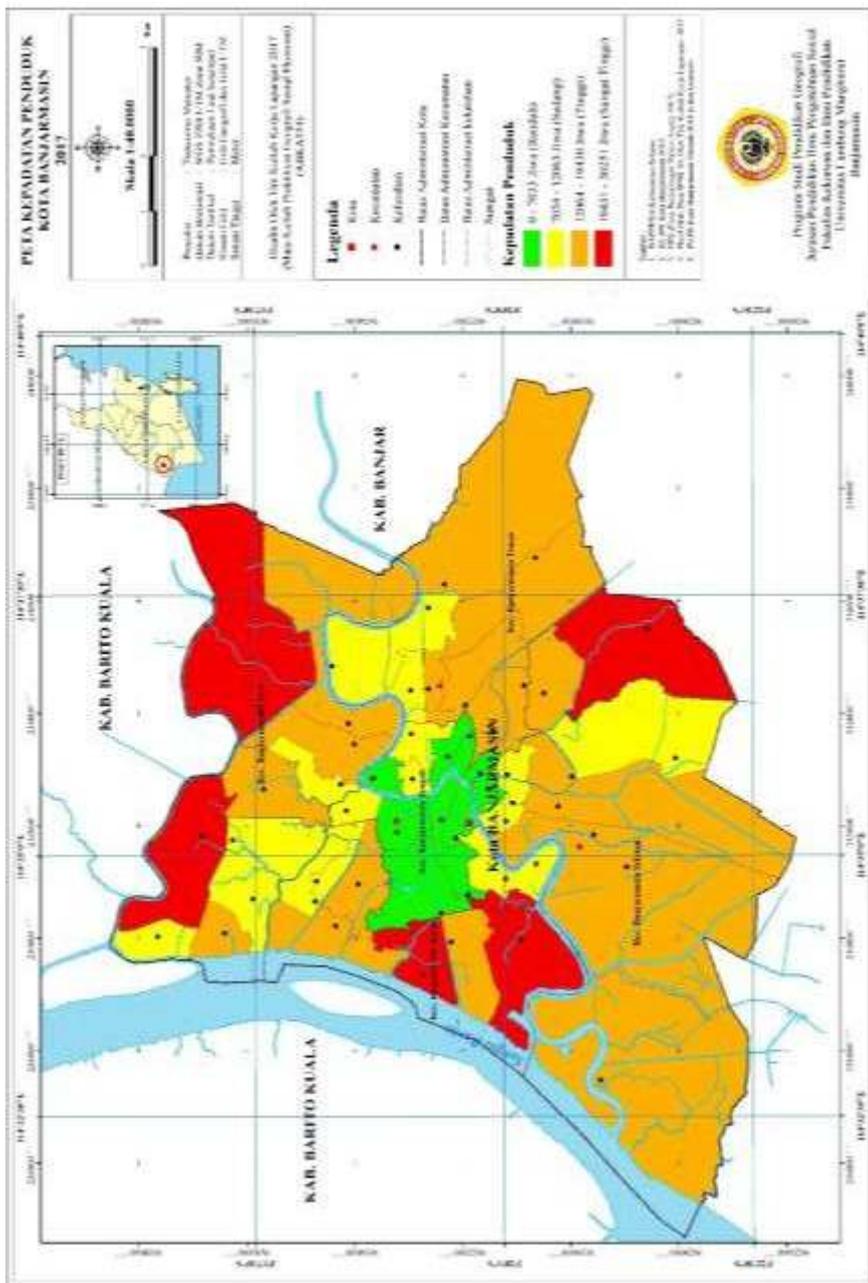
Tabel 3. Kepadatan Penduduk Kota Banjarmasin Tahun 2012 - 2016

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (km ²)				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Banjarmasin Selatan	38,26	3950	4004	4063	4120	4175
2	Banjarmasin Timur	23,86	4826	4892	4963	5032	5097
3	Banjarmasin Barat	13,37	11154	11232	11321	11404	11477
4	Banjarmasin Tengah	11,66	13989	14063	14145	14227	14295
5	Banjarmasin Utara	16,54	8591	8806	9035	9263	9488

Sumber: Kota Banjarmasin Dalam Angka 2013 – 2017

Data Tabel 3 menunjukkan bahwa kepadatan penduduk tertinggi di Kota Banjarmasin terdapat pada Kecamatan Banjarmasin Tengah. Hal

tersebut karena luas wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah tidak sebanding dengan jumlah penduduknya. Selain itu letak geografis Kecamatan Banjarmasin Tengah yang terletak di tengah Kota Banjarmasin juga mempengaruhi kepadatan penduduknya. Wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah merupakan wilayah terkecil di Kota Banjarmasin. Sedangkan kepadatan penduduk yang rendah ada pada Kecamatan Banjarmasin Selatan karena luas wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah yang terluas dari 5 kecamatan di Kota Banjarmasin sehingga masih banyak lahan yang tidak digunakan untuk bermukim. Kepadatan penduduk Kota Banjarmasin dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Peta Kepadatan Penduduk Kota Banjarmasin

Kepadatan penduduk memang sudah menjadi masalah bagi kota yang menjadi tujuan para imigran dan pertumbuhan penduduknya tinggi seperti kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin kepadatan penduduknya setiap tahun selalu meningkat dari tahun 2012 – 2016. Hal ini terjadi karena pertumbuhan penduduk di Kota Banjarmasin setiap tahunnya juga meningkat. Pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia mengalami tingkat pertumbuhan yang tinggi dan pertumbuhan ini akan berlangsung terus dengan percepatan yang tinggi, meskipun telah membangun sistem yang ketat dalam kaitannya dengan pertumbuhan penduduk perkotaan di wilayah masing-masing. Tingkat pertumbuhan yang tidak disertai dengan pertumbuhan wilayah akan mengakibatkan terjadinya kepadatan penduduk. Menurut Nasution (2012) dalam Tiara, D. (2018) tingkat pertumbuhan penduduk dapat menambah beban berat bagi kota dalam rangka persiapan infrastruktur baru seperti pendidikan, kesehatan serta pelayanan-pelayanan perkotaan lainnya. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menimbulkan berbagai macam permasalahan yang mengiringinya.

2.4. Perekonomian Wilayah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan

yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (*riil*).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (*riil*) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

2.4.1. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi sering digunakan untuk melihat komposisi peranan masing-masing lapangan usaha/kategori terhadap nilai total PDRB maupun peranan subkategori terhadap kategorinya. Besaran nominal PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan dapat dilihat pada Tabel 4 dan 5.

Tabel 4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliaran Rupiah) Tahun 2012-2016

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**	Rata-rata
A	Pertanian, Kehutanan; dan perikanan	437,41	473,63	512,84	576,00	613,05	522,59
B	Pertambangan dan Peneggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	3317,46	3.536,40	3.860,63	4.248,19	4.581,42	3908,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	32,15	31,98	41,96	65,40	83,51	51,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	184,88	194,37	232,63	259,33	282,75	230,79
F	Konstruksi	1.592,58	1.689,60	1.954,49	2.255,69	2.458,08	1998,99

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**	Rata-rata
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sendeda Motor	1.946,94	2.168,43	2.487,79	2.828,26	3.169,88	2520,26
H	Transportasi dan Pergudangan	1.578,74	1.777,54	2.073,68	2.374,90	2.618,27	2084,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	511,23	576,28	665,83	732,86	796,54	656,55
J	Informasi dan Komunikasi	1.011,85	1.105,43	1.268,95	1.377,28	1.511,28	1254,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.980,78	2.388,01	2.701,86	2.983,78	3.302,32	2742,19
L	Real Estat	583,37	642,68	733,54	809,40	879,59	729,72
M	Jasa Perusahaan	398,67	446,8	526,88	591,26	651,67	523,06
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	885,26	988,6	1.118,01	1.319,87	1.381,81	1138,71
O	Jasa Pendidikan	717,11	799,19	930,23	1.087,21	1.266,04	959,96
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	654,93	744,23	871,54	1.019,86	1.158,61	889,83
Q	Jasa Lainnya	343,87	367,27	439,26	507,93	571,62	445,99
Produk Domestik Regional Bruto		16.177,22	17.930,44	20.420,11	23.037,24	25.326,47	

Sumber: PDRB Kota Banjarmasin 2012 – 2016

* *Angka Sementara*

** *Angka Sangat Sementara*

Tabel 4 menunjukkan bahwa angka PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2012-2016 selalu mengalami kenaikan dengan kisaran antara 400-600 miliar rupiah. Jenis usaha yang paling tinggi dari tahun 2012-2016 adalah perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Hasil pendaftaran pada tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah usaha/perusahaan menurut lapangan usaha, didominasi oleh

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 228,5 ribu usaha/perusahaan atau 48,40 persen dari seluruh usaha/perusahaan yang ada di Banjarmasin. (Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin).

Lapangan usaha paling kecil pada tahun 2012-2016 adalah pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, meski menjadi paling rendah diantara lapangan usaha lain akan tetapi lapangan usaha ini mengalami kenaikan pada setiap tahun. Penyebab lapangan usaha pengadaan listrik dan gas tidak memiliki nilai tinggi karena Kota Banjarmasin tidak memiliki sumber penghasil listrik. Sumber penghasil listrik kota Banjarmasin berasal dari Riam Kanan Kabupaten Banjar, yaitu waduk riam kanan.

Tabel 5 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliaran Rupiah) Tahun 2012-2016

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**	Rata-rata
A	Pertanian, Kehutanan; dan perikanan	402,26	242,33	422,72	436,87	459,69	392,77
B	Pertambangan dan Peneggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	2981,18	3.081,28	3.144,96	3.219,58	3.348,29	3155,06
D	Pengadaan Listrik dan Gas	36,23	38,25	47,17	60,24	63,31	49,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	171,04	174,24	190,45	200,28	216,07	190,42
F	Konstruksi	1.471,60	1.527,79	1.628,12	1.729,49	1.810,76	1633,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.716,03	1.845,42	1.993,16	2.123,48	2.272,07	1990,03

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**	Rata-rata
H	Transportasi dan Pergudangan	1.434,34	1.545,43	1.659,70	1.782,45	1.899,86	1664,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	464,37	508,24	538,81	570,95	606,78	537,83
J	Informasi dan Komunikasi	933,95	1.002,03	1.100,71	1.178,03	1.277,35	1078,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.729,47	1.985,44	2.120,62	2.221,43	2.396,72	2090,74
L	Real Estat	544,54	582,84	613,71	648,55	689,89	615,91
M	Jasa Perusahaan	343,71	373,05	399,41	427,76	462,71	401,33
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	774,75	802,87	849,43	923,89	943,15	858,82
O	Jasa Pendidikan	656,54	713,92	772,82	842,71	920,93	781,38
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	611,37	669,8	717,70	768,74	837,38	721,00
Q	Jasa Lainnya	317,49	325,61	354,40	377,84	407,06	356,48
Produk Domestik Regional Bruto		14.588,56	15.600,54	16.553,89	17.512,28	18.612,02	

Sumber :PDRB Kota Banjarmasin 2012 – 2016

* *Angka Sementara*

** *Angka Sangat Sementara*

Data pada Tabel 5 menunjukkan terdapat tiga lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar yaitu yang pertama lapangan usaha industri pengolahan mampu menghasilkan PDRB sebesar Rp.3155,06 miliar, kedua lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi mampu menghasilkan PDRB sebesar Rp.2090,74 miliar, dan yang ketiga lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mampu menghasilkan PDRB sebesar Rp.1990,03 miliar. Ketiga lapangan usaha tersebut memiliki peran yang besar, khususnya industri pengolahan hal ini

dikarenakan meningkatnya sektor industri pengolahan perkebunan dan industri perdagangan. Selain itu meningkatnya industri pengolahan yang ada di lapangan usaha maka semakin tinggi permintaan pasar baik di kota Banjarmasin maupun di luar Kalimantan Selatan yang menyebabkan kota Banjarmasin akan di jadikan kota perdagangan untuk melayani kegiatan perdagangan regional Banjarmasin sehingga dapat memberikan kontribusi besar bagi perekonomian daerah. Peranan PDRB menurut lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Miliaran Rupiah) Tahun 2012-2016

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**	Rata-rata
A	Pertanian, Kehutanan; dan perikanan	2,70	2,64	2,51	2,50	2,42	2,55
B	Pertambangan dan Peneggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	20,51	19,72	18,91	18,44	18,09	19,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,20	0,18	0,21	0,28	0,33	0,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,14	1,08	1,14	1,13	1,12	1,12
F	Konstruksi	9,84	9,42	9,57	9,79	9,71	9,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,04	12,09	12,18	12,28	12,52	12,22
H	Transportasi dan Pergudangan	9,76	9,91	10,16	10,31	10,34	10,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	3,16	3,21	3,26	3,18	3,15	3,19
J	Informasi dan Komunikasi	6,25	6,17	6,21	5,98	5,97	6,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,24	13,32	13,23	12,95	13,04	12,96
L	Real Estat	3,61	3,58	3,59	3,51	3,47	3,55
M	Jasa Perusahaan	2,46	2,49	2,58	2,57	2,57	2,53

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**	Rata-rata
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,47	5,51	5,48	5,73	5,46	5,53
O	Jasa Pendidikan	4,43	4,46	4,56	4,72	5,00	4,63
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	4,05	4,15	4,27	4,43	4,57	4,29
Q	Jasa Lainnya	2,13	2,05	2,15	2,2	2,26	2,16
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber : PDRB Kota Banjarmasin 2012 – 2016

* *Angka Sementara*

** *Angka Sangat Sementara*

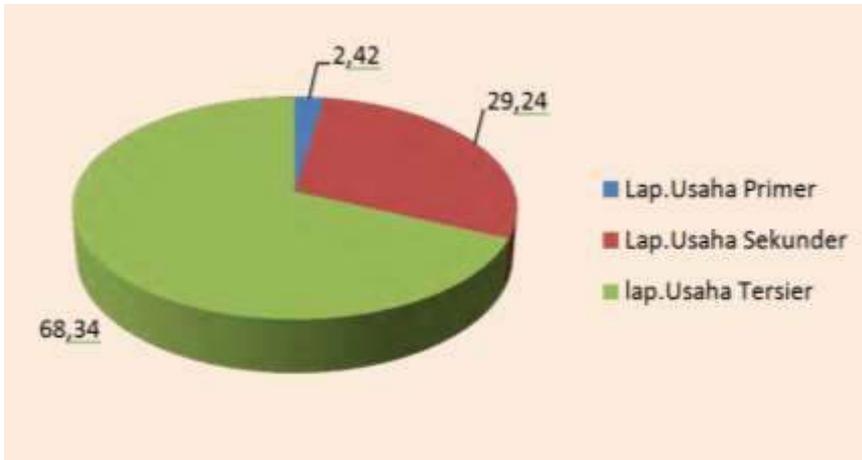
Data pada Tabel 6 menunjukkan terdapat tiga lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar dalam rangka mengatasi pengangguran di Kota Banjarmasin yaitu lapangan usaha industri pengolahan, industri jasa keuangan dan asuransi, dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dari kurun waktu 5 tahun terakhir (2012-2016)

Industri pengolahan memiliki peranan yang sangat besar dalam bidang lapangan usaha, namun perkembangannya dari tahun ketahun cenderung mengalami penurunan hal ini dikarenakan melemahnya permintaan global khususnya produk industri pengolahan karet yang mana masih dirasa belum baik atau optimal serta masih terasanya dampak dari tutupnya beberapa perusahaan industri kayu lapis di Kota Banjarmasin, selain itu masih kurangnya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang dapat mendorong pemberdayaan sektor usaha industri pengolahan ke arah lebih baik, masalah lain yang dihadapi pengelola usaha sector industri

pengolahan yaitu masih rendahnya kualitas SDM pengelola sektor industri pengolahan terkait dengan manajemen pengelolaan usaha yang masih relatif bersifat tradisional, sehingga faktor-faktor pengembangan karyawan seperti kesempatan karir memang relatif sangat terbatas, selain itu meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi yang diberikan oleh lapangan usaha jasa seperti jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa lainnya yang semakin berkembang paralel dengan pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi yang mengarah kepada struktur ekonomi Kota Metropolitan.

PDRB lapangan usaha dapat dijelaskan melalui 17 kategori lapangan usaha. 17 lapangan usaha dikelompokkan menjadi 3 sektor utama yakni sektor primer, sekunder dan tersier, Kontribusi kelompok lapangan usaha primer (lapangan usaha kategori A dan B) yaitu kelompok usaha yang mengandalkan sumber daya alam, memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Banjarmasin pada tahun 2016 sebesar 2,42 persen, Sementara itu kontribusi kelompok usaha sekunder (lapangan usaha kategori C, D, E dan F) yaitu kelompok usaha yang memproduksi barang, memberikan andil sebesar 29,24 persen. Sedangkan kontribusi di kelompok lapangan usaha tersier (lapangan usaha kategori G sampai dengan U), yaitu usaha yang bergerak di bidang produksi jasa, memberikan kontribusi sebesar 68,34 persen, Penyumbang terbesar kelompok usaha tersier adalah lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, kategori informasi dan komunikasi serta lapangan usaha kategori

transportasi dan perdagangan.



Gambar 7 Struktur Perekonomian Berdasarkan Kelompok Lapangan
Sumber: PDRB Kota Banjarmasin 2012 – 2016

2.4.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara/daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional/regional, adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Perkembangan kategori ekonomi yang terbentuk dari laju pertumbuhan akan memberikan gambaran tentang tingkat perubahan ekonomi yang terjadi, Pergerakan laju pertumbuhan ini merupakan indikator

penting untuk mengetahui hasil pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah dan sasaran pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketersediaan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, modal, teknologi, kebijakan pemerintah daerah dan situasi keamanan wilayah, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh situasi perekonomian nasional maupun internasional. Pertumbuhan PDRB Kota Banjarmasin dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7 Pertumbuhan PDRB Kota Banjarmasin (Persen) Tahun 2012-2016

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**	Rata-rata
A	Pertanian, Kehutanan; dan perikanan	3,70	5,49	(0,38)	3,35	5,22	3,48
B	Pertambangan dan Peneggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	3,27	3,36	2,07	2,37	4,00	3,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12,56	5,59	23,30	27,71	5,11	14,85
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,20	1,87	9,31	5,16	7,88	5,08
F	Konstruksi	6,61	3,82	6,57	6,23	4,70	5,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,08	7,54	8,01	6,54	7,00	7,23
H	Transportasi dan Pergudangan	7,05	7,74	7,39	7,40	6,59	7,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	8,48	9,45	6,01	5,97	6,28	7,24
J	Informasi dan Komunikasi	5,33	7,29	9,85	7,02	8,43	7,58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,26	14,80	6,81	4,75	7,89	9,10
L	Real Estat	3,99	7,03	6,30	5,68	6,37	5,87
M	Jasa Perusahaan	5,70	8,54	7,07	7,10	8,17	7,32

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**	Rata-rata
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,88	3,63	5,80	8,77	2,08	5,63
O	Jasa Pendidikan	4,63	8,74	8,25	9,04	9,28	7,99
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	7,21	9,56	7,15	7,11	8,93	7,99
Q	Jasa Lainnya	3,22	2,56	8,84	6,61	7,73	5,79
Produk Domestik Regional Bruto		6,18	6,93	6,11	5,79	6,28	

Sumber :PDRB Kota Banjarmasin 2012 – 2016

* *Angka Sementara*

** *Angka Sangat Sementara*

Data pada Tabel 7 menunjukkan jenis lapangan usaha bidang pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pertumbuhan PDRB tertinggi yaitu terjadi di tahun 2013 dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya dan terendah terjadi di tahun 2014. Hal ini karena kondisi lahan untuk sektor pertanian, kehutanan; dan perikanan yang dapat berubah-ubah seiring berkembangnya waktu akibat berbagai macam faktor seperti faktor alami dan buatan contohnya pengalih fungsian lahan hutan menjadi lahan permukiman atau lahan industri dan lain sebagainya. Sehingga menyebabkan lapangan usaha pada bidang ini menjadi lebih sedikit tergantung dengan kondisi ketersediaan lahan pada lapangan usaha tersebut. Lapangan usaha bidang pertanian, kehutanan; dan perikanan merupakan sektor yang perlu dikembangkan untuk mendukung kedaulatan pangan dilakukan dengan meningkatkan produksi sekaligus menggerakkan usaha industri pengolahan hasil pertanian, kehutanan dan perikanan.

Lapangan usaha bidang industri pengolahan mengalami fluktuasi yang tidak terlalu mencolok dimana yang paling tertinggi terjadi pada tahun 2016 dan terendah pada tahun 2014. Sektor industri pengolahan dapat berupa pengolahan bahan baku mentah, setengah jadi ataupun jadi sehingga seringkali ketersediaan bahan baku dan tingkat permintaan dari produk yang dihasilkan sangat menentukan tinggi atau rendahnya kondisi ketersediaan lapangan usaha pada sektor industri pengolahan.

Lapangan usaha bidang pengadaan listrik dan gas mengalami kenaikan dan penurunan dimana yang tertinggi yaitu terjadi pada tahun 2015 dan terendah pada tahun 2016. Hal ini dapat disebabkan oleh kelangkaan sumberdaya alam minyak bumi dan gas serta adanya peningkatan harga sejumlah komoditi barang akibat persediaannya yang dapat terbatas dengan tingkat satuan harga yang berubah dan seringkali meningkat dari harga yang sebelumnya, sehingga menurunkan konsumsi listrik masyarakat di Kota Banjarmasin dan termasuk kedalam kategori rendah serta kurang dari rata-rata tingkat konsumsi listrik nasional.

Lapangan usaha bidang pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Kenaikan yang cukup tajam yaitu terjadi pada tahun 2014 dan terendah pada tahun 2012. Hal ini dapat disebabkan karena pemerintah setempat telah menggiatkan dan memprogramkan untuk dapat menjadikan Kota Banjarmasin sebagai kota bersih dan kota tanpa kawasan kumuh sehingga perbaikan fasilitas sarana

dan prasarana semakin ditingkatkan dan membuka peluang lapangan usaha bagi masyarakat setempat. Permasalahan dalam pengadaan lapangan usaha ini yaitu dalam penyelenggaraan air minum dan sanitasi minim keberlanjutan sarana dan prasarana yang telah terbangun.

Lapangan usaha bidang konstruksi mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2012 merupakan tahun dengan angka pertumbuhan PDRB yang tertinggi dan terendah terjadi pada tahun 2013. Hal ini karena adanya arah kebijakan pemerintah setempat untuk melakukan pembangunan perumahan dengan meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah untuk mendapatkan hunian yang layak, aman terjangkau dengan didukung fasilitas penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang lebih memadai sehingga menyebabkan adanya tingkat lapangan usaha pada bidang konstruksi yang tinggi. Permasalahan pada bidang konstruksi yaitu disebabkan kurang optimalnya kesadaran dan pemberdayaan masyarakat, keterlibatan aktif pemerintah daerah baik dari segi regulasi maupun pendanaan serta penerapan pada manajemen aset.

Lapangan usaha bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dapat diketahui bahwa terdapat kenaikan dan penurunan yang cukup stabil dimana yang tertinggi terjadi pada tahun 2014 dan terendah pada tahun 2015. Hal ini dikarenakan industri perdagangan khususnya yang eceran merupakan lapangan usaha yang saat ini banyak dikembangkan oleh masyarakat setempat. Namun tantangan yang dihadapi

pada sektor industri perdagangan yaitu adanya daya saing yang dapat ditentukan oleh faktor peningkatan biaya ekonomi dan kondisi kelayakan pelayanan yang dilakukan sehingga akan mendorong tinggi atau rendahnya lapangan usaha pada bidang ini.

Lapangan usaha bidang Transportasi dan Pergudangan menunjukkan adanya fluktuasi yang tidak terlalu signifikan dimana yang paling tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan terendah terjadi pada tahun 2016. Penurunan yang terjadi tidak terlalu mencolok dikarenakan usaha transportasi dan pergudangan membuka peluang usaha yang lebih sedikit jika dibandingkan peluang usaha industri pengadaan listrik dan gas tetapi masih dapat dikategorikan menyerap angkatan kerja seperti adanya transportasi jasa pengangkutan barang yang memerlukan buruh angkut setiap harinya.

Lapangan usaha bidang penyediaan akomodasi dan makan mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2013 mengalami penurunan hingga tahun 2016. Hal ini karena penyediaan fasilitas akomodasi dan makan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga pertumbuhannya cenderung melambat sesuai dengan tingkat permintaan dan penawaran yang dilakukan.

Data pada Tabel 9 menunjukkan bahwa Pertumbuhan PDRB lapangan usaha di Kota Banjarmasin pada tahun 2012-2016 dibidang informasi dan komunikasi pada jangka waktu beberapa tahun ini mengalami

fluktuasi dengan frekuensi tertinggi terjadi pada tahun 2014. Hal ini dikarenakan Kota Banjarmasin merupakan pusat kota pendidikan dan industri sehingga memerlukan banyak pekerja di bidang informasi dan komunikasi untuk mendapatkan kemudahan sistem di bidang informasi, komunikasi. Pada tahun 2014 sistem informasi dan komunikasi mulai gencar-gencarnya dilakukan oleh masyarakat, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2012 dikarenakan masih kurangnya keperluan masyarakat mengenai informasi dan komunikasi yang diperlukan berdasarkan kebutuhan yang ada.

Data pada Tabel 7 menunjukkan bahwa Pertumbuhan PDRB lapangan usaha di Kota Banjarmasin pada tahun 2012-2016 dibidang industri Jasa Keuangan dan Asuransi pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh tingginya minat masyarakat untuk menggunakan jasa asuransi mengingat rawannya bencana dan musibah sewaktu-waktu. Jasa asuransi yang lebih sering digunakan oleh masyarakat adalah keselamatan dalam pekerjaan, asuransi yang disediakan langsung oleh Perusahaan untuk tenaga kerjanya dan asuransi jiwa, sedangkan pada tahun 2015 dibidang industri Jasa Keuangan dan Asuransi lebih rendah dibandingkan tahun selanjutnya dikarenakan masih kurang pahamiannya masyarakat mengenai jasa asuransi.

Pertumbuhan PDRB lapangan usaha di Kota Banjarmasin pada tahun 2012-2016 dibidang *real estat* pada tahun 2012-2016 telah mengalami fluktuasi dengan frekuensi tertinggi terjadi pada tahun 2013. Salah satu

penyebab tingginya angka *real state* pada tahun tersebut ialah banyaknya angka migrasi masyarakat di kota Banjarmasin sehingga mendorong masyarakat untuk mendirikan perumahan di Banjarmasin, sedangkan frekuensi *real state* (perumahan) terendah terjadi pada tahun 2012, hal ini dikarenakan masih rendahnya angka migrasi di Banjarmasin dibandingkan dengan tahun-tahun selanjutnya.

Pertumbuhan PDRB lapangan usaha di Kota Banjarmasin pada

tahun 2012-2016 dibidang Jasa Perusahaan mengalami fluktuasi dengan frekuensi tertinggi terjadi pada tahun 2013 disebabkan oleh banyaknya pengembangan pembangunan perusahaan baru yang ada di wilayah Kota Banjarmasin sehingga memerlukan lapangan usaha di bidang jasa perusahaan yang sangat tinggi, sedangkan frekuensi terendah berada pada tahun 2012 yang bisa saja belum terjadi perkembangan pembangunan terlalu pesat.

Pertumbuhan PDRB lapangan usaha di Kota Banjarmasin pada tahun 2012-2016 dibidang administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mengalami fluktuasi dengan frekuensi tertinggi terjadi pada tahun 2015. Hal ini dikarenakan arena pemerintah berhasil mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi yang mempercepat kinerja di sektor administrasi pemerintahan, sedangkan frekuensi terendah terjadi pada tahun 2016, hal ini dikarenakan sudah banyaknya administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang di bangun pada

tahun 2015, sehingga ditahun 2016 frekuensinya mengalami penurunan.

Pertumbuhan PDRB lapangan usaha di Kota Banjarmasin pada tahun 2012-2016 dibidang jasa pendidikan mengalami fluktuasi dan terjadi peningkatan tertinggi pada tahun 2015 disebabkan oleh Pembangunan Pendidikan dari semua tingkat pendidikan di Kota Banjarmasin, karena Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota urbanisasi bidang Pendidikan, sedangkan belum terjadi peningkatan pada tahun 2012 disebabkan oleh belum meratanya pembangunan sarana pendidikan.

Jasa kesehatan merupakan salah satu, jasa yang amat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Pesatnya pertumbuhan layanan kesehatan saat ini meningkatkan persaingan antara penyedia jasa kesehatan yang satu dengan yang lain. Kondisi ini memaksa para pengelola layanan kesehatan berfikir dan berusaha dalam mempertahankan atau meningkatkan juga memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu. Salah satu pelayanan tersebut adalah pelayanan kesehatan yang merupakan bentuk pelayanan yang diterima langsung oleh pasien. Pertumbuhan PDRB lapangan usaha di Kota Banjarmasin pada tahun 2012-2016 dibidang Jasa Kesehatan mengalami fluktuasi dengan frekuensi tertinggi terjadi pada tahun 2013, sedangkan frekuensi yang terendah terjadi pada tahun 2015. Bila dilihat dari tabel tersebut, frekuensi jasa kesehatan antara tahun 2012-2016 memiliki selisih yang tidak begitu signifikan. Hal ini karena memang pentingnya keberadaan jasa kesehatan tersebut bagi masyarakat sehingga frekuensinya

akan cenderung hampir seimbang dari tahun ke tahun.

Tabel 8 Pertumbuhan PDRB Kota Banjarmasin Tahun 2012-2016

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**	Rata-rata
A	Pertanian, Kehutanan; dan perikanan	0,1	0,15	0,1	0,09	0,13	02.49
B	Pertambangan dan Peneggalian	0,00	0	0	0	0	00.00
C	Industri Pengolahan	0,69	0,69	0,41	0,45	0,73	14.15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,02	0,1	0,06	0,08	01.17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,01	0,02	0,1	0,06	0,09	01.20
F	Konstruksi	0,66	0,39	0,64	0,61	0,48	13.20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,83	0,89	0,95	0,79	0,85	20.41
H	Transportasi dan Pergudangan	0,69	0,76	0,73	0,74	0,67	17.13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	0,26	0,3	0,2	0,19	0,2	05.31
J	Informasi dan Komunikasi	0,34	0,47	0,63	0,47	0,57	11.54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,27	1,75	0,87	0,61	1	02.24
L	Real Estat	0,15	0,26	0,2	0,21	0,24	05.05
M	Jasa Perusahaan	0,13	0,2	0,17	0,17	0,2	04.10
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,41	0,19	0,3	0,45	0,11	07.00
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	0,21	0,39	0,38	0,42	0,45	08.52
Q	Jasa Lainnya	0,07	0,08	0,18	0,14	0,17	03.04
Produk Domestik Regional Bruto		6,18	6,93	6,11	5,79	6,28	

Sumber :PDRB Kota Banjarmasin 2012 – 2016

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lapangan usaha kategori jasa keuangan ditinjau dari sumber pertumbuhannya memberikan kontribusi terbesar terhadap total pertumbuhan PDRB tahun 2016, yaitu sebesar 1,00 persen. Selanjutnya sumber pertumbuhan yang cukup besar juga berasal dari kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,85 persen dan kategori transportasi dan pergudangan sebesar 0,67 persen, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 10.

2.4.3. PDRB Perkapita

Tujuan akhir penghitungan PDRB adalah untuk mendapatkan angka PDRB perkapita, PDRB perkapita merupakan salah satu indikator penting yang biasa digunakan sebagai alat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum di suatu wilayah.

Angka PDRB perkapita yang didapat dengan membagi total nilai PDRB atas dasar harga belaku di suatu daerah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut, sebenarnya belum bisa menggambarkan secara riil pendapatan yang diterima masing-masing penduduk, namun masih cukup relevan untuk mengetahui apakah secara rata-rata, pendapatan masyarakat mengalami peningkatan atau tidak.



Gambar 8. PDRB Perkapita Kota Banjarmasin

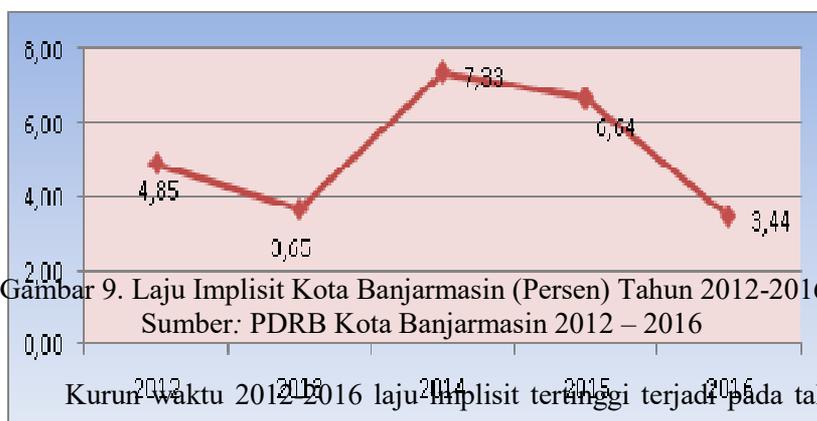
Sumber: PDRB Kota Banjarmasin 2012 – 2016

Gambar 8 menunjukkan bahwa PDRB perkapita Kota Banjarmasin lima tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahun dan secara umum kesejahteraan masyarakat Kota Banjarmasin dari tahun ke tahun semakin membaik. Tahun 2016 PDRB perkapita Kota Banjarmasin atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 37,02 juta atau naik 8,53 persen dibanding tahun sebelumnya. Dalam periode lima tahun terakhir telah terjadi peningkatan PDRB per kapita mencapai 48,14 persen, yaitu dari Rp. 24,99 juta pada tahun 2012 menjadi Rp. 37,02 juta pada tahun 2016.

2.4.4. Tingkat Perkembangan Harga

Pemerintah selalu berusaha agar laju inflasi selalu terkendali, Apabila inflasi tinggi, peningkatan pendapatan yang diterima oleh masyarakat tidak akan mempunyai arti, karena dengan tingginya tingkat inflasi kemampuan daya beli dari pendapatan yang diterima akan menurun, terutama untuk masyarakat yang berpendapatan tetap.

Hasil bagi PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, maka diperoleh indeks harga implisit. Perubahan indeks harga implisit antar tahun merupakan gambaran inflasi dari sisi produsen atau biasa disebut laju implisit, Hasil perhitungan indeks implisit dapat menunjukkan adanya kenaikan harga barang dan jasa atau sebaliknya. Berikut ini merupakan gambaran laju implisit Kota Banjarmasin, yang dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Laju Implisit Kota Banjarmasin (Persen) Tahun 2012-2016
Sumber: PDRB Kota Banjarmasin 2012 – 2016

Kurun waktu 2012-2016 laju implisit tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 7,33 persen dan tahun 2015 sebesar 6,64 persen dengan rata-rata sebesar 5,18 persen. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM atau mencabut subsidi BBM berdampak terhadap laju implisit lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yang mempunyai mempunyai laju implisit tertinggi 22,06 persen pada tahun 2015 dan 21,48 persen pada tahun 2016.

Besaran laju implisit untuk masing-masing lapangan usaha dapat dilihat pada

Tabel 9.

Tabel 9 Laju Implisit Menurut Usaha Kota Banjarmasin (%) Tahun 2012-2016

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**	Rata-rata
A	Pertanian, Kehutanan; dan perikanan	3,05	2,65	8,69	8,68	1,15	4,84
B	Pertambangan dan Peneggalian	3,76	3,14	6,96	7,49	3,7	5,01
C	Industri Pengolahan	0,20	0,2638	6,42	22,06	21,48	10,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,69	3,21	9,49	6,01	1,07	4,69
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,09	2,19	8,55	8,65	4,08	5,51
F	Konstruksi	4,09	3,57	6,22	6,71	4,75	5,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,87	3,57	6,22	6,71	4,75	5,62
H	Transportasi dan Pergudangan	4,41	4,5	8,63	6,64	3,43	5,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	2,03	3	8,98	3,87	2,27	4,03
J	Informasi dan Komunikasi	2,57	1,83	4,5	1,41	1,2	2,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,26	5,02	5,93	5,42	2,58	5,44
L	Real Estat	3,03	2,93	8,4	4,41	2,16	4,19
M	Jasa Perusahaan	6,58	3,26	10,14	4,78	1,89	5,33
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,90	7,76	6,89	8,54	2,56	6,73
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	3,58	3,72	9,29	9,25	4,29	6,03
Q	Jasa Lainnya	2,9	4,14	9,89	8,46	4,46	5,97

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**	Rata-rata
Produk Domestik Regional Bruto	4,85	3,65	7,33	6,64	3,44	

Sumber :PDRB Kota Banjarmasin 2012 – 2016

* *Angka Sementara*

** *Angka Sangat Sementara*

Laju implisit menurut usaha kota Banjarmasin dari tahun 2012-2016 terdiri dari beberapa lapangan usaha antara lain: (a) pertanian, kehutanan, dan perikanan; (b) pertambangan dan penggalian; (c) industri pengolahan; (d) pengadaan listrik dan gas; (e) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; (f) konstruksi; (g) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (h) transportasi dan pergudangan; (i) penyediaan akomodasi dan makan; (j) informasi dan komunikasi; (k) jasa keuangan dan asuransi; (l) real estat; (m) administrasi pemerintahan, pertanian, dan jaminan sosial wajib; (n) jasa kesehatan dan kegiatan jasa lainnya.

Data pada Tabel 9 menunjukkan bahwa jenis lapangan usaha yang memiliki rata-rata laju implisit tertinggi terjadi pada industri pengolahan. Industri pengolahan memiliki rata-rata laju implisit tinggi karena didukung dengan gaya hidup masyarakat di Banjarmasin yang terkategori konsumtif, sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab meningkat/tingginya laju implisit industri pengolahan di Kota Banjarmasin. Sedangkan untuk lapangan usaha yang mengalami laju implisit rendah di Banjarmasin terdapat pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi. Salah satu penyebab

mengapa laju implisit di lapangan usaha Informasi dan Komunikasi rendah karena mayoritas masyarakat telah memiliki alat/sarana informasi dan komunikasi sendiri-sendiri yang mempermudah mereka untuk melakukan berbagai aktivitas terkait informasi dan komunikasi, contohnya ialah Hp. Sehingga hal ini menjadi salah satu pemicu mengapa jasa informasi dan komunikasi jarang dimanfaatkan oleh masyarakat.

2.5. Fasilitas dan Utilitas

2.5.1. Fasilitas

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dinilai sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu untuk pemenuhan kebutuhan tertentu. Pengertian lain menyebutkan jika dikaitkan dengan pemukiman, maka fasilitas adalah suatu aktivitas atau materi yang berfungsi melayani kebutuhan individu atau kelompok individu dalam suatu lingkungan kehidupan (Rivai A, 1991, dalam Rahman, G.R. Farhatul M. 2019). Fasilitas umum yang terdapat

(tersedia) di Kota Banjarmasin dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10 Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Kota Banjarmasin

No	Fasilitas	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Taman Kanak-Kanak	277	281	497	403	326
2	Sekolah Dasar	242	244	252	253	247
3	SLTP	59	59	64	66	63
4	SMU	29	29	29	29	28
5	SMK	19	18	21	22	21
6	Rumah Sakit Umum	10	9	13	9	9
7	Rumah Sakit Bersalin	0	0	3	0	1
8	Puskesmas	26	26	26	26	26

No	Fasilitas	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
9	Puskesmas Pembantu	35	35	46	35	35
10	Puskesmas Keliling	26	26	16	26	95
11	Posyandu	387	387	371	155	390
12	Balai Pengobatan	0	0	0	0	0
13	Klinik	6	13	4	18	33
14	Apotik	143	151	28	0	163
15	Pasar	23	8	30	30	91
16	Hotel	0	0	96	92	188
17	Tempat Peribadatan	636	1044	857	1445	2739

Sumber : BPS Kota Banjarmasin Dalam Angka Tahun 2013-2017

Data pada Tabel 10 menunjukkan secara umum, fasilitas di Kota Banjarmasin setiap tahunnya terus bertambah, karena jumlah penduduk Kota Banjarmasin selalu meningkat mengharuskan dilakukannya pembangunan fasilitas. Kota Banjarmasin sendiri merupakan pusat pendidikan di Kalimantan selatan sebagai contoh adalah Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas negeri terbesar di Kalimantan Selatan sehingga menarik minat untuk menuntut ilmu di Kota Banjarmasin.

Kelurahan Sungai Bilu memiliki fasilitas kesehatan, yakni: (1)

puskesmas: 1 buah; (2) Poskesdes: 2 buah; (3) Balai pengobatan: 2 buah; (4) Bidan: 9 orang; (5) Apotik: 3 buah; dan (6) Posyandu: 11 buah. Sedangkan jumlah sarana pendidikan, yakni: (a) Pendidikan Formal Negeri, yakni: (1) SD: 6 buah; (2) SMPN; 1 buah; (3) SMAN: 1 buah. (b) Pendidikan Formal Swasta, yakni: (1) Taman Bermain: 1 buah; (2) Taman Kanak-kanak: 6 buah; (3) SMP: 1 buah; (4) SMA: 2 buah (Profil Kelurahan Sungai Bilu, 2016).

2.5.2. Utilitas

Utilitas merupakan preferensi atau nilai guna pengambil keputusan dengan mempertimbangkan faktor risiko berupa angka yang mewakili nilai *pay off* sebenarnya berdasarkan keputusan. Angka utilitas terbesar mewakili alternatif yang paling disukai, sedangkan angka utilitas terkecil menunjukkan alternatif yang paling tidak disukai (Supranto: 2005 dalam Pangestuti, C.D. 2014). Permendagri (No.1 tahun 1987) dijelaskan bahwa prasarana kota terdiri atas 3 kelompok utama yaitu utilitas umum, prasarana lingkungan dan fasilitas sosial. Utilitas jalan di Kota Banjarmasin dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11 Utilitas Jalan di Kota Banjarmasin

No	Jenis Permukaan	2012	2013	2014	2015	2016
		Panjang Jalan				
1	Diaspal	360,19	377,02	377,02	377,02	408,26
2	Kerikil/Pengerasan Batu/Beton	272,63	274,96	274,96	274,96	342,92
3	Tanah	63,81	67,1	67,1	67,1	0,63

Sumber: Dinas Bina Marga Kota Banjarmasin

Pertambahan utilitas jalan dipengaruhi oleh pembangunan perumahan, permukiman, dan perkantoran yang semakin banyak. Perubahan dari semua faktor ini di pengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat yang menyebabkan permukiman yang semakin banyak sehingga pemerintah membuat jalan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pertumbuhan penduduk ini juga mempengaruhi pembangunan perumahan untuk tempat tinggal mereka. Sehingga terjadi nya penambahan utilitas jalan

karena diperlukan. Dari data diatas selama 4 tahun dari tahun 2012-2015 utilitas jalan masih sejajar atau datar tidak ada peningkatan, kemudian di tahun 2016 mengalami peningkatan. Perkembangan dari utilitas jalan ini berpengaruh terhadap jumlah tanah di kota Banjarmasin. Karena pertambahan jalan yang semakin meningkat maka kebutuhan akan bahan material jalan meningkat

Sesuai dengan julukan bahwa Kota Banjarmasin yang merupakan

kota seribu sungai, membuat akses ke beberapa wilayah dapat dilakukan melalui angkutan sungai. Data Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin Dalam Angka pada tahun 2016, menunjukkan jumlah angkutan sungai di Kota Banjarmasin ada sebanyak 110 angkutan. Jenis angkutan yang paling banyak digunakan adalah jenis motor getek/klotok yaitu sebanyak 34 buah. Jika dilihat perbandingan dengan tahun sebelumnya, jumlah angkutan sungai yang terdaftar mengalami penurunan yaitu dari 194 angkutan menjadi 110 angkutan di tahun 2016. Hal ini di karenakan perubahan kebiasaan masyarakat yang sebelumnya menjadikan sungai sebagai jalur transportasi dan mengalami pengalihan sarana transportasi air menjadi transportasi darat, sehingga mengharuskan penambahan jalan sebagai sarana transportasi darat.

BAB III

PERSEPSI MASYARAKAT

Persepsi masyarakat kelurahan Sungai Bilu Kota Banjarmasin terhadap program kampung iklim (ProKlim) berturut-turut akan diuraikan tentang: (1) persepsi terhadap kegiatan penyuluhan, (2) persepsi terhadap kegiatan adaptasi perubahan iklim, (3) persepsi terhadap kegiatan mitigasi perubahan iklim, (4) Tindakan adaptasi perubahan iklim masyarakat, (5) Tindakan mitigasi perubahan iklim masyarakat, (5) persepsi tentang harapan masyarakat terhadap ProKlim.

3.1. Persepsi terhadap Kegiatan Penyuluhan

Deskripsi indikator dalam penelitian terdiri dari persepsi masyarakat terhadap ProKlim, instansi penyuluh, kegiatan rutin atau temporal penyuluhan, kejelasan pesan, tingkat pemahaman informasi, *attitude* penyuluh, kepuasan, toleransi, ketidaksungguhan, ketidakpuasan dan jenis penyuluhan yang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 12. Persepsi terhadap Pelaksanaan Penyuluhan Proklamasi

No.	Pelaksanaan Penyuluhan Proklamasi	Jumlah	%
1	Ya	146	49
2	Tidak	154	51
	Total	300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 12 menjelaskan bahwa menurut responden tidak adanya persepsi terhadap kegiatan penyuluhan proklamasi mencapai 51% dan 49% adanya persepsi terhadap kegiatan penyuluhan Proklamasi. Keterangan responden menyatakan banyak tidak adanya persepsi terhadap kegiatan penyuluhan proklamasi yang disebabkan program kampung iklim yang terjadi tidak secara merata, hanya warga yang tinggal di pinggir sungai yang merasakan dampak dari kegiatan kampung iklim. Berikut disajikan tabel SKPD/Instansi penyuluhan.

Tabel 13 SKPD/Instansi penyuluhan

No.	SKPD/Instansi penyuluhan
1	Dinas Kebersihan
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Lingkungan
4	Polisi Air Udara Kecamatan Banjarmasin Timur
5	Dirjen Cipta Karya

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 13 menjelaskan bahwa menurut responden yang diperoleh melalui wawancara terbuka menjelaskan bahwa ada beberapa instansi yang pernah memberikan penyuluhan kepada warga Kelurahan Sungai Bilu Banjarmasin, yakni: (1) Dinas kebersihan, (2) Dinas Kesehatan, (3) Dinas Lingkungan, (4) Polisi Air Udara Polsek Banjarmasin Timur, dan (5) Dirjen Cipta Karya.

Adapun beberapa hal yang disampaikan adalah terkait beberapa hal, antara lain: (1) penyuluhan tentang pentingnya kebersihan yang dilakukan melalui gotong royong bersama warga, seperti membersihkan sungai yang mengalami pendangkalan dan pembersihan “sampah kiriman”; (2) Penyuluhan tentang gerakan 3M (menutup, menguras, menimbun) untuk mencegah terjadinya DBD, malaria dan diare; (3) penyuluhan tentang larang mengambil ikan di sungai Martapura dengan cara menyetrum; (4) larangan mengkonsumsi NARKOBA dan minum-minuman keras; (5) Larangan membuang sampah di sungai; (6) Program “KOTAKU” (Kota Tanpa Kumuh) dimana kegiatan tersebut meliputi pembangunan sarana dan prasarana untuk menciptakan kawasan yang bebas kumuh. Berikut disajikan tabel persepsi terhadap kegiatan rutin/temporal penyuluhan proklim.

Tabel 14 Persepsi terhadap Kegiatan Rutin/Temporal Penyuluhan Proklim

No.	Kegiatan Rutin/Temporal Penyuluhan Proklim	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	3	2
2	Kurang Setuju	15	10
3	Cukup Setuju	38	26
4	Setuju	77	53
5	Sangat Setuju	13	9
Total		146	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 14 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap kegiatan rutin/temporal penyuluhan proklim mencapai 53%, 26% responden cukup setuju, 10% responden kurang setuju, 9% responden sangat setuju dan 2% responden sangat tidak setuju terhadap kegiatan rutin/temporal penyuluhan

proklim. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap kegiatan rutin/temporal penyuluhan proklim yang disebabkan program kampung iklim yang terjadi dapat tercapai sesuai dengan program, warga yang tinggal dapat merasakan dampak dari kegiatan kampung iklim. Berikut disajikan tabel persepsi terhadap kejelasan pesan.

Tabel 15 Persepsi terhadap Kejelasan Pesan

No.	Kejelasan Pesan	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	0	0
2	Kurang Setuju	3	2
3	Cukup Setuju	94	64
4	Setuju	47	32
5	Sangat Setuju	2	1
Total		146	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 15 menjelaskan bahwa responden cukup setuju terhadap kejelasan pesan yang disampaikan dalam penyuluhan mencapai 64%, 32% responden setuju, 2% responden kurang setuju, 1% responden sangat setuju dan 0% responden sangat tidak setuju terhadap kejelasan pesan yang disampaikan dalam penyuluhan. Keterangan responden menyatakan banyak yang cukup setuju terhadap kejelasan pesan yang disampaikan dalam penyuluhan, karena program kampung iklim yang terjadi dapat tercapai apabila pesan yang disampaikan dalam penyuluhan mudah dipahami dan jelas, sehingga warga yang tinggal di kampung iklim dapat menerapkan pesan yang disampaikan dari kegiatan penyuluhan. Berikut disajikan tabel persepsi terhadap tingkat pemahaman informasi.

Tabel 16 Persepsi terhadap Tingkat Pemahaman Informasi

No.	Tingkat Pemahaman Informasi	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	0	0
2	Kurang Setuju	0	0
3	Cukup Setuju	108	74
4	Setuju	31	21
5	Sangat Setuju	7	5
Total		146	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 16 menjelaskan bahwa responden cukup setuju terhadap tingkat pemahaman informasi yang disampaikan dalam penyuluhan mencapai 74%, 21% responden setuju, 5% responden sangat setuju, 0% responden kurang setuju dan 0% responden sangat tidak setuju terhadap tingkat pemahaman informasi yang disampaikan dalam penyuluhan. Keterangan responden menyatakan banyak yang cukup setuju terhadap tingkat pemahaman informasi yang disampaikan dalam penyuluhan, karena warga kampung iklim dapat memahami informasi yang disampaikan dalam penyuluhan, sehingga warga yang tinggal di kampung iklim dapat menerapkan informasi yang disampaikan dari kegiatan penyuluhan. Berikut disajikan tabel persepsi terhadap attitude penyuluh.

Tabel 17. Persepsi terhadap Attitude Penyuluh

No.	Attitude Penyuluh	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	0	0
2	Kurang Setuju	1	1
3	Cukup Setuju	48	33
4	Setuju	82	56
5	Sangat Setuju	15	10
Total		146	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 17 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap attitude penyuluh mencapai 56%, 33% responden cukup setuju, 10% responden sangat setuju, 1% responden kurang setuju dan 0% responden sangat tidak setuju terhadap attitude penyuluh. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap attitude penyuluh, karena dengan sikap penyuluh yang baik, maka warga kampung iklim dapat menerima informasi yang disampaikan, sehingga tercipta kegiatan penyuluhan yang sesuai dengan prusedur. Berikut disajikan tabel persepsi terhadap kepuasan.

Tabel 18. Persepsi terhadap Kepuasan

No.	Kepuasan terhadap Penyuluhan	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	12	8
2	Kurang Setuju	77	53
3	Cukup Setuju	41	28
4	Setuju	16	11
5	Sangat Setuju	0	0
Total		146	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 18 menjelaskan bahwa responden kurang setuju terhadap kepuasan kegiatan penyuluhan mencapai 53%, 28% responden cukup setuju, 11% responden setuju, 8% responden sangat tidak setuju dan 0% responden sangat setuju terhadap kepuasan kegiatan penyuluhan. Keterangan responden menyatakan banyak yang kurang setuju terhadap kepuasan kegiatan penyuluhan, yang disebabkan program kampung iklim yang terjadi secara tidak merata, hanya warga yang tinggal di pinggir sungai yang

merasakan dampak dari kegiatan kampung iklim. Berikut disajikan tabel persepsi terhadap toleransi penyuluh.

Tabel 19. Persepsi terhadap Toleransi Penyuluh

No.	Toleransi Penyuluh	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	0	0
2	Kurang Setuju	3	2
3	Cukup Setuju	66	45
4	Setuju	65	45
5	Sangat Setuju	12	8
Total		146	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 19 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap toleransi penyuluh mencapai 45%, 45% responden cukup setuju, 8% responden sangat setuju, 2% responden kurang setuju dan 0% responden sangat tidak setuju terhadap toleransi penyuluh. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap toleransi penyuluh, yang disebabkan dalam kegiatan penyuluhan harus menumbuhkan sikap saling menghargai pendapat penyuluh maupun warga yang tinggal di kampung iklim, sehingga program kampung iklim dapat tercapai. Berikut disajikan tabel persepsi terhadap ketidaksungguhan penyuluh.

Tabel 20. Persepsi terhadap Ketidaksungguhan Penyuluh

No.	Ketidaksungguhan Penyuluh	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	17	12
2	Kurang Setuju	98	67
3	Cukup Setuju	10	7
4	Setuju	10	7
5	Sangat Setuju	11	8
Total		146	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 20 menjelaskan bahwa responden kurang setuju terhadap ketidaksungguhan penyuluh mencapai 67%, 12% responden sangat tidak setuju, 8% responden sangat setuju, 7% responden setuju dan 7% responden cukup setuju terhadap ketidaksungguhan penyuluh. Keterangan responden menyatakan banyak yang kurang setuju terhadap ketidaksungguhan penyuluh, artinya penyuluh dalam kegiatan penyuluhan sungguh-sungguh dalam memberikan informasi mengenai program kampung iklim. Berikut tersaji tabel persepsi terhadap kekurangpuasan masyarakat terhadap penyuluh.

Tabel 21 Persepsi terhadap Kekurangpuasan Masyarakat terhadap Penyuluh

No.	Kekurangpuasan Masyarakat terhadap Penyuluh	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	14	10
2	Kurang Setuju	72	49
3	Cukup Setuju	42	29
4	Setuju	7	5
5	Sangat Setuju	11	8
Total		146	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 21 menjelaskan bahwa responden kurang setuju terhadap ketidakpuasan masyarakat pada penyuluh mencapai 49%, 29% responden cukup setuju, 10% responden sangat tidak setuju, 8% responden sangat setuju dan 5% responden setuju terhadap ketidakpuasan masyarakat pada penyuluh. Keterangan responden menyatakan banyak yang kurang setuju terhadap ketidakpuasan masyarakat pada penyuluh, artinya penyuluh dalam

kegiatan penyuluhan sungguh-sungguh dalam memberikan informasi mengenai program kampung iklim.

3.1.1. Jenis Penyuluhan

Hasil wawancara yang diperoleh dari survey terkait dengan instansi penyuluh (SKPD) dari Pemerintah Kota Banjarmasin, dijelaskan bahwa hanya ada tiga instansi yang pernah memberikan penyuluhan, yakni: (a) Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, (b) Kelurahan, dan (c) BNN (Badan Narkotika Nasional).

Persepsi masyarakat terhadap kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh berbagai instansi di kelurahan Sungai Bilu Banjarmasin sebagaimana tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 24 Persepsi terhadap Kegiatan Penyuluhan

No	Kelas	Skor	Jumlah	%
1	Baik	33-45	97	32
2	Sedang	21-<33	77	26
3	Buruk	9-<21	126	42
Jumlah			300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 24 menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kegiatan penyuluhan masih rendah (32%). Kondisi ini menggambarkan perlunya peningkatan kinerja penyuluh baik terkait dengan kuantitas (jumlah) penyuluhan yang dilakukan, kejelasan informasi yang disampaikan penyuluh, dan kesungguhan penyuluh dalam menyampaikan informasi,

Hasil survey ini didukung oleh hasil wawancara terstruktur yang diperoleh dari hasil survey terkait dengan instansi penyuluh (SKPD) dari Pemerintah Kota Banjarmasin, dijelaskan bahwa hanya ada tiga instansi yang pernah memberikan penyuluhan, yakni: (a) Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, (b) Kelurahan, dan (c) BNN (Badan Narkotika Nasional) Daerah Kalimantan Selatan.

Hasil *indepth interview* dengan Miftah Ramadhan (27 tahun) memperkuat pernyataan di atas bahwa sejak tahun 2016, belum pernah ada penyuluhan tentang Proklim di Kelurahan Sungai Bilu, khususnya di RT 3. Yakni penyuluhan dalam arti sosialisasi suatu program yang disampaikan oleh instansi tertentu. Bentuk penyuluhan yang pernah ada pada tahun 2017 di RT 3 dan sekitarnya berupa pemeriksaan terhadap bahaya demam berdarah melalui program “Jumantik” (Juru Pantau Jentik). Hal ini dilakukan karena terdapat kasus DBD. Hal senada disampaikan oleh Hamdalah (41 tahun) dan Hairuni Hidayatullah (39 tahun) bahwa penyuluhan dilaksanakan di RT. 04 oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin hampir setiap tahun apabila ada keluhan dari masyarakat yang terindikasi penyakit DBD, malaria dan lain sebagainya. Kegiatan penyuluhan antara lain menjelaskan tentang pemberian obat/bubuk untuk membasmi jentik-jentik yang ada di dalam bak penampungan air warga.

Penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dirjen Cipta Karya Kalimantan Selatan melalui program “KOTAKU” (Kota Tanpa Kumuh) dimana kegiatan

tersebut meliputi pembangunan sarana dan prasarana untuk menciptakan kawasan yang bebas kumuh sesuai dengan tujuan dari program tersebut (wawancara, Hamdalah 41 tahun; Hairuni Hidayatullah 39 tahun)

Miftah Ramadhan (27 tahun) menambahkan, selain penyuluhan kesehatan, juga terdapat program dari Dinas Kebersihan tentang “Kampung Hijau”, yakni gotong royong yang dilaksanakan secara periodik untuk membersihkan lingkungan. Kegiatan ini lebih mengarah kepada kegiatan bergotong royong untuk meningkatkan kebersihan kampung, bukan penyuluhan.

Hasil wawancara dengan Taufik (42 tahun) dan Rustam (51 tahun) tentang pelaksanaan penyuluhan di Kampung Iklim Sungai Bilu, khususnya warga RT 5 menjelaskan bahwa hanya ada dua bentuk penyuluhan yang pernah dilaksanakan dilakukan oleh instansi di Sungai Bilu sejak tahun 2016, yakni: (1) Instansi Polairud Polsek Banjarmasin Timur, yang dilaksanakan tahun 2016. Penyuluhan dihadiri oleh ASN, diantaranya camat, lurah, dan seluruh RT di Kelurahan Sungai Bilu. Adapun materi penyuluhan antara lain sbb: (1) Terorisme, (2) larangan mencari ikan dengan cara menyetrum, (3) larangan mengkonsumsi obat (NARKOBA), (4) larangan minum-minuman keras, (5) larangan membuang sampah ke sungai. Peserta penyuluhan dihadiri sekitar 100 orang.

Selain penyuluhan Polairud Polsek Banjarmasin Timur ada juga penyuluhan dari Jakarta yang ditujukan bagi kelompok *home industry* RT 5

tentang pembuatan makanan yang memiliki potensi untuk pengembangan industri rumah tangga, yakni makanan olahan. Kelompok *home industry* di RT 5 anggotanya sebanyak delapan orang. Penyuluhan dilakukan di hotel Rattan Inn. Materi penyuluhan yakni tentang cara pengolahan naget. Karena adanya berbagai kendala, hasil penyuluhan tidak dapat diimplementasikan, dan masyarakat Sungai Bilu lebih memilih untuk *home industry* yang lain, yakni krupuk udang dan haruan.

Kendala pembuatan krupuk adalah ketersediaan bahan dasar berupa

udang yang didatangkan dari Aluh-Aluh yang didatangkan oleh pedagang udang Aluh Aluh dengan cara mendatangi warga Sungai Bilu “Kampung Hijau” dengan kelotok. Jika udang tidak ada maka produksi krupuk berhenti karena jika membeli di pasar tradisional Banjarmasin harga lebih mahal, sehingga produsen krupuk Sungai Bilu memilih tidak memproduksi karena hampir tidak ada untungnya.

Data laporan kinerja BPPSDM tahun 2014 menunjukkan bahwa sasaran kinerja ketenagaan penyuluhan yang belum mencapai hasil 100 % memberikan dampak pada sasaran kemandirian kelembagaan petani dan kapasitas kelembagaan bidang SDM penyuluh yang belum maksimal, oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kinerja penyuluh pertanian di semua daerah (Banunaek, dkk., 2017).

Penelitian Banunaek, dkk. (2017) menjelaskan bahwa rendahnya kapasitas kelembagaan bidang SDM penyuluh berdampak terhadap terhadap

kinerja pada suatu instansi. Berdasarkan data yang diperoleh dari survey dan wawancara masyarakat kelurahan Sungai Bilu bahwa kuantitas (jumlah) dan kualitas (mutu) penyuluh belum begitu baik sehingga perlu ditingkatkan agar program kampung iklim (ProKim) dapat terus ditingkatkan mutunya.

Hasil penelitian Isa, dkk (2013) yang berjudul: “Strategi Penguatan Kapasitas Stakeholder Dalam Adaptasi dan Mitigasi Banjir di Kota Surakarta”, terkait dengan penyuluhan maka dijelaskan bahwa stakeholder belum optimal dalam melakukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bahaya banjir. Strategi penguatan kapasitas dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan sosialisasi terhadap adaptasi dan mitigasi banjir.

Penyuluhan tidak saja bertujuan untuk menyampaikan sejumlah informasi tentang tema tertentu, seperti kebersihan lingkungan, pola hidup sehat, NARKOBA, dan sebagainya, akan tetapi yang diharapkan sebenarnya adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat langsung dalam melakukan itu semua. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Mustangin (2017) bahwa salah satu upaya dalam mengatasi perubahan iklim adalah dengan pengelolaan lingkungan agar dapat mengurangi dampak dari perubahan iklim tersebut. Pengelolaan lingkungan tersebut harus melibatkan semua pihak. Atas dasar kerjasama tersebut tujuan mengurangi dampak perubahan iklim akan tercapai. Aspek yang penting dalam pengelolaan lingkungan adalah dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam seluruh aspek kegiatan pengelolaan lingkungan tersebut. Masyarakat menjadi aktor utama yang terlibat secara

langsung dalam pengelolaan lingkungan tersebut. Pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat dilakukan untuk mengelola lingkungan bersama masyarakat dengan meletakkan pemahaman terhadap lingkungan sebagai hal yang utama.

3.2. Persepsi terhadap Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim

Deskripsi indikator dalam penelitian terdiri dari persepsi masyarakat terhadap pembuatan tempat penampungan air hujan, pembuatan sumur resapan, rendahnya regulasi perlindungan dan pengelulaan mata air, rendahnya penyuluhan pentingnya hemat air, pembatasan penggunaan air, perilaku membuang sampah, pembangunan saluran drainase, tingkat kepentingan informasi ketinggian muka air untuk peringatan dini bencana banjir, tingkat kepentingan rute evakuasi, desain rumah panggung, tingkat kepentingan penanaman vegetasi, sistem tumpang sari untukantisipasi gagal panen, tingkat kepentingan sistem irigasi untuk panen, sistem pertanian terpadu untukantisipasi gagal panen, variasi tanaman untukantisipasi gagal tanam/panen, penggunaan pestisida kimia, pemanfaatan lahan pekarangan, pelaksanaan 3M (menguras, menimbun, menutup), tingkat kewaspadaan terhadap penyakit, ketersediaan akses air bersih dan jamban, perilaku hidup bersih dan sehat, kendala adaptasi perubahan iklim, bentuk kendala adaptasi dan jenis adaptasi yang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 22. Persepsi terhadap Pembuatan Tempat Penampungan Air Hujan

No	Pembuatan Tempat Penampungan Air Hujan	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	1	0
2	Kurang Setuju	3	1
3	Cukup Setuju	99	33
4	Setuju	138	46
5	Sangat Setuju	59	20
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 22 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap pembuatan tempat penampungan air hujan mencapai 46%, 33% responden cukup setuju, 20% responden sangat setuju, 1% responden kurang setuju dan 0%

responden sangat tidak setuju terhadap pembuatan tempat penampungan air hujan. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap pembuatan tempat penampungan air hujan, artinya warga yang tinggal di kampung iklim dapat memanfaatkan air hujan untuk keperluan sehari-hari. Berikut persepsi terhadap pembuatan sumur resapan.

Tabel 23. Persepsi terhadap Pembuatan Sumur Resapan

No	Pembuatan Sumur Resapan	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	0	0
2	Kurang Setuju	24	8
3	Cukup Setuju	57	19
4	Setuju	177	59
5	Sangat Setuju	42	14
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 23 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap pembuatan sumur resapan mencapai 59%, 19% responden cukup setuju, 14% responden sangat setuju, 8% responden kurang setuju dan 0% responden sangat tidak

setuju terhadap pembuatan sumur resapan. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap pembuatan sumur resapan, artinya warga yang tinggal di kampung iklim dapat memanfaatkan sumur resapan untuk keperluan sehari-hari, sehingga sumber air tidak hanya dari PDAM. Berikut persepsi terhadap rendahnya regulasi perlindungan dan pengelolaan mata air.

Tabel 24. Persepsi terhadap Rendahnya Regulasi Perlindungan dan Pengelolaan Mata Air

No	Rendahnya Regulasi Perlindungan dan Pengelolaan Mata Air	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	71	24
2	Kurang Setuju	157	52
3	Cukup Setuju	34	11
4	Setuju	25	8
5	Sangat Setuju	13	4
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 24 menjelaskan bahwa responden kurang setuju terhadap rendahnya regulasi perlindungan dan pengelolaan mata air mencapai 52%, 24% responden sangat tidak setuju, 11% responden cukup setuju, 8% responden setuju dan 4% responden sangat setuju terhadap rendahnya regulasi perlindungan dan pengelolaan mata air. Keterangan responden menyatakan banyak yang kurang setuju terhadap rendahnya regulasi perlindungan dan pengelolaan mata air, artinya warga yang tinggal di kampung iklim menginginkan peningkatan dalam regulasi perlindungan dan pengelolaan mata air yang berdampak pada keperluan sehari-hari. Berikut

persepsi terhadap rendahnya penyuluhan pentingnya hemat air. Berikut persepsi terhadap rendahnya penyuluhan pentingnya hemat air.

Tabel 25. Persepsi terhadap Rendahnya Penyuluhan Pentingnya Hemat Air

No	Rendahnya Penyuluhan Pentingnya Hemat Air	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	50	17
2	Kurang Setuju	219	73
3	Cukup Setuju	7	2
4	Setuju	19	6
5	Sangat Setuju	5	2
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 25 menjelaskan bahwa responden kurang setuju terhadap rendahnya penyuluhan pentingnya hemat air mencapai 73%, 17% responden sangat tidak setuju, 6% responden setuju, 2% responden cukup setuju dan 2% responden setuju terhadap rendahnya penyuluhan pentingnya hemat air. Keterangan responden menyatakan banyak yang kurang setuju terhadap rendahnya penyuluhan pentingnya hemat air, artinya warga yang tinggal di kampung iklim menginginkan peningkatan dalam penyampaian informasi bahwa pentingnya hemat air yang berdampak pada lingkungan. Berikut persepsi terhadap pembatasan penggunaan air.

Tabel 26. Persepsi terhadap Pembatasan Penggunaan Air

No	Pembatasan Penggunaan Air	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	20	7
2	Kurang Setuju	13	4
3	Cukup Setuju	78	26
4	Setuju	160	53
5	Sangat Setuju	29	10
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 26 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap pembatasan penggunaan air mencapai 53%, 26% responden cukup setuju, 10% responden sangat setuju, 7% responden sangat tidak setuju dan 4% responden kurang setuju terhadap pembatasan penggunaan air. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap pembatasan penggunaan air, artinya pembatasan penggunaan air di kampung iklim dapat diterima warga yang tinggal di kampung iklim yang berdampak pada penghematan air. Berikut persepsi terhadap perilaku membuang sampah.

Tabel 27. Persepsi terhadap Perilaku Membuang Sampah

No	Perilaku Membuang Sampah	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	19	6
2	Kurang Setuju	1	0
3	Cukup Setuju	40	13
4	Setuju	126	42
5	Sangat Setuju	114	38
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 27 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap perilaku membuang sampah mencapai 42%, 38% responden sangat setuju, 13% responden cukup setuju, 6% responden sangat tidak setuju dan 0% responden kurang setuju terhadap perilaku membuang sampah. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap perilaku membuang sampah, artinya warga yang tinggal di kampung iklim menginginkan warga membuang sampah pada tempatnya yang berdampak pada lingkungan yang sehat. Berikut persepsi terhadap pembangunan saluran drainase.

Tabel 28. Persepsi terhadap Pembangunan Saluran Drainase

No	Pembangunan Saluran drainase	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	9	3
2	Kurang Setuju	16	5
3	Cukup Setuju	44	15
4	Setuju	118	39
5	Sangat Setuju	113	38
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 28 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap pembangunan saluran drainase mencapai 39%, 38% responden sangat setuju, 15% responden cukup setuju, 5% responden kurang setuju dan 3% responden sangat tidak setuju terhadap pembangunan saluran drainase. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap pembangunan saluran drainase, artinya warga yang tinggal di kampung iklim menginginkan adanya pembangunan saluran drainase yang berfungsi untuk menampung debit banjir yang terjadi. Berikut persepsi terhadap tingkat kepentingan informasi ketinggian muka air untuk peringatan dini bencana banjir.

Tabel 29 Persepsi terhadap Tingkat Kepentingan Informasi Ketinggian Muka Air untuk Peringatan Dini Bencana Banjir

No	Informasi Ketinggian Muka Air untuk Peringatan Dini Bencana Banjir	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	58	19
2	Kurang Setuju	65	22
3	Cukup Setuju	44	15
4	Setuju	86	29
5	Sangat Setuju	47	16
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 29 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap tingkat kepentingan informasi ketinggian muka air untuk peringatan dini bencana banjir mencapai 29%, 22% responden kurang setuju, 19% responden sangat tidak setuju, 16% responden sangat setuju dan 15% responden cukup setuju terhadap tingkat kepentingan informasi ketinggian muka air untuk peringatan dini bencana banjir. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap tingkat kepentingan informasi ketinggian muka air untuk peringatan dini bencana banjir, artinya warga yang tinggal di kampung iklim menginginkan adanya informasi ketinggian muka air untuk peringatan dini bencana banjir yang berfungsi untuk kesiapsiagaan warga akan peringatan dini bencana banjir. Berikut disajikan tabel persepsi terhadap tingkat kepentingan rute evakuasi.

Tabel 30 Persepsi terhadap Tingkat Kepentingan Rute Evakuasi

No	Kepentingan Rute Evakuasi	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	64	21
2	Kurang Setuju	196	65
3	Cukup Setuju	13	4
4	Setuju	19	6
5	Sangat Setuju	8	3
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 30 menjelaskan bahwa responden kurang setuju terhadap tingkat kepentingan rute evakuasi mencapai 65%, 21% responden sangat tidak setuju, 6% responden setuju, 4% responden cukup setuju dan 3% responden sangat setuju terhadap tingkat kepentingan rute evakuasi.

Keterangan responden menyatakan banyak yang kurang setuju terhadap tingkat kepentingan rute evakuasi, artinya lokasi kampung iklim terkait mengenai bencana masih tidak terlalu berisiko, sehingga warga yang tinggal di kampung iklim masih dapat menangani bencana, bencana yang sering terjadi, seperti bencana banjir. Berikut disajikan persepsi terhadap desain rumah panggung.

Tabel 31 Persepsi terhadap Desain Rumah Panggung

No	Desain Rumah Panggung	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	3	1
2	Kurang Setuju	28	9
3	Cukup Setuju	68	23
4	Setuju	167	56
5	Sangat Setuju	34	11
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 31 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap desain rumah panggung mencapai 56%, 23% responden cukup setuju, 11% responden sangat setuju, 9% responden kurang setuju dan 1% responden sangat tidak setuju terhadap desain rumah panggung. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap desain rumah panggung, artinya sesuai dengan lokasi kampung iklim yang berada dipinggiran sungai terkait mengenai bencana yang sering terjadi yaitu banjir, sehingga warga yang tinggal di kampung iklim beradaptasi dengan membangun rumah dengan desain rumah panggung yang dapat menangani bencana banjir. Berikut

disajikan pada tabel persepsi terhadap tingkat kepentingan penanaman vegetasi.

Tabel 32 Persepsi terhadap Tingkat Kepentingan Penanaman Vegetasi

No	Tingkat Kepentingan Penanaman Vegetasi	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	82	27
2	Kurang Setuju	169	56
3	Cukup Setuju	6	2
4	Setuju	37	12
5	Sangat Setuju	6	2
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 32 menjelaskan bahwa responden kurang setuju terhadap tingkat kepentingan penanaman vegetasi mencapai 56%, 27% responden sangat tidak setuju, 12% responden setuju, 2% responden cukup setuju dan 2% responden sangat setuju terhadap tingkat kepentingan penanaman vegetasi. Keterangan responden menyatakan banyak yang kurang setuju terhadap tingkat kepentingan penanaman vegetasi, artinya lokasi kampung iklim yang berada dipinggiran sungai tidak mempunyai banyak lahan untuk penanaman vegetasi, sehingga warga yang tinggal di kampung iklim beradaptasi dengan cara menanam berbagai macam jenis tumbuhan atau tanaman di pot berbahan plastik.

Tabel 33 Persepsi terhadap Sistem Tumpang Sari untuk Antisipasi Gagal Panen

No	Sistem Tumpang Sari untuk Antisipasi Gagal Panen	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	6	2
2	Kurang Setuju	41	14
3	Cukup Setuju	80	27

No	Sistem Tumpang Sari untuk Antisipasi Gagal Panen	Jumlah	%
4	Setuju	157	52
5	Sangat Setuju	16	5
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 33 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap sistem tumpang sari untuk antisipasi gagal panen mencapai 52%, 27% responden cukup setuju, 14% responden kurang setuju, 5% responden sangat setuju dan 2% responden sangat tidak setuju terhadap sistem tumpang sari untuk

antisipasi gagal panen. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap sistem tumpang sari untuk antisipasi gagal panen, artinya sistem tumpang sari untuk antisipasi gagal panen adalah suatu bentuk kearifan lokal, sehingga warga yang tinggal di kampung iklim beradaptasi dalam bentuk pertanaman campuran berupa melibatkan dua jenis atau lebih tanaman dalam waktu yang bersamaan atau agak bersamaan.

Tabel 34 Persepsi terhadap Tingkat Kepentingan Sistem Irigasi untuk Panen

No	Tingkat Kepentingan Sistem Irigasi untuk Panen	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	51	17
2	Kurang Setuju	215	72
3	Cukup Setuju	15	5
4	Setuju	16	5
5	Sangat Setuju	3	1
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 34 menjelaskan bahwa responden kurang setuju terhadap tingkat kepentingan sistem irigasi untuk panen mencapai 72%, 17%

responden sangat tidak setuju, 5% responden cukup setuju, 5% responden setuju dan 1% responden sangat setuju terhadap tingkat kepentingan sistem irigasi untuk panen. Keterangan responden menyatakan banyak yang kurang setuju terhadap tingkat kepentingan sistem irigasi untuk panen, artinya sesuai dengan lokasi yang berada di pinggir sungai, sistem irigasi kurang berpengaruh, sehingga warga yang tinggal di kampung iklim beradaptasi dalam bentuk penggunaan air pada sungai untuk keperluan cadangan air di lahan pertanian. Berikut disajikan persepsi terhadap sistem pertanian terpadu untuk antisipasi gagal panen.

Tabel 35 Persepsi terhadap Sistem Pertanian Terpadu untuk Antisipasi Gagal Panen

No	Sistem Pertanian Terpadu untuk Antisipasi Gagal Panen	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	5	2
2	Kurang Setuju	18	6
3	Cukup Setuju	93	31
4	Setuju	151	50
5	Sangat Setuju	33	11
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 35 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap sistem pertanian terpadu untuk antisipasi gagal panen mencapai 50%, 31% responden cukup setuju, 11% responden sangat setuju, 6% responden kurang setuju dan 2% responden sangat tidak setuju terhadap sistem pertanian terpadu untuk antisipasi gagal panen. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap sistem pertanian terpadu untuk antisipasi gagal

panen, artinya warga yang tinggal di kampung iklim beradaptasi dalam bentuk menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan dalam satu lahan, sebagai solusi alternatif bagi peningkatan produktivitas lahan, program pembangunan dan konservasi lingkungan. Berikut disajikan persepsi terhadap variasi tanaman untukantisipasi gagal tanam/panen.

Tabel 36 Persepsi terhadap Variasi Tanaman untuk Antisipasi Gagal Tanam/Panen

No	Variasi Tanaman untuk Antisipasi Gagal Tanam/Panen	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	3	1
2	Kurang Setuju	6	2
3	Cukup Setuju	88	29
4	Setuju	163	54
5	Sangat Setuju	40	13
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 36 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap variasi tanaman untukantisipasi gagal tanam/panen mencapai 54%, 29% responden cukup setuju, 13% responden sangat setuju, 2% responden kurang setuju dan 1% responden sangat tidak setuju terhadap variasi tanaman untukantisipasi gagal tanam/panen. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap variasi tanaman untukantisipasi gagal tanam/panen, artinya warga yang tinggal di kampung iklim beradaptasi dalam bentuk memilih komoditas dan varietas tanaman yang cocok ditanam. Berikut disajikan persepsi terhadap penggunaan pestisida kimia.

Tabel 37 Persepsi terhadap Penggunaan Pestisida Kimia

No	Penggunaan Pestisida Kimia	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	51	17
2	Kurang Setuju	111	37
3	Cukup Setuju	70	23
4	Setuju	58	19
5	Sangat Setuju	10	3
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 37 menjelaskan bahwa responden kurang setuju terhadap penggunaan pestisida kimia mencapai 37%, 23% responden cukup setuju, 19% responden setuju, 17% responden sangat tidak setuju dan 3% responden sangat setuju terhadap penggunaan pestisida kimia. Keterangan responden menyatakan banyak yang kurang setuju terhadap penggunaan pestisida kimia, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya tidak menggunakan pestisida kimia untuk tanaman. Berikut disajikan persepsi terhadap pemanfaatan lahan pekarangan.

Tabel 38 Persepsi terhadap Pemanfaatan Lahan Pekarangan

No	Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	13	4
2	Kurang Setuju	57	19
3	Cukup Setuju	43	14
4	Setuju	136	45
5	Sangat Setuju	51	17
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 38 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap pemanfaatan lahan pekarangan mencapai 45%, 19% responden kurang setuju, 17% responden sangat setuju, 14% responden cukup setuju dan 4% responden

sangat tidak setuju terhadap pemanfaatan lahan pekarangan. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap pemanfaatan lahan pekarangan, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya memanfaatkan lahan pekarangan untuk penghijauan kampung. Berikut disajikan persepsi terhadap pelaksanaan 3M (menguras, menimbun, menutup).

Tabel 39 Persepsi terhadap Pelaksanaan 3M (menguras, menimbun, menutup)

No.	Pelaksanaan 3M (menguras, menimbun, menutup)	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	3	1.0
2	Kurang Setuju	1	0.3
3	Cukup Setuju	54	18.0
4	Setuju	136	45.3
5	Sangat Setuju	106	35.3
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 39 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap pelaksanaan

3M (menguras, menimbun, menutup) mencapai 45.3%, 35.3% responden sangat setuju, 18% responden cukup setuju, 1% responden sangat tidak setuju dan 0.3% responden kurang setuju terhadap pelaksanaan 3M (menguras, menimbun, menutup). Banyak responden yang setuju terhadap pelaksanaan 3M (menguras, menimbun, menutup) dapat dimaknai bahwa warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya melakukan 3M (menguras, menimbun, menutup), sehingga masyarakat sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Berikut disajikan persepsi terhadap

tingkat kewaspadaan terhadap penyakit.

Tabel 40 Persepsi terhadap Tingkat Kewaspadaan terhadap Penyakit

No.	Tingkat Kewaspadaan terhadap Penyakit	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	64	21
2	Kurang Setuju	113	38
3	Cukup Setuju	17	6
4	Setuju	81	27
5	Sangat Setuju	25	8
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 40 menjelaskan bahwa responden kurang setuju terhadap tingkat kewaspadaan penyakit mencapai 38%, 27% responden setuju, 21% responden sangat tidak setuju, 8% responden cukup setuju dan 6% responden sangat setuju terhadap tingkat kewaspadaan terhadap penyakit. Keterangan responden menyatakan banyak yang kurang setuju terhadap tingkat kewaspadaan penyakit, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya tidak mengalami penyakit DBD, malaria dan diare, meskipun ada mengalami penyakit tersebut warga langsung menanganinya dengan minum obat. Berikut disajikan tabel persepsi terhadap ketersediaan akses air bersih dan jamban.

Tabel 41 Persepsi terhadap Ketersediaan Akses Air Bersih dan Jamban

No	Ketersediaan Akses Air Bersih dan Jamban	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	4	1
2	Kurang Setuju	38	13
3	Cukup Setuju	23	8
4	Setuju	133	44
5	Sangat Setuju	102	34

No	Ketersediaan Akses Air Bersih dan Jamban	Jumlah	%
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 41 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap ketersediaan akses air bersih dan jamban mencapai 44%, 34% responden sangat setuju, 13% responden kurang setuju, 8% responden cukup setuju dan 1% responden sangat tidak setuju terhadap ketersediaan akses air bersih dan jamban. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap ketersediaan akses air bersih dan jamban, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya akses air bersih mengalami kesulitan dan ketersediaan jamban yang masih kurang. Berikut disajikan tabel persepsi terhadap perilaku hidup bersih dan sehat.

Tabel 42 Persepsi terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

No	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	101	34
2	Kurang Setuju	82	27
3	Cukup Setuju	26	9
4	Setuju	55	18
5	Sangat Setuju	36	12
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 42 menjelaskan bahwa responden sangat tidak setuju terhadap perilaku hidup bersih dan sehat mencapai 34%, 27% responden kurang setuju, 18% responden setuju, 12% responden sangat setuju dan 9% responden cukup setuju terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Keterangan responden menyatakan banyak yang sangat tidak setuju terhadap perilaku

hidup bersih dan sehat, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya berperilaku kurang bersih dan sehat, karena masih banyak terdapat sampah di sekitar rumah warga di kampung iklim yang masih belum ditangani. Berikut disajikan tabel persepsi terhadap kendala adaptasi perubahan iklim.

Tabel 43 Persepsi terhadap Kendala Adaptasi Perubahan Iklim

No	Kendala Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	72	24
2	Kurang Setuju	169	56
3	Cukup Setuju	49	16
4	Setuju	6	2
5	Sangat Setuju	4	1
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 43 menjelaskan bahwa responden kurang setuju terhadap kendala adaptasi perubahan iklim mencapai 56%, 24% responden sangat tidak setuju, 16% responden cukup setuju, 2% responden setuju dan 1% responden sangat setuju terhadap kendala adaptasi perubahan iklim. Keterangan responden menyatakan banyak yang kurang setuju terhadap kendala adaptasi perubahan iklim, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya mampu beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi, karena iklim yang panas dapat diatasi warga dengan cara membiarkan jendela dan pintu rumah dalam keadaan terbuka, serta penggunaan kipas angin.

3.2.1. Jenis Adaptasi

Hasil pengamatan (20 November 2018) yang dilaksanakan di masyarakat kelurahan Sungai Bilu terkait dengan jenis adaptasi yaitu: (1) Desain rumah panggung. Siklus banjir di Sungai Martapura memang tidak setiap tahun, namun acapkali terjadi untuk sekali dalam beberapa tahun. Desain rumah panggung adalah solusi untuk mendukung program kampung iklim (ProKlim) karena akan mengurangi dampak banjir. Rumah yang didesain telah diukur agar tidak sampai air masuk ke dalam runah ketika air pasang naik maksimal. Warga RT 05 menyatakan bahwa pernah banjir tahun 2015 sekitar bulan Desember-Januari. Air naik ke dalam rumah hingga menggenangi sekitar 15-20 cm menggenangi rumah warga. Siklus Banjir terjadi 4-5 tahun sekali. (2) Menanam berbagai jenis tanaman, seperti jenis buah (pisang, nangka, sirsak, dll.) dan sayuran seperti lombok dan tomat. (3) Penanaman vegetasi yang telah dilakukan masyarakat yakni dengan menanam berbagai jenis tanaman di pekarangan rumah, seperti jenis buah pisang, nangka, sirsak, dan sebagainya. Begitu juga dengan berbagai jenis kembang. Kembang tidak hanya diupayakan oleh warga tapi juga mendapat abntuan dari pemerintah.

3.2.2. Kendala Adaptasi

Berdasarkan hasil pengamatan (20 November 2018) dan hasil wawancara dengan ketua RT 01 (Normansyah, 50 tahun) tentang beberapa kendala adaptasi masyarakat untuk mendukung ProKlim, yaitu sebagai

berikut: (1) penumpukan sampah “kiriman” dari wilayah lain. Kondisi ini cukup melemahkan masyarakat Sungai Bilu untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat dan bebas sampah. Sementara itu, warga Sungai Bilu sudah sadar lingkungan (80%) yang ditandai dengan tidak membuang sampah sembarangan khususnya di sungai; (2) Program WC belum merata, seperti rumah warga di RT 03. Kondisi ini tidak mendukung ProKlim. Beberapa WC yang rusak juga belum dilakukan perbaikan sehingga merupakan kendala bagi ProKlim; (3) sebagian masyarakat belum melakukan gerakan 3M (menutup, menguras dan menimbun) yakni dengan cara membakar dengan proses tase sekitar 20% sehingga diperlukan upaya yang lebih baik lagi. Berikut disajikan tentang persepsi terhadap kegiatan adaptasi perubahan iklim masyarakat kelurahan Sungai Bilu Banjarmasin. Berikut tersaji tabel persepsi terhadap kegiatan adaptasi perubahan iklim.

Tabel 44 Persepsi terhadap Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim

No.	Kelas	Skor	Jumlah	%
1	Baik	81-110	161	54
2	Sedang	51-<81	139	46
3	Buruk	22-<51	0	0
Jumlah			300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 44 menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim berada adalah kategori “Baik” (54%) sehingga kondisi ini perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan mutunya baik terkait dengan kegiatan adaptasi untuk menangani kekeringan seperti:

meningkatkan tempat penampungan air, membuat sumur resapan, dan pembatasan penggunaan air. Meningkatkan adaptasi dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, membangun saluran drainase, ketersediaan alat penyampaian informasi ketinggian muka air sungai bencana banjir, rute evakuasi untukantisipasi banjir, membangun rumah panggung, menanam pohon, penanaman terpadu, tumpang sari, menanam berbagai jenis tanaman untuk mengatasi gagal panen, mengurangi penggunaan pestisida, menanamkan lahan pekarangan dengan tanaman bermanfaat, melakukan 3M (menguras, menimbun, dan menutup) untuk menghindari penyakit, mengetahui lebih dini mengenai penyakit, seperti diare dan malaria, tersedia akses air bersih dan jamban sehat dan standar, penyuluhan tentang perilaku hidup sehat, mengurangi berbagai kendala dalam melakukan kegiatan adaptasi.

Hasil wawancara terstruktur terkait beberapa kendala dalam hal kegiatan adaptasi dijelaskan antara lain, yakni kesulitan untuk menjemur kerupuk. Berdasarkan observasi (18 November 2018) di pemukiman “Kampung Hijau” di Sungai Bilu dapat digambarkan bahwa warga kesulitan menjemur kerupuk udang dan haruan. Warga menjemur kerupuk di beberapa tempat seperti di dermaga dan ruas-ruas jalan. Kondisi ini cukup mengganggu pemandangan bagi wisatawan karena jalan semakin terasa sempit.

Informasi yang diperoleh dari *Banjarmasin Post co. id* (19 Juni 2018) terkait dengan “Kampung Hijau” dijelaskan oleh ketua RT 5, Muhammad Tauhid sebagai berikut:

Kampung ini nantinya akan menjadi tempat wisata di Banjarmasin.

Sebuah kampung yang berderet di pinggiran sungai Martapura terbentang sepanjang 800 meter, dengan corak warna hijau setiap rumah. Ia juga menjelaskan bahwa beberapa keluhan warganya adalah tidak adanya tempat santai untuk wisatawan termasuk kesulitan display hasil *home industry* seperti krupuk, kain sasirangan dan berbagai makanan lainnya untuk menarik para wisatawan.

Masih terkait dengan “Kampung Hijau” Kelurahan Sungai Bilu, sebagaimana informasi yang diperoleh dari *Banjarmasin Post co. id*. (8

September 2017) dijelaskan bahwa dana yang disiapkan untuk program tersebut berjumlah 1.9 Miliar. Diantara programnya adalah pengecatan sejumlah rumah di bantaran sungai sepanjang 800 meter. Disamping itu juga akan dilakukan perbaikan rumah yang dianggap rusak. Hal lain adalah menyelesaikan beberapa titian dan pagar untuk memudahkan pengecatan.

Pada indikator jamban sehat dan standar, maka berdasarkan hasil observasi (18 November 2018) di RT 5 Kelurahan Sungai Bilu menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan program jamban sehat dengan *septic tank* dan pipanisasi. Namun demikian, diantara keluhan warga adalah aroma septic tank yang kadang mengganggu sehingga perlu dicarikan solusinya.

Merurut Taufik (42 tahun) dan Rustam (51 tahun), sejak program ini dijalankan (awal 2017) sudah ada kontrol dari Dinas Lingkungan, namun belum ada tindak lanjut, khususnya masalah aroma dari *septic tank*. Masalah lainnya terkait pembuatan *septic tank* adalah, beberapa warga yang memiliki rumah dan arial tanah yang lebih sempit maka kadang pembuatan WC sampai *mengakot* (mengambil sedikit tanah orang lain) yang dapat berdampak sosial. Ketersediaan WC pada RT 5 Kelurahan Sungai Bilu sudah terpenuhi hingga 90%. Berbeda dengan warga RT 3, pengadaan WC sehat dan standar tampaknya belum dilakukan. Hal ini mungkin karena masih menunggu penganggaran berikutnya (Miftah Ramadhan, 27 tahun).

Pada indikator 3M, sebagaimana telah diuraikan Miftah Ramadhan

(27 tahun) sebelumnya, bahwa bentuk penyuluhan yang pernah ada pada tahun 2017 di RT 3 dan sekitarnya berupa pemeriksaan terhadap bahaya demam berdarah melalui program Jumantik (Juru Pantau Jentik). Hal ini dilakukan karena terdapat kasus DBD. Sebagaimana juga disampaikan oleh Hamdalah (41 tahun) dan Hairuni Hidayatullah (39 tahun) bahwa penyuluhan dilaksanakan di RT. 04 oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin hampir setiap tahun apabila terdapat kasus DBD. Kegiatan penyuluhan antara lain menjelaskan tentang pemberian obat/bubuk untuk membasmi jentik-jentik yang ada di dalam bak penampungan air warga.

Untuk mendukung kegiatan penyuluhan bidang kesehatan, maka

Kelurahan Sungai Bilu telah memiliki sarana pendukungnya, yakni: (1)

puskesmas: 1 buah; (2) Poskesdes: 2 buah; (3) Balai pengobatan: 2 buah; (4) Bidan: 9 orang; (5) Apotik: 3 buah; dan (6) Posyandu: 11 buah (Profil Kelurahan Sungai Bilu, 2016). Sarana ini cukup untuk mendukung program kampung iklim terkait pencegahan penyakit, seperti diare dan DBD. Penambahan jumlah penduduk tentu mengharuskan pemerintahan untuk terus menambah sarana pendukung kesehatan tersebut.

Adapun terkait dengan jenis kegiatan adaptasi dalam perubahan

iklim yang telah atau belum dilakukan oleh masyarakat Sungai Bilu Banjarmasin, maka beberapa indikator yang telah diuraikan di atas telah dilaksanakan dengan baik, sehingga perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan mutu dan jenis adaptasinya.

3.3. Persepsi terhadap Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim

Persepsi masyarakat Banjarmasin Sungai Bilu terhadap kegiatan mitigasi perubahan iklim, antara lain menjelaskan beberapa hal terkait persepsi terhadap perilaku membuang sampah ke sungai; perilaku pembakaran sampah; perilaku 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*); dan persepsi terhadap pemanfaatan pupuk organik. Berikut tersaji tabel persepsi terhadap perilaku membuang sampah ke sungai.

Tabel 45 Persepsi terhadap Perilaku Membuang Sampah ke Sungai

No	Perilaku Membuang Sampah ke Sungai	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	160	53
2	Kurang Setuju	127	42

No	Perilaku Membuang Sampah ke Sungai	Jumlah	%
3	Cukup Setuju	2	1
4	Setuju	2	1
5	Sangat Setuju	9	3
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 45 menjelaskan bahwa responden sangat tidak setuju terhadap perilaku membuang sampah ke sungai mencapai 53%, 42% responden kurang setuju, 3% responden sangat setuju, 1% responden cukup setuju dan 1% responden setuju terhadap perilaku membuang sampah ke sungai. Keterangan responden menyatakan banyak yang sangat tidak setuju terhadap perilaku membuang sampah ke sungai, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya rumah warga menghadap sungai, sehingga meminimalisir membuang sampah ke sungai dan kesadaran akan pentingnya kebersihan sudah diterapkan warga. Berikut tersaji tabel persepsi terhadap perilaku pembakaran sampah.

Tabel 46 Persepsi terhadap Perilaku Pembakaran Sampah

No.	Perilaku Pembakaran Sampah	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	65	22
2	Kurang Setuju	109	36
3	Cukup Setuju	79	26
4	Setuju	27	9
5	Sangat Setuju	20	7
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 46 menjelaskan bahwa responden kurang setuju terhadap perilaku pembakaran sampah mencapai 36%, 26% responden cukup setuju,

22% responden sangat tidak setuju, 9% responden setuju dan 7% responden sangat setuju terhadap perilaku pembakaran sampah. Keterangan responden menyatakan banyak yang kurang setuju terhadap perilaku pembakaran sampah, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya tidak melakukan pembakaran sampah, sehingga meminimalisir terjadinya asap dan kesadaran akan pentingnya kesehatan sudah diterapkan warga. Berikut tersaji tabel persepsi terhadap perilaku 3R (*reduce, reuse, recycle*).

Tabel 47 Persepsi terhadap Perilaku 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)

No	Perilaku 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	4	1
2	Kurang Setuju	0	0
3	Cukup Setuju	60	20
4	Setuju	175	58
5	Sangat Setuju	61	20
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 47 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap perilaku 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) mencapai 58%, 20% responden cukup setuju, 20% responden sangat setuju, 1% responden sangat tidak setuju dan 0% responden kurang setuju terhadap perilaku 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap perilaku 3R artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya belum melakukan pengelolaan sampah dengan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), dengan mengubah perilaku masyarakat melalui penerapan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) menjadi salah satu solusi dalam menjaga lingkungan di sekitar

tempat tinggal. Berikut tersaji tabel persepsi terhadap pemanfaatan pupuk organik.

Tabel 48 Persepsi terhadap Pemanfaatan Pupuk Organik

No.	Pemanfaatan Pupuk Organik	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	5	2
2	Kurang Setuju	2	1
3	Cukup Setuju	75	25
4	Setuju	172	57
5	Sangat Setuju	46	15
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 48 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap pemanfaatan pupuk organik mencapai 57%, 25% responden cukup setuju, 15% responden sangat setuju, 2% responden sangat tidak setuju dan 1% responden kurang setuju terhadap pemanfaatan pupuk organik. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap pemanfaatan pupuk organik, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya memanfaatkan pupuk organik untuk tanaman, karena penggunaan pupuk organik kandungannya tidak berbahaya yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses pembusukan. Berikut tersaji tabel persepsi terhadap pengolahan limbah.

Tabel 49 Persepsi terhadap Pengolahan Limbah

No	Pengolahan Limbah	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	2	1
2	Kurang Setuju	3	1
3	Cukup Setuju	104	35
4	Setuju	123	41
5	Sangat Setuju	68	23
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 49 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap pengolahan limbah mencapai 41%, 35% responden cukup setuju, 23% responden sangat setuju, 1% responden sangat tidak setuju dan 1% responden kurang setuju terhadap pengolahan limbah. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap pengolahan limbah, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya menginginkan adanya pengolahan limbah yang bernilai guna, karena pengolahan limbah yang baik akan menjamin kenyamanan tempat tinggal, mencegah timbulnya pencemaran lingkungan dan perkembangbiakan penyakit. Berikut tersaji tabel persepsi terhadap pemanfaatan gas metahane sebagai sumber energi baru.

Tabel 50 Persepsi terhadap Pemanfaatan Gas Metahane sebagai Sumber Energi Baru

No	Pemanfaatan Gas Metahane sebagai Sumber Energi Baru	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	2	1
2	Kurang Setuju	6	2
3	Cukup Setuju	109	36
4	Setuju	145	48
5	Sangat Setuju	38	13
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 50 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap pemanfaatan gas metahane sebagai sumber energi baru mencapai 48%, 36% responden cukup setuju, 13% responden sangat setuju, 2% responden kurang setuju dan 1% responden sangat tidak setuju terhadap pemanfaatan gas metahane sebagai sumber energi baru. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap pemanfaatan gas metahane sebagai sumber energi baru,

artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya menginginkan adanya pemanfaatan gas metana yang bernilai guna, karena dapat digunakan sebagai bahan bakar (biogas) di rumah-rumah, perusahaan, dan pabrik-pabrik. Berikut tersaji tabel persepsi terhadap perilaku hemat listrik.

Tabel 51 Persepsi terhadap Perilaku Hemat Listrik

No	Perilaku Hemat Listrik	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	5	2
2	Kurang Setuju	0	0
3	Cukup Setuju	76	25
4	Setuju	139	46
5	Sangat Setuju	80	27
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 51 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap perilaku hemat listrik mencapai 46%, 27% responden sangat setuju, 25% responden cukup setuju, 2% responden sangat tidak setuju dan 0% responden kurang setuju terhadap perilaku hemat listrik. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap perilaku hemat listrik, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya hemat dalam pemakaian listrik dan pemakaiannya sesuai dengan kebutuhan. Berikut tersaji tabel persepsi terhadap penggunaan pupuk organik.

Tabel 52 Persepsi terhadap Penggunaan Pupuk Organik

No	Penggunaan Pupuk Organik	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	77	26
2	Kurang Setuju	119	40
3	Cukup Setuju	21	7
4	Setuju	63	21
5	Sangat Setuju	20	7
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 52 menjelaskan bahwa responden kurang setuju terhadap penggunaan pupuk organik mencapai 40%, 26% responden sangat tidak setuju, 21% responden setuju, 7% responden cukup setuju dan 7% responden sangat setuju terhadap penggunaan pupuk organik. Keterangan responden menyatakan banyak yang kurang setuju terhadap penggunaan pupuk organik, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya menggunakan pupuk organik untuk tanaman, karena penggunaan pupuk organik kandungannya tidak berbahaya yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses pembusukan. Berikut tersaji tabel persepsi terhadap penghijauan untuk lingkungan.

Tabel 53 Persepsi terhadap Penghijauan untuk Lingkungan

No	Penghijauan untuk Lingkungan	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	4	1.3
2	Kurang Setuju	2	0.7
3	Cukup Setuju	33	11.0
4	Setuju	137	45.7
5	Sangat Setuju	124	41.3
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 53 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap penghijauan untuk lingkungan mencapai 45.7%, 41.3% responden sangat setuju, 11% responden cukup setuju, 1.3% responden sangat tidak setuju dan 0.7% responden kurang setuju terhadap penghijauan untuk lingkungan. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap penghijauan untuk lingkungan, artinya warga yang tinggal di kampung

iklim mayoritasnya menginginkan penghijauan lingkungan, apabila dilakukan penghijauan maka kampung iklim akan terasa indah dan sejuk. Berikut tersaji tabel persepsi terhadap pembakaran hutan dan lahan.

Tabel 54 Persepsi terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan

No	Pembakaran Hutan dan Lahan	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	140	47
2	Kurang Setuju	119	40
3	Cukup Setuju	4	1
4	Setuju	17	6
5	Sangat Setuju	20	7
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 54 menjelaskan bahwa responden sangat tidak setuju terhadap pembakaran hutan dan lahan mencapai 47%, 40% responden kurang setuju, 7% responden sangat setuju, 6% responden setuju dan 1% responden cukup setuju terhadap pembakaran hutan dan lahan. Keterangan responden menyatakan banyak yang sangat tidak setuju terhadap pembakaran hutan dan lahan, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, apabila dilakukan akan berdampak buruk pada kesehatan dan lingkungan. Berikut tersaji tabel persepsi terhadap kendala kegiatan mitigasi perubahan iklim.

Tabel 55 Persepsi terhadap Kendala Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim

No	Kendala Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	35	12
2	Kurang Setuju	139	46
3	Cukup Setuju	45	15
4	Setuju	76	25
5	Sangat Setuju	5	2
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 55 menjelaskan bahwa responden kurang setuju terhadap kendala kegiatan mitigasi perubahan iklim mencapai 46%, 25% responden setuju, 15% responden cukup setuju, 12% responden sangat tidak setuju dan 2% responden sangat setuju terhadap kendala kegiatan mitigasi perubahan iklim. Keterangan responden menyatakan banyak yang kurang setuju terhadap kendala kegiatan mitigasi perubahan iklim, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya tidak terkendala dalam kegiatan mitigasi perubahan iklim, upaya mengurangi risiko bencana dengan cara penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

3.3.1. Jenis Mitigasi

Jenis kegiatan mitigasi yang telah dilakukan oleh masyarakat Sungai Bilu untuk mendukung Proklamasi sebagaimana hasil pengamatan (20

November 2018) dan hasil wawancara dengan Normansyah (50 tahun), yaitu sebagai berikut: (1) masyarakat memanfaatkan tempat sampah yang diperoleh dari pemerintah; (2) masyarakat tidak membuang sampah sembarang tempat khususnya ke sungai; (3) sebagian besar masyarakat tidak membakar sampah; (4) menggunakan pupuk organik untuk tanaman. Pupuk organik yang dimaksud adalah memanfaatkan tanah eceng gondok (*ilung*) untuk tanaman dan kembang; (5) menanam pohon (buah-buah) seperti pepaya, kedondong, pisang, serta berbagai sayuran, seperti tomat dan lombok di pekarangan rumah.

3.3.2. Kendala Mitigasi

Hasil wawancara dengan ketua RT 01, Normansyah (50 tahun), Miftah Ramadhan (27 tahun) tentang bentuk kendala kegiatan mitigasi untuk mendukung ProKlim yaitu bahwa warga belum sepenuhnya menyadari tentang larangan membakar sampah. Warga Sungai Bilu memiliki kebiasaan membakar sampah khususnya pada musim kemarau yang seharusnya dipilah dan juga dapat dijadikan pupuk organik (kompos). Hal ini juga ditegaskan Miftah Ramadhan (27 tahun) bahwa masyarakat Sungai Bilu memiliki kebiasaan membakar sampah namun bukan saat musim kemarau saja tapi ketika sampah sudah mulai numpuk maka masyarakat otomatis membakarnya. Penumpukan sampah menurut Miftah karena tidak ada petugas khusus yang mengangkat sampah ke TPS. Warga RT 03 hanya mencoba membuat jadwal giliran untuk membuang sampah sebanyak 2 atau 3 kali dalam sebulan oleh warga ke TPS Kuripan.

Akan halnya dengan warga RT 5 Rustam (51 tahun) dan Taufik (42 tahun) menjelaskan bahwa di RT 05 terdapat 8 tempat sampah dengan ukuran diameter 40 cm tinggi 50 cm (cukup kecil) yang terbuat dari karet ban mobil. Masalah sampah di RT ini adalah tidak adanya petugas khusus yang memungut sampah di RT untuk dibawa ke TPS Kuripan. Inisiatif warga RT 5 yakni dengan bekerjasama dengan RT 6 agar sampah yang ada di RT 5 sekitar 8 tong tersebut ikut diangkut. Adapun biayanya diperoleh dari warga RT 5. Menurut warga RT 5, bahwa ada bantuan dari Pelindo 3 berupa

gerobak untuk mengangkut sampah RT 5 namun belum dimanfaatkan. Masyarakat menghendaki agar sampah dikelola oleh RT dengan cara melibatkan warga dalam pelaksanaannya. Satu gerobak yang diperoleh dari Pelindo 3 belum dimanfaatkan secara optimal. Begitu pula dengan sampah ilung yang belum disentuh solusinya. Berikut disajikan persepsi masyarakat terhadap kegiatan mitigasi perubahan iklim masyarakat kelurahan Sungai Bilu Banjarmasin.

Tabel 56 Persepsi terhadap Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim

No	Kelas	Skor	Jumlah	%
1	Baik	40-55	201	67
2	Sedang	26-<40	99	33
3	Buruk	11-<26	0	0
Jumlah			300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 56 menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Sungai Lulut Banjarmasin terhadap kegiatan mitigasi perubahan iklim pada kategori “baik” (67%). Kondisi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan baik terkait dengan perilaku tidak membuang sampah di sungai; melakukan 3R (*reduce, reuse, recycle*); memanfaatkan pupuk organik melalui proses pengomposan; megolah limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat; memanfaatkan gas methane sebagai sumber energi baru; perilaku hemat listrik; penggunaan pupuk organik; melakukan penghijauan; dan tidak membakar hutan dan lahan.

Hasil wawancara terstruktur diperoleh informasi dari masyarakat Sungai Lulut Banjarmasin bahwa bentuk kendala terkait dengan kegiatan

mitigasi perubahan iklim, yakni: (a) Tidak ada biaya untuk penanganan banjir; (b) Tidak ada gotong-royong dalam kebersihan lingkungan setelah terjadi banjir.

Adapun jenis kegiatan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan masyarakat Sungai Lulut Banjarmasin, yakni; (a) masing-masing warga melakukan pembersihan sampah; (b) masing-masing warga diberi tabung tangki septik secara bertahap.

Wawancara mendalam terhadap Ketua RT 3 (Miftah Ramadhan, 27 tahun) Kampung Hijau Sungai Bilu tentang masalah persampahan, dijelaskan sebagai berikut:

Di RT 3 terdapat 7 tempat sampah. Sampah dikelola oleh warga sendiri. Ukuran tempat sampah yakni tinggi 40 cm diameter 30 cm. 2-3x dalam sebulan dilakukan pemungutan sampah yang ada di tempat-tempat sampah di RT 3. Tidak semua warga menjalankan tugas yang telah dibebankan. Jika sampah meluber, kadang warga melakukan pembakaran. Di RT 3 terdapat 4 gerobak sampah untuk mengangkut sampai ke TPS Kuripan. Warga secara bergantian (3x dalam sebulan) bertugas memungut sampah untuk dibuang ke TPS Kuripan. Namun, karena mungkin karena alasan sibuk, maka kadang program ini tidak berjalan sehingga jika sampah meluber maka sebagian warga membakarnya. Namun, warga tidak lagi membuang sampah ke sungai. Adapun sebagian sampah yang ada di bawah kolong rumah adalah merupakan sampah kiriman dari daerah kampung sebelah. Iuran sampah tidak ada. Sehingga sulit mencari orang yang khusus mengerjakan sampah karena upahnya tidak tersedia. Jumlah sampah kiriman terlalu banyak, sehingga sulit dilaksanakan gotong royong.

Adapun hasil wawancara dengan warga RT 5 (Taufik, 42 tahun) dan Rustam, 51 tahun) tentang masalah pengelolaan sampah, dijelaskan sebagai berikut:

Ketersediaan tempat sampah di RT 05 sekitar 8 tempat sampah dengan ukuran diameter 40 cm tinggi 50 cm (cukup kecil) yang terbuat dari karet ban mobil. Masalah sampah di RT ini adalah tidak adanya petugas khusus yang memungut sampah di RT tersebut ke TPS kuripan. Inisiatif warga RT 5 yakni dengan bekerjasama dengan RT 6 agar sampah yang ada di RT 5 sekitar 8 tong tersebut ikut diangkat. Adapun biayanya diperoleh dari warga RT 5. Menurut warga RT 5, bahwa ada bantuan dari Pelindo 3 berupa gerobak untuk mengangkut sampah RT 5 namun belum dimanfaatkan. Bahkan sebelumnya juga sudah ada bantuan gerobak sampah, namun juga belum dimanfaatkan oleh RT 5 untuk mengelola sampaharganya. Masyarakat menghendaki agar sampah dikelola oleh RT dengan cara melibatkan warga dalam pelaksanaannya. Satu gerobak yang diperoleh dari Pelindo 3 belum dimanfaatkan secara optimal. Sebelum tahun 2016 juga telah ada bantuan gerobak. Adapun sampah ilung belum dapat diselesaikan karena sangat banyak.

Informasi tersebut menggambarkan bahwa pemerintah masih belum optimal dalam penyelenggaraan ProKlim di “Kampung Hijau” kelurahan Sungai Bilu Banjarmasin khususnya terkait dengan penanganan sampah. Keharusan masyarakat tidak membuang sampah baik di darat apalagi di sungai merupakan diantara program utama ProKlim yang tampaknya belum terealisasi dengan optimal baik dari inisiatif masyarakat maupun pemerintah.

Penjelasan tersebut diperkuat dengan data tentang kondisi kepemilikan sarana kebersihan Kelurahan Sungai Bilu, yakni terdiri dari Dipo sampah/TPS sebanyak 1 buah; gerobak sampah sebanyak 14 buah dan petugas kebersihan sebanyak 8 orang. Jumlah sarana kebersihan ini tentu

tidak memadai jika dibandingkan dengan jumlah RT sebanyak 31 (Profil Kelurahan Sungai Bilu, 2016).

BAB IV

TINDAKAN

MASYARAKAT

Pada bagian ini akan dijelaskan berdasarkan data pada tabel terkait tindakan masyarakat terhadap proklamasi di Kota Banjarmasin. Beberapa yang menjadi fokus pembahasan yaitu bentuk tindakan adaptasi terhadap pembuatan lubang penampungan air hujan; pembuatan embung untuk kekeringan; pembuatan penampungan air hujan; pembatasan penggunaan air; pembuatan biopori; pembuatan sumur resapan; pembuatan bangunan terjunan air; pemanfaatan lahan pekarangan; penerapan pola 3M (menguras, menimbun, menutup); kepemilikan rumah bersikulasi udara yang baik; penerapan sistem kewaspadaan pada penyakit;

4.1. Tindakan Adaptasi

Beberapa tindakan adaptasi yang akan dijelaskan antara lain adalah tindakan terhadap pembuatan lubang penampungan air hujan; pembuatan embung untuk kekeringan; dan pembuatan penampungan air hujan. Berikut tersaji tabel tindakan terhadap pembuatan lubang penampungan air hujan.

Tabel 57 Tindakan terhadap Pembuatan Lubang Penampungan Air Hujan

No	Jenis Kegiatan Mitigasi	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	35	12
2	Kurang Setuju	71	24
3	Cukup Setuju	52	17
4	Setuju	128	43
5	Sangat Setuju	14	5
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 57 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap pembuatan lubang penampungan air hujan mencapai 43%, 24% responden kurang setuju, 17% responden cukup setuju, 12% responden sangat tidak setuju dan 5% responden sangat setuju terhadap pembuatan lubang penampungan air hujan. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap pembuatan lubang penampungan air hujan, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya menginginkan adanya pembuatan lubang penampungan air hujan, karena dapat menjadi solusi efektif dan sederhana untuk menghadapi kekurangan air bersih. Berikut tersaji tabel tindakan terhadap pembuatan embung untuk kekeringan.

Tabel 58 Tindakan terhadap Pembuatan Embung untuk Kekeringan

No	Pembuatan Embung untuk Kekeringan	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	30	10
2	Kurang Setuju	20	7
3	Cukup Setuju	121	40
4	Setuju	115	38
5	Sangat Setuju	14	5
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 58 menjelaskan bahwa responden cukup setuju terhadap pembuatan embung untuk kekeringan mencapai 40%, 38% responden setuju, 10% responden sangat tidak setuju, 7% responden kurang setuju dan 5% responden sangat setuju terhadap pembuatan embung untuk kekeringan. Keterangan responden menyatakan banyak yang cukup setuju terhadap pembuatan embung untuk kekeringan, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya tinggal di pinggiran sungai, namun adanya musim kemarau panjang mengakibatkan pembuatan embung sebagai upaya untuk mengantisipasi kelebihan air pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Berikut tersaji tabel tindakan terhadap pembuatan penampungan air hujan.

Tabel 59 Tindakan terhadap Pembuatan Penampungan Air Hujan

No	Pembuatan Penampungan Air Hujan	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	12	4
2	Kurang Setuju	67	22
3	Cukup Setuju	76	25
4	Setuju	126	42
5	Sangat Setuju	19	6
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 59 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap pembuatan penampungan air hujan mencapai 42%, 25% responden cukup setuju, 22% responden kurang setuju, 6% responden sangat setuju dan 4% responden sangat tidak setuju terhadap pembuatan penampungan air hujan. Keterangan- an responden menyatakan banyak yang setuju terhadap pembuatan

penampungan air hujan, artinya warga yang tinggal di kampung iklim dapat memanfaatkan air hujan untuk keperluan sehari-hari. Berikut tersaji tabel tindakan terhadap pembatasan penggunaan air.

Tabel 60 Tindakan terhadap Pembatasan Penggunaan Air

No	Pembatasan Penggunaan Air	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	44	15
2	Kurang Setuju	24	8
3	Cukup Setuju	47	16
4	Setuju	168	56
5	Sangat Setuju	17	6
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 60 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap pembatasan penggunaan air mencapai 56%, 16% responden cukup setuju, 15% responden sangat tidak setuju, 8% responden kurang setuju dan 6% responden sangat setuju terhadap pembatasan penggunaan air. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap pembatasan penggunaan air, artinya warga yang tinggal di kampung iklim dapat menggunakan air sesuai dengan keperluan sehari-hari, sehingga warga tidak boros dalam penggunaan air. Berikut tersaji tabel tindakan terhadap pembuatan biopori.

Tabel 61 Tindakan terhadap Pembuatan Biopori

No.	Pembuatan Biopori	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	10	3
2	Kurang Setuju	16	5
3	Cukup Setuju	109	36
4	Setuju	130	43
5	Sangat Setuju	35	12
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 61 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap pembuatan biopori mencapai 43%, 36% responden cukup setuju, 12% responden sangat setuju, 5% responden kurang setuju dan 3% responden sangat tidak setuju terhadap pembuatan biopori. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap pembuatan biopori, artinya warga yang tinggal di kampung iklim menginginkan adanya pembuatan biopori yang berfungsi untuk resapan air dan mengatasi banjir. Berikut tersaji tabel tindakan terhadap pembuatan sumur resapan.

Tabel 62 Tindakan terhadap Pembuatan Sumur Resapan

No	Pembuatan Sumur Resapan	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	16	5
2	Kurang Setuju	24	8
3	Cukup Setuju	105	35
4	Setuju	128	43
5	Sangat Setuju	27	9
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 62 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap pembuatan sumur resapan mencapai 43%, 35% responden cukup setuju, 9% responden sangat setuju, 8% responden kurang setuju dan 5% responden sangat tidak setuju terhadap pembuatan sumur resapan. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap pembuatan sumur resapan, artinya warga yang tinggal di kampung iklim menginginkan adanya pembuatan sumur resapan yang berfungsi untuk manajemen air hujan modern dan

dapat mengatasi banjir. Berikut tersaji tabel tindakan terhadap pembuatan bangunan terjunan air.

Tabel 63 Tindakan terhadap Pembuatan Bangunan Terjunan Air

No	Pembuatan Bangunan Terjunan Air	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	11	4
2	Kurang Setuju	48	16
3	Cukup Setuju	87	29
4	Setuju	130	43
5	Sangat Setuju	24	8
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 63 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap pembuatan bangunan terjunan air mencapai 43%, 29% responden cukup setuju, 16% responden kurang setuju, 8% responden sangat setuju dan 4% responden sangat tidak setuju terhadap pembuatan bangunan terjunan air. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap pembuatan bangunan terjunan air, artinya warga yang tinggal di kampung iklim menginginkan adanya pembuatan bangunan terjunan air yang berfungsi untuk mengendalikan erosi pada selokan dan sungai, tinggi muka air sungai, air yang keluar pada pipa. Berikut tersaji tabel tindakan terhadap pemanfaatan lahan pekarangan.

Tabel 64 Tindakan terhadap Pemanfaatan Lahan Pekarangan

No	Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	2	1
2	Kurang Setuju	10	3
3	Cukup Setuju	101	34
4	Setuju	131	44
5	Sangat Setuju	56	19
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 64 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap pemanfaatan lahan pekarangan mencapai 44%, 34% responden cukup setuju, 19% responden sangat setuju, 3% responden kurang setuju dan 1% responden sangat tidak setuju terhadap pemanfaatan lahan pekarangan. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap pemanfaatan lahan pekarangan, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya memanfaatkan lahan pekarangan untuk penghijauan kampung. Berikut tersaji tabel tindakan terhadap penerapan pola 3M (menguras, menimbun, menutup). Tabel 65 Tindakan terhadap Penerapan Pola 3M (Menguras, Menimbun, Menutup)

No	Penerapan Pola 3M	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	1	0.3
2	Kurang Setuju	5	1.7
3	Cukup Setuju	50	16.7
4	Setuju	180	60.0
5	Sangat Setuju	64	21.3
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 65 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap penerapan pola 3M (menguras, menimbun, menutup) mencapai 60%, 21.3% responden sangat setuju, 16.7% responden cukup setuju, 1.7% responden kurang setuju dan 0.3% responden sangat tidak setuju terhadap penerapan pola 3M (menguras, menimbun, menutup). Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap penerapan pola 3M (menguras, menimbun, menutup), artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya

melakukan 3M (menguras, menimbun, menutup), sehingga masyarakat sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Berikut tersaji tabel tindakan terhadap kepemilikan rumah bersikulasi udara yang baik.

Tabel 66 Tindakan terhadap Kepemilikan Rumah Bersikulasi Udara yang Baik

No	Kepemilikan Rumah Bersikulasi Udara yang Baik	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	1	0.3
2	Kurang Setuju	3	1.0
3	Cukup Setuju	44	14.7
4	Setuju	186	62.0
5	Sangat Setuju	66	22.0
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 66 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap kepemilikan rumah bersikulasi udara yang baik mencapai 62%, 22% responden sangat setuju, 14.7% responden cukup setuju, 1% responden kurang setuju dan 0.3% responden sangat tidak setuju terhadap kepemilikan rumah bersikulasi udara yang baik. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap kepemilikan rumah bersikulasi udara yang baik, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya memiliki rumah bersikulasi udara yang merupakan kunci untuk mendapatkan rumah yang tak pengap dan panas dan sebagian dari usaha adaptasi terhadap iklim. Berikut tersaji tabel tindakan terhadap penerapan sistem kewaspadaan pada penyakit.

Tabel 67 Tindakan terhadap Penerapan Sistem Kewaspadaan pada Penyakit

No	Penerapan Sistem Kewaspadaan pada Penyakit	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	0	0
2	Kurang Setuju	2	1
3	Cukup Setuju	50	17
4	Setuju	186	62
5	Sangat Setuju	62	21
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 67 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap penerapan sistem kewaspadaan pada penyakit mencapai 62%, 21% responden sangat setuju, 17% responden cukup setuju, 1% responden kurang setuju dan 0% responden sangat tidak setuju terhadap penerapan sistem kewaspadaan pada penyakit. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap penerapan sistem kewaspadaan pada penyakit, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya menerapkan sistem kewaspadaan terhadap penyakit, sehingga warga jarang terkena penyakit.

4.1.1. Jenis Tindakan Adaptasi

Berdasarkan hasil pengamatan (20 November 2018), jenis tindakan adaptasi yang dilakukan masyarakat kelurahan Sungai Bilu untuk mendukung ProKlim yakni : (1) memanfaatkan pekarangan untuk beternak (ayam); dan (2) memanfaatkan pekarangan untuk budidaya tumbuhan, seperti lombok, tomat, pisang dan berbagai jenis buah seperti pepaya, mangga, nangka, sirsak, kedondong, dll.

Hasil wawancara dengan Miftah Ramadhan (27 tahun), Hamdalah (41 tahun), Hairun Hidayatullah (39 tahun), Taufik (42 tahun), Rustam (51 tahun) terkait dengan jenis tindakan adaptasi melalui kegiatan 3 M yang dilakukan masyarakat kelurahan Sungai Bilu yakni sebagai berikut: (1) masyarakat melakukan kegiatan 3 M (menguras, menimbun dan menutup) tempat air. Kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi DBD. Ketika kasus DBD menimpa masyarakat kelurahan Sungai Bilu, warga kemudian mendapat penyuluhan dari Dinas Kesehatan Banjarmasin untuk mengatasi dan mengantisipasi DBD. Bentuk penyuluhan yang pernah ada pada tahun 2017 di RT 3 dan sekitarnya berupa pemeriksaan terhadap bahaya demam berdarah melalui program Jumantik (Juru Pantau Jentik). Hal ini dilakukan karena terdapat kasus DBD. Penyuluhan juga dilaksanakan di RT. 04 oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin hampir setiap tahun apabila ada keluhan dari masyarakat yang terindikasi penyakit DBD, malaria dan lain sebagainya. Kegiatan penyuluhan antara lain menjelaskan tentang pemberian obat/bubuk untuk membasmi jentik-jentik yang ada di dalam bak penampungan air warga; (2) Sirkulasi udara yang baik. Hasil pengamatan menggambarkan bahwa pada umumnya rumah warga kelurahan Sungai Bilu memiliki rumah dengan sirkulasi udara yang baik. (3) Masyarakat Sungai Bilu memiliki kesadaran yang tinggi terhadap masalah sampah. Masyarakat terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Kendalanya tidak adanya petugas khusus yang mengumpulkan sampah sebelum dibawa ke dibawah ke

TPS Kuripan. (4) kegiatan kebersihan lingkungan secara periodik yang komandoi oleh Dinas Kebersihan. Berikut disajikan tindakan adaptasi perubahan iklim masyarakat kelurahan Sungai Bilu Banjarmasin.

Tabel 68 Tindakan Adaptasi Masyarakat terhadap Perubahan Iklim

No	Kelas	Skor	Jumlah	%
1	Baik	40-55	137	46
2	Sedang	26-<40	154	51
3	Buruk	11-<26	9	3
Jumlah			300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 68 maka dapat dijelaskan bahwa tindakan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim pada kategori “baik” (46%), “sedang” (51%) dan “buruk” (3%). Kondisi ini masih diperlukan perbaikan agar tindakan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim dapat lebih baik. Beberapa hal yang harus ditingkatkan untuk mengatasi kekeringan adalah, sebagai berikut: (1) membuat lubang penampung air hujan; (2) membuat embung; (3) membuat penampungan air hujan (PAH);(4) menghemat air; (5) membuat biopori; (6) membuat sumur resapan; (7) membuat bangunan terjun air (BTA); (8) memanfaatkan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman, ternak, dan ikan; (9) menerapkan pola 3 M (menguras, menimbun, menutup) sarang nyamuk untuk mengantisipasi terjadinya penyakit (DBD); (10) rumah dengan sirkulasi udara yang baik; (11) menerapkan system kewaspadaan dini untuk mengantisipasi terjadinya penyakit, seperti diare, malaria dan DBD.

Menurut Nur Masripatin dalam KLHK (2017), ProKlim memuat aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim oleh kelompok masyarakat dalam

upaya meningkatkan ketahanan iklim dan mengurangi emisi GRK atau berkontribusi menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C seperti tertuang dalam Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) pada tahun 2015.

Terkait dengan aksi adaptasi dan mitigasi oleh masyarakat untuk mendukung ProKlim, maka Ghina dan Zunariyah (2017) dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa ProKlim merupakan suatu kegiatan pengelolaan lingkungan yang membutuhkan peran dari aktor, modal sosial, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Pada proses pelaksanaan ProKlim dilakukan tahapan-tahapan proses pemberdayaan berupa penyadaran, penunjukan masalah, pemecahan masalah, implementasi kegiatan, produksi dan publikasi informasi, dan pemberdayaan (5P). Namun pendekatan yang digunakan hanyalah pemungkinan, penyokongan, penguatan, dan pemeliharaan. Dalam mengupayakan berjalannya ProKlim, aktor menggunakan modal-modal sosial yang ada, seperti jaringan, dan norma sosial. Masyarakat Kampung Iklim pun kemudian turut berpartisipasi.

Penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa keberhasilan ProKlim sangat tergantung dengan partisipasi masyarakat. Program “Kampung Hijau” atau ProKlim di Kelurahan Sungai Bilu Bannjarmasin telah berjalan sejak tahun 2016, menunjukkan sikap terbuka dan partisipasi masyarakat mulai tampak dengan indikasi adanya keterlibatan dalam berbagai program, seperti: mengganti jamban apung menjadi WC sehat dan standar, bersedia

dilakukan renovasi rumah bagi mereka yang domisi di pinggir sungai (dari RT 1 sampai RT 5), dan ikut berpartisipasi dalam menjaga kampung melalui kegiatan kebersihan, pemanfaatan lahan dengan menanam berbagai jenis tanaman sayur dan kembang sehingga tampak asri, dan sebagainya.

Hasil penelitian Isa dkk. (2013) yang berjudul: “Strategi Penguatan Kapasitas Stakeholder Dalam Adaptasi dan Mitigasi Banjir di Kota Surakarta”, menunjukkan bahwa stakeholder belum optimal dalam melakukan upaya adaptasi terhadap bahaya banjir. Strategi penguatan kapasitas yang dapat dilakukan adalah melalui pembangunan dan perbaikan aspek fisik.

Kampung Iklim Kelurahan Sungai Bilu, melalui ProKlim yang mendapat sumber dana dari pemerintah, telah melaksanakan berbagai hal terkait dengan perbaikan aspek fisik, diantaranya renovasi rumah dengan sirkulasi udara yang baik; mengganti jamban (di atas sungai) dengan WC sehat dan standar; peningkatan jumlah dan mutu jembatan atau titian yang menghubungkan rumah warga dan akses ke darat.

4.2. Tindakan Mitigasi

Pada bagian tindakan mitigasi akan dijelaskan beberapa hal terkait tindakan terhadap penyediaan tempat sampah yang layak, pembuatan pupuk kompos dari sampah, kegiatan 3R (*reduce, reuse, recycle*), dan penggunaan pupuk organik kompos untuk tanaman. Berikut tersaji tabel tindakan terhadap penyediaan tempat sampah yang layak.

Tabel 69 Tindakan terhadap Penyediaan Tempat Sampah yang Layak

No	Penyediaan Tempat Sampah yang Layak	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	1	0
2	Kurang Setuju	17	6
3	Cukup Setuju	68	23
4	Setuju	157	52
5	Sangat Setuju	57	19
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 69 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap penyediaan tempat sampah yang layak mencapai 52%, 23% responden cukup setuju, 19% responden sangat setuju, 6% responden kurang setuju dan 0% responden sangat tidak setuju terhadap penyediaan tempat sampah yang layak. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap penyediaan tempat sampah yang layak, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritas menginginkan penyediaan tempat sampah yang layak, sehingga terciptalah lingkungan yang bersih dan sehat. Berikut tersaji tabel tindakan terhadap pengomposan sampah.

Tabel 70 Tindakan terhadap Pengomposan Sampah

No	Pengomposan Sampah	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	23	8
2	Kurang Setuju	11	4
3	Cukup Setuju	93	31
4	Setuju	125	42
5	Sangat Setuju	48	16
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 70 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap pengomposan sampah mencapai 42%, 31% responden cukup setuju, 16% responden sangat

setuju, 8% responden sangat tidak setuju dan 4% responden kurang setuju terhadap pengomposan sampah. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap pengomposan sampah, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya menginginkan pengomposan sampah, sehingga warga dapat memanfaatkan sampah menjadi pupuk organik dan bernilai guna. Berikut tersaji tabel tindakan terhadap kegiatan 3R (*reduce, reuse recycle*)

Tabel 71 Tindakan terhadap Kegiatan 3R (*reduce, reuse, recycle*)

No	Kegiatan 3R (<i>reduce, reuse</i>)	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	1	0
2	Kurang Setuju	10	3
3	Cukup Setuju	58	19
4	Setuju	181	60
5	Sangat Setuju	50	17
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 71 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap kegiatan 3R (*reduce, reuse recycle*) mencapai 60%, 19% responden cukup setuju, 17% responden sangat setuju, 3% responden kurang setuju dan 0% responden sangat tidak setuju terhadap kegiatan 3R (*reduce, reuse recycle*). Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap kegiatan 3R (*reduce, reuse recycle*), artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya menginginkan kegiatan 3R (*reduce, reuse recycle*), sehingga warga dapat memanfaatkan sampah menjadi bernilai guna. Berikut tersaji tabel tindakan terhadap penggunaan pupuk organik kompos untuk tanaman.

Tabel 72 Tindakan terhadap Penggunaan Pupuk Organik Kompos untuk Tanaman

No	Penggunaan Pupuk Organik Kompos untuk Tanaman	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	0	0
2	Kurang Setuju	12	4
3	Cukup Setuju	85	28
4	Setuju	140	47
5	Sangat Setuju	63	21
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 72 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap penggunaan pupuk organik kompos untuk tanaman mencapai 47%, 28% responden cukup setuju, 21% responden sangat setuju, 4% responden kurang setuju dan 0% responden sangat tidak setuju terhadap penggunaan pupuk organik kompos untuk tanaman. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap penggunaan pupuk organik kompos untuk tanaman, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya menggunakan pupuk organik kompos untuk tanaman karena tidak berbahaya untuk lingkungan. Berikut tersaji tabel tindakan terhadap pengolahan limbah menjadi hal yang bernilai.

Tabel 73 Tindakan terhadap Pengolahan Limbah menjadi Hal yang Bernilai

No	Pengolahan Limbah menjadi Hal yang Bernilai	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	0	0
2	Kurang Setuju	18	6
3	Cukup Setuju	84	28
4	Setuju	159	53
5	Sangat Setuju	39	13
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 73 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap pengolahan limbah menjadi hal yang bernilai mencapai 53%, 28% responden cukup setuju, 13% responden sangat setuju, 6% responden kurang setuju dan 0% responden sangat tidak setuju terhadap pengolahan limbah menjadi hal yang bernilai. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap pengolahan limbah menjadi hal yang bernilai, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya menginginkan adanya pengolahan limbah menjadi hal yang bernilai, sehingga terciptalah lapangan kerja yang baru di kampung iklim. Berikut tersaji tabel tindakan terhadap perilaku hemat listrik.

Tabel 74 Tindakan terhadap Perilaku Hemat Listrik

No	Perilaku Hemat Listrik	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	0	0
2	Kurang Setuju	1	0
3	Cukup Setuju	101	34
4	Setuju	141	47
5	Sangat Setuju	57	19
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 74 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap tindakan terhadap perilaku hemat listrik mencapai 47%, 34% responden cukup setuju, 19% responden sangat setuju, 0% responden kurang setuju dan 0% responden sangat tidak setuju terhadap tindakan terhadap perilaku hemat listrik. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap tindakan terhadap perilaku hemat listrik, artinya warga yang tinggal di

kampung iklim mayoritasnya berperilaku hemat listrik, sehingga warga mulai membiasakan diri untuk lebih hemat dan cermat dalam mengonsumsi.

Berikut tersaji tabel tindakan terhadap perilaku hemat listrik.

Tabel 75 Tindakan terhadap Perilaku Hemat Listrik

No	Penanaman Pohon	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	1	0
2	Kurang Setuju	5	2
3	Cukup Setuju	60	20
4	Setuju	153	51
5	Sangat Setuju	81	27
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 75 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap penanaman pohon mencapai 51%, 27% responden sangat setuju, 20% responden cukup setuju, 2% responden kurang setuju dan 0% responden sangat tidak setuju terhadap penanaman pohon. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap penanaman pohon, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya menginginkan adanya penanaman pohon, sebagai bentuk kegiatan peduli lingkungan. Berikut tersaji tabel tindakan terhadap pembukaan lahan pertanian tanpa pembakaran hutan.

Tabel 76 Tindakan terhadap Pembukaan Lahan Pertanian tanpa Pembakaran Hutan

No	Pembukaan Lahan Pertanian tanpa Pembakaran Hutan	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	7	2
2	Kurang Setuju	13	4
3	Cukup Setuju	22	7
4	Setuju	181	60
5	Sangat Setuju	77	26
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 76 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap pembukaan lahan pertanian tanpa pembakaran hutan mencapai 60%, 26% responden sangat setuju, 7% responden cukup setuju, 4% responden kurang setuju dan 2% responden sangat tidak setuju terhadap pembukaan lahan pertanian tanpa pembakaran hutan. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap pembukaan lahan pertanian tanpa pembakaran hutan, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya membuka lahan tanpa membakar, sehingga dapat mengurangi kebakaran hutan.

Jenis Tindakan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim

Hasil pengamatan (20 November 2018) dan wawancara warga RT

1,2,3,4, dan 5 keluarahan Sungai Bilu tentang tindakan mitigasi terhadap perubahan iklim masyarakat Sungai Bilu yakni sebagai berikut: (1) pemerintah menyiapkan tempat sampah untuk mengarahkan warga tidak membuang sampah sembarangan khususnya di sugai; (2) tidak melakukan pembakaran sampah secara massif; (3) melakukan 3R (*reduce, reuse recyle*). Beberapa kegiatan 3R yang dilakukan yakni memanfaatkan kembali beberapa barang bekas untuk tanaman pot, seperti bekas kaleng cat, bekas alat-alat elektronik, dan sebagainya. Masyarakat Sungai Bilu juga memanfaatkan eceng gondok sebagai kompos atau pupuk oraganik untuk tanaman pot baik berupa tanaman sayur seperti tomat dan Lombok maupun kembang dari berbagai jenis. Tampaknya kompos/pupuk organic ini cocok dengan berbagai jenis tanaman sayur dan kembang di daerah ini sebagaimana

pengamatan penulis. Berikut disajikan tindakan mitigasi perubahan iklim masyarakat kelurahan Sungai Bilu Banjarmasin.

Tabel 77 Tindakan Mitigasi Masyarakat terhadap Perubahan Iklim

No	Kelas	Skor	Jumlah	%
1	Baik	29-40	232	77
2	Sedang	19-<29	67	22
3	Buruk	8-<19	1	0
Jumlah			300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Berdasarkan Tabel 77 maka respons masyarakat terhadap tindakan mitigasi di Kelurahan Sungai Bilu Banjarmasin menunjukkan 77% “baik”, 22% dan “buruk” 0%. Hal ini menggambarkan bahwa respons masyarakat Sungai Bilu terhadap tindakan mitigasi sudah baik sehingga perlu terus ditingkatkan agar menjadi lebih baik. Beberapa tindakan mitigasi yang harus terus ditingkatkan adalah sebagai berikut: (1) menyediakan tempat sampah dan tidak membuang sampah ke sungai; (2) melakukan pengomposan dan tidak membuat sampah; (3) melakukan 3R (*reduce, reuse, recycle*) terhadap limbah; (4) menggunakan pupuk organik hasil proses pengomposan untuk tanaman; (5) mengolah limbah untuk sesuatu yang bernilai; (6) perilaku hemat listrik; (7) menanam pohon di sekitar rumah dan lingkungan; dan (8) tidak membakar hutan dan lahan.

Penelitian Dewi dan Yossa Istiadi (2016) yang berjudul: “Mitigasi

Bencana pada Masyarakat Tradisional Dalam Menghadapi Perubahan Iklim di Kampung Naga Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya”, menjelaskan bahwa kemampuan mitigasi bencana masyarakat Kampung Naga dianalisis

secara kualitatif berdasarkan adat istiadat. Bahaya akibat perubahan iklim yang berpotensi menjadi bencana di Kampung Naga adalah tanah longsor dan banjir. Kemampuan mitigasi bencana masyarakat Kampung Naga terhadap perubahan iklim dipengaruhi kearifan tradisional yang tercermin dari konservasi hutan, bangunan, infrastruktur dan pola ruang kampung yang dapat mengurangi ancaman bencana tanah longsor dan banjir.

ProKlim Kelurahan Sungai Bilu secara geografis sebagian warga berdomisili di pinggir sungai Martapura (dari RT 1 sampai RT 5). Pada siklus tertentu, air pasang (Banjir) terjadi sehingga menggenangi rumah warga. Berdasarkan kondisi itu, maka masyarakat Banjar sejak dulu telah mengantisipasi dengan membangun rumah panggung dengan ketinggian tertentu sehingga tidak lagi menggenangi rumah warga. Adanya fakta sebagian rumah warga tergenang air saat air pasang pada siklus waktu tertentu maka meninggikan rumah adalah diantara solusinya. Kedua, warga menggunakan pupuk organik hasil proses pengomposan untuk tanaman berupa akar *ilung* (eceng gondok) pengganti tanah untuk media tanam baik sayuran maupun kembang. Ketiga, mengolah limbah untuk sesuatu yang bernilai, juga telah dilakukan oleh warga Kelurahan Sungai Bilu namun berdasarkan pengamatan tampaknya belum optimal sehingga diperlukan sosialisasi dan partisipasi warga untuk mendukung program kampung iklim.

Hasil penelitian Isa, dkk. (2013) yang berjudul: “Strategi Penguatan

Kapasitas Stakeholder dalam Adaptasi dan Mitigasi Banjir di Kota

Surakarta”, Menjekaskan sejumlah strategi penguatan kapasitas, antara lain, yakni: (1) pendidikan, pelatihan dan sosialisasi terhadap adaptasi dan mitigasi banjir; (2) pembangunan dan perbaikan aspek fisik; dan (3) partisipasi masyarakat dalam mitigasi banjir.

Beberapa tindakan mitigasi perubahan iklim oleh warga yang didukung oleh pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan dinas lain yang terkait di kelurahan Sungai Bilu, antara lain: (1) menyediakan tempat sampah; (2) tidak membuang sampah ke sungai; (2) melakukan pengomposan dengan memanfaatkan *ilung* (eceng gondok) untuk pupuk; (3) melakukan 3R (*reduce, reuse, recycle*) terhadap limbah; (4) menanam pohon di sekitar rumah dan lingkungan; dan (5) tidak membakar lahan dan sampah.

BAB V

HARAPAN MASYARAKAT

Pada bab ini diuraikan tentang harapan masyarakat Kota Banjarmasin terhadap program kampung iklim (ProKlim). Beberapa diantaranya adalah terkait dengan harapan masyarakat tentang penyediaan tempat penampungan air hujan; pembuatan sumur serapan, penanggulangan bencana banjir, dan penanaman vegetasi untukantisipasi abrasi sungai dan sebagainya. Harapan masyarakat terhadap penyediaan tempat penampungan air hujan, sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 78 Harapan terhadap Penyediaan Tempat Penampungan Air Hujan

No	Penyediaan Tempat Penampungan Air Hujan	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	64	21
2	Kurang Setuju	111	37
3	Cukup Setuju	48	16
4	Setuju	74	25
5	Sangat Setuju	3	1
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 78 menjelaskan bahwa responden kurang setuju terhadap penyediaan tempat penampungan air hujan mencapai 37%, 25% responden setuju, 21% responden sangat tidak setuju, 12% responden cukup setuju dan

1% responden sangat setuju terhadap penyediaan tempat penampungan air hujan. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap penyediaan tempat penampungan air hujan, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya menginginkan penyediaan tempat penampungan air hujan, sehingga warga dapat memanfaatkan air hujan untuk keperluan sehari-hari. Adapun harapan masyarakat terhadap pembuatan sumur resapan sebagaimana tergambar pada tabel 79 berikut.

Tabel 79 Harapan terhadap Pembuatan Sumur Resapan

No	Pembuatan Sumur Resapan	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	21	7
2	Kurang Setuju	3	1
3	Cukup Setuju	75	25
4	Setuju	176	59
5	Sangat Setuju	25	8
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 79 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap pembuatan sumur resapan mencapai 59%, 25% responden cukup setuju, 8% responden sangat setuju, 7% responden sangat tidak setuju dan 1% responden kurang setuju terhadap pembuatan sumur resapan. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap pembuatan sumur resapan, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya menginginkan pembuatan sumur resapan, sehingga dapat memanfaatkan sumur resapan untuk keperluan sehari-hari dan sumber air tidak hanya dari PDAM.

Harapan masyarakat terhadap pengerukan untuk penanggulangan bencana banjir, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 80 Harapan terhadap Pengerukan untuk Penanggulangan Bencana Banjir

No	Pengerukan untuk Penanggulangan Bencana Banjir	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	3	1
2	Kurang Setuju	74	25
3	Cukup Setuju	75	25
4	Setuju	101	34
5	Sangat Setuju	47	16
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 80 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap pengerukan untuk penanggulangan bencana banjir mencapai 34%, 25% responden kurang setuju, 25% responden cukup setuju, 16% responden sangat setuju dan 1% responden sangat tidak setuju terhadap pengerukan untuk penanggulangan bencana banjir. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap pengerukan untuk penanggulangan bencana banjir, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya menginginkan pengerukan untuk penanggulangan bencana banjir, sebagian dari mitigasi bencana banjir. Harapan masyarakat terhadap pembangunan saluran drainase, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 81 Harapan terhadap Pembangunan Saluran Drainase

No	Pembangunan Saluran Drainase	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	2	1
2	Kurang Setuju	1	0
3	Cukup Setuju	50	17
4	Setuju	198	66

No	Pembangunan Saluran Drainase	Jumlah	%
5	Sangat Setuju	49	16
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 81 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap pembangunan saluran drainase mencapai 66%, 17% responden cukup setuju, 16% responden sangat setuju, 1% responden sangat tidak setuju dan 0% responden kurang setuju terhadap pembangunan saluran drainase. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap pembangunan saluran drainase, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya menginginkan adanya pembangunan saluran drainase, yang berfungsi untuk mengalirkan resapan air hujan dalam lingkungan warga menuju ke badan sungai yang terdekat. Harapan masyarakat terhadap pemasangan alat informasi ketinggian muka air sungai, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 82 Harapan terhadap Pemasangan Alat Informasi Ketinggian Muka Air Sungai

No	Pemasangan Alat Informasi Ketinggian Muka Air Sungai	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	3	1
2	Kurang Setuju	7	2
3	Cukup Setuju	29	10
4	Setuju	215	72
5	Sangat Setuju	46	15
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 82 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap pemasangan alat informasi ketinggian muka air sungai mencapai 72%, 15% responden sangat setuju, 10% responden cukup setuju, 2% responden kurang setuju dan

1% responden sangat tidak setuju terhadap pemasangan alat informasi ketinggian muka air sungai. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap pemasangan alat informasi ketinggian muka air sungai, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya menginginkan adanya pemasangan alat informasi ketinggian muka air sungai, sehingga warga dapat siaga dalam menghadapi bencana. Harapan masyarakat terhadap Pemberian Bantuan Penanaman Vegetasi untuk Antisipasi Abrasi Sungai, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 83 Harapan terhadap Pemberian Bantuan Penanaman Vegetasi untuk Antisipasi Abrasi Sungai

No	Pemberian Bantuan Penanaman Vegetasi untuk Antisipasi Abrasi Sungai	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	1	0
2	Kurang Setuju	1	0
3	Cukup Setuju	53	18
4	Setuju	202	67
5	Sangat Setuju	43	14
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 83 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap pemberian bantuan penanaman vegetasi untuk antisipasi abrasi sungai mencapai 67%, 18% responden cukup setuju, 14% responden sangat setuju, 0% responden

kurang setuju dan 0% responden sangat tidak setuju terhadap pemberian bantuan penanaman vegetasi untuk antisipasi abrasi sungai. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap pemberian bantuan penanaman vegetasi untuk antisipasi abrasi sungai, artinya warga yang

tinggal di kampung iklim mayoritasnya menginginkan adanya pemberian bantuan penanaman vegetasi untukantisipasi abrasi sungai, sehingga terciptalah lingkungan yang hijau dan sejuk. Harapan terhadap penyuluhan sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 84 Harapan terhadap Penyuluhan

No	Harapan terhadap Penyuluhan	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	145	48
2	Kurang Setuju	121	40
3	Cukup Setuju	4	1
4	Setuju	18	6
5	Sangat Setuju	12	4
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 84 menjelaskan bahwa responden sangat tidak setuju terhadap penyuluhan mencapai 48%, 40% responden kurang setuju, 6% responden setuju, 4% responden sangat setuju dan 1% responden cukup setuju terhadap penyuluhan. Keterangan responden menyatakan banyak yang sangat tidak setuju terhadap penyuluhan, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya dengan harapan yang warga inginkan terhadap penyuluhan, agar kampung iklim menjadi lebih baik. Harapan terhadap penyediaan pasokan air bersih sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 85 Harapan terhadap Penyediaan Pasokan Air Bersih

No	Penyediaan Pasokan Air Bersih	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	4	1
2	Kurang Setuju	0	0
3	Cukup Setuju	77	26
4	Setuju	163	54
5	Sangat Setuju	56	19
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 85 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap penyediaan pasokan air bersih mencapai 54%, 26% responden cukup setuju, 19% responden sangat setuju, 1% responden sangat tidak setuju dan 0% responden kurang setuju terhadap penyediaan pasokan air bersih. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap penyediaan pasokan air bersih, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya menginginkan penyediaan pasokan air bersih, dengan sarana air bersih yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan warga untuk dikonsumsi, sehingga baik untuk kesehatan. Harapan masyarakat terhadap penyuluhan tentang pola hidup bersih dan sehat, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 86 Harapan terhadap Penyuluhan tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat

No	Penyuluhan tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	3	1
2	Kurang Setuju	5	2
3	Cukup Setuju	45	15
4	Setuju	150	50
5	Sangat Setuju	97	32
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 86 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap penyuluhan tentang pola hidup bersih dan sehat mencapai 50%, 32% responden sangat setuju, 15% responden cukup setuju, 2% responden kurang setuju dan 1% responden sangat tidak setuju terhadap penyuluhan tentang pola hidup

bersih dan sehat. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap penyuluhan tentang pola hidup bersih dan sehat, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya menginginkan pola hidup bersih dan sehat, sehingga terciptalah lingkungan yang bersih dan baik untuk kesehatan. Harapan masyarakat terhadap penyediaan tempat pengumpulan sampah, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 87 Harapan terhadap Penyediaan Tempat Pengumpulan Sampah

No	Penyediaan Tempat Pengumpulan Sampah	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	90	30
2	Kurang Setuju	159	53
3	Cukup Setuju	12	4
4	Setuju	35	12
5	Sangat Setuju	4	1
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 87 menjelaskan bahwa responden kurang setuju terhadap penyediaan tempat pengumpulan sampah mencapai 53%, 30% responden sangat tidak setuju, 12% responden setuju, 4% responden cukup setuju dan 1% responden sangat setuju terhadap penyediaan tempat pengumpulan sampah. Keterangan responden menyatakan banyak yang kurang setuju terhadap penyediaan tempat pengumpulan sampah, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya menginginkan penyediaan tempat pengumpulan sampah, sehingga terciptalah lingkungan yang bersih dan indah. Harapan masyarakat terhadap penyuluhan tentang pengolahan limbah dan pemanfaatan limbah cair, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 88 Harapan terhadap Penyuluhan tentang Pengolahan Limbah dan Pemanfaatan Limbah Cair

No	Penyuluhan tentang Pengolahan Limbah dan Pemanfaatan Limbah Cair	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	6	2
2	Kurang Setuju	21	7
3	Cukup Setuju	39	13
4	Setuju	184	61
5	Sangat Setuju	50	17
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 88 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap penyuluhan tentang pengolahan limbah dan pemanfaatan limbah cair mencapai 61%, 17% responden sangat setuju, 13% responden cukup setuju, 7% responden kurang setuju dan 2% responden sangat tidak setuju terhadap penyuluhan tentang pengolahan limbah dan pemanfaatan limbah cair. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap penyuluhan tentang pengolahan limbah dan pemanfaatan limbah cair, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya menginginkan penyuluhan tentang pengolahan limbah dan pemanfaatan limbah cair, sehingga warga memiliki wawasan tentang pengolahan limbah dan pemanfaatan limbah cair. Harapan masyarakat terhadap penyediaan tangki septic dengan instalasi penangkap methane, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 89 Harapan terhadap Penyediaan Tangki Septic dengan Instalasi Penangkap Methane

No	Penyediaan Tangki Septic dengan Instalasi Penangkap Methane	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	1	0
2	Kurang Setuju	20	7
3	Cukup Setuju	65	22
4	Setuju	145	48
5	Sangat Setuju	69	23
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 89 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap penyediaan tangki septic dengan instalasi penangkap methane mencapai 48%, 23% responden sangat setuju, 22% responden cukup setuju, 7% responden kurang setuju dan 0% responden sangat tidak setuju terhadap penyediaan tangki septic dengan instalasi penangkap methane. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap penyediaan tangki septic dengan instalasi penangkap methane, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya menginginkan penyediaan tangki septic dengan instalasi penangkap methane, sehingga warga dapat memanfaatkan gas metana sebagai bahan bakar (biogas) untuk keperluan sehari-hari. Harapan masyarakat terhadap penyediaan ipal dengan instalasi penangkap methane, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 90 Harapan terhadap Penyediaan IPAL dengan Instalasi Penangkap Methane

No	Penyediaan IPAL dengan Instalasi Penangkap Methane	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	6	2
2	Kurang Setuju	19	6

No	Penyediaan IPAL dengan Instalasi Penangkap Methane	Jumlah	%
3	Cukup Setuju	71	24
4	Setuju	140	47
5	Sangat Setuju	64	21
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 90 menjelaskan bahwa responden setuju terhadap penyediaan IPAL dengan instalasi penangkap methane mencapai 47%, 24% responden cukup setuju, 21% responden sangat setuju, 6% responden kurang setuju dan 2% responden sangat tidak setuju terhadap penyediaan IPAL dengan

instalasi penangkap methane. Keterangan responden menyatakan banyak yang setuju terhadap penyediaan IPAL dengan instalasi penangkap methane, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya menginginkan penyediaan IPAL dengan instalasi penangkap methane, salah satu cara mengoptimalkan pemanfaatan gas metana sebagai sumber energi baru. Harapan masyarakat terhadap penyuluhan penggunaan energi baru terbarukan dan konservasi energi, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 91 Harapan terhadap Penyuluhan Penggunaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

No	Penyuluhan Penggunaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Jumlah	%
1	Sangat Tidak Setuju	88	29
2	Kurang Setuju	176	59
3	Cukup Setuju	19	6
4	Setuju	9	3
5	Sangat Setuju	8	3
Total		300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel 91 menjelaskan bahwa responden kurang setuju terhadap penyuluhan penggunaan energi baru terbarukan dan konservasi energi mencapai 59%, 29% responden sangat tidak setuju, 6% responden cukup setuju, 3% responden setuju dan 3% responden sangat setuju terhadap penyuluhan penggunaan energi baru terbarukan dan konservasi energi. Keterangan responden menyatakan banyak yang kurang setuju terhadap penyuluhan penggunaan energi baru terbarukan dan konservasi energi, artinya warga yang tinggal di kampung iklim mayoritasnya menginginkan penyuluhan penggunaan energi baru terbarukan dan konservasi energi, salah satu cara mengoptimalisasi pemanfaatan gas metana sebagai sumber energi baru.

Hasil wawancara terstruktur yang diperoleh dari survey dengan warga Kelurahan Sungai Bilu terkait dengan harapan terhadap ProKlim, antara lain dijelaskan sebagai berikut: (1) Perbaikan jalan agar merata sampai ke seluruh kampung; (b) Pengecatan pagar di sepanjang pinggir sungai; (3) Pemerataan program kampung iklim (ProKlim) di seluruh kampung.

Hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan Miftah Ramadhan (27 tahun), Rahyudi (34 tahun) dan Fathurahman (57 tahun) terkait harapan-harapannya terhadap ProKlim yakni sebagai berikut: (1) agar program ProKlim dilaksanakan secara merata; (2) pemenuhan kebutuhan WC warga RT 3; (3) “Kampung Hijau” yang disematkan kepada kelurahan Sungai Bilu sebagai ProKlim yang dicirikan dengan pengecatan pagar titian

dan dinding rumah berwarna hijau serta atap berwarna hijau baru tersentuh pada wilayah bantaran sungai Martapura mulai dari RT 01 sampai RT 05; (4) menyelesaikan sisa jembatan titian sekitar 20%; (5) agar dilakukan pengecatan pagar titian (pengecatan pertama saat dibangun tahun 2016); (6) Tempat pembuangan sampah yang proporsional; (7) Diperlukan penahan sampah agar sampah kiriman tidak masuk ke dalam bawah rumah sepanjang bantaran sungai; (8) Untuk keperluan wisatawan maka diperlukan tempat istirahat, seperti kursi dan tenda; (9) perlu dibuat RTH (ruang terbuka hijau) untuk menambah keindahan kampung dan daya tarik wisatawan; (10) Agar program Proklam, yakni berupa bantuan atap, dinding asbes, pengecatan dan lain sebagainya dilaksanakan secara merata di Kelurahan Sungai Bilu; (11) Agar seluruh rumah yang termasuk dalam kriteria rumah kumuh dapat direnovasi; (12) Dilakukan pemeliharaan lampu penerangan jalan di bantaran sungai Kampung Iklim Sungai Bilu. Saat ini hanya terdapat sekitar 50% lampu yang menyala. Lama menyala sejak jam 19.00 sampai jam 21.00; (13) Agar dilakukan penambahan jumlah jalan/titian permanen yang menghubungkan antarumah warga pada setiap RT. (14) Secara umum harapan utama dari warga RT 01-RT 05 adalah meratanya anggaran dana untuk membangun berbagai fasilitas di Kelurahan Sungai Bilu.

5.1. Harapan Masyarakat terhadap Program Kampung Iklim (ProKlim)

Berikut disajikan harapan masyarakat terhadap ProKlim kelurahan Sungai Bilu. Harapan masyarakat terhadap ProKlim masyarakat kelurahan sungai bilu Banjarmasin, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 92 Harapan terhadap ProKlim Masyarakat Kelurahan Sungai Bilu Banjarmasin

No	Kelas	Skor	Jumlah	%
1	Tinggi	51-70	234	78
2	Sedang	33-<51	65	22
3	Rendah	14-<33	1	0
Jumlah			300	100

Sumber: Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel 92 menggambarkan bahwa masyarakat kelurahan Sungai Bilu memiliki harapan yang tinggi (78%) terhadap ProKlim yang sedang dilaksanakan saat ini di kelurahan Sungai Bilu Banjarmasin. Tabel ini dapat dimaknai bahwa masyarakat Sungai Bilu sangat berharap agar pemerintah terus meningkatkan program kampung iklim agar lebih bermutu, melalui beberapa program untuk menanggulangi kekeringan, seperti: (1) penyediaan tempat penampungan air hujan (PAH); dan (2) membuat sumur resapan.

Selain itu masyarakat berharap agar program terkait dengan penanggulangan Banjir, seperti: (1) melakukan pengerukan sungai; (2) membangun saluran drainase; (3) memasang alat informasi ketinggian air muka sungai; (4) memberi bantuan vegetasi untuk mencegah abrasi sungai. Disamping itu, agar pemerintah melakukan penyuluhan, tentang: (1)

pengecahan munculnya penyakit akibat perubahan iklim; (2) penyuluhan penggunaan energi baru terbarukan dan konservasi energy. Aspek lainnya yang merupakan harapan masyarakat Sungai Bilu, adalah: (1) penyediaan pasokan air bersih; (2) menyediakan tempat pengumpulan sampah; (3) penyuluhan tentang pengolahan dan bahaya limbah; (4) menyediakan tangki septic yang dilengkapi instalasi penangkap metan; dan (5) menyiapkan IPAL dilengkapi penangkap gas metan;

Hasil wawancara dengan warga kelurahan Sungai Bilu Banjarmasin terkait harapan-harapannya terhadap ProKlim, diuraikan sebagai berikut: (1) agar program ProKlim dilaksanakan secara merata; (2) pemenuhan kebutuhan WC warga RT 3; (3) “Kampung Hijau” yang disematkan kepada kelurahan Sungai Bilu sebagai ProKlim yang dicirikan dengan pengecetan pagar titian dan dinding rumah berwarna hijau serta atap berwarna hijau baru tersentuh pada wilayah bibir sungai Martapura mulai dari RT 01 sampai RT 05; (4) menyelesaikan sisa jembatan titian sekitar 20%; (5) agar dilakukan pengecetan pagar titian (pengecetan pertama saat dibangun tahun 2016); (6) Tempat pembuangan sampah yang proporsional; (7) Diperlukan penahan sampah agar sampah kiriman tidak masuk ke dalam bawah rumah; (8) Untuk keperluan wisatawan maka diperlukan tempat istirahat, seperti kursi dan tenda; (9) perlu dibuat RTH (ruang terbuka hijau) untuk menambah keindahan kampung dan daya tarik wisatawan; (10) Agar program ProKlim, yakni berupa bantuan atap, dinding asbes, pengecetan dan lain sebagainya

dilaksanakan secara merata di Kelurahan Sungai Bilu; (11) Agar seluruh rumah yang termasuk dalam kriteria rumah kumuh dapat direnovasi; (12) Dilakukan pemeliharaan lampu penerangan jalan di bantaran sungai Kampung Iklim Sungai Bilu. Saat ini hanya terdapat sekitar 50% lampu yang menyala. Lama menyala sejak jam 19.00 sampai jam 21.00; (13) Agar dilakukan penambahan jumlah jalan/titian permanen yang menghubungkan antarumah warga pada setiap RT. (14) Secara umum harapan utama dari warga RT 01-RT 05 adalah meratanya anggaran dana untuk membangun berbagai fasilitas di Kelurahan Sungai Bilu.

Harapan-harapan masyarakat kelurahan Sungai Bilu sebagaimana telah dijelaskan, baik langsung maupun secara tidak langsung akan mendukung keberhasilan ProKlim untuk pembangunan yang berkelanjutan. Konsep kampung iklim dibutuhkan guna membangun gerakan pengurangan emisi dimulai dari kampung. Membangun masyarakatnya secara kritis dalam segala tindakan baik teknis maupun non teknis, berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengurangan pemanasan global sebagai salah satu penyumbang terbesar perubahan iklim (Pembengo dan Dude, 2017).

BAB VI

PENUTUP

Pada bagian penutup buku ini, disampaikan beberapa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan sebagai berikut:

1. Respons masyarakat terhadap ProKlim di Kelurahan Sungai Bilu

Kecamatan Banjarmasin Timur sebagai berikut:

- a. Persepsi terhadap Kegiatan Penyuluhan Perubahan Iklim

Persepsi masyarakat terhadap kegiatan penyuluhan masih rendah (“buruk”) (32%). Kondisi ini menggambarkan perlunya peningkatan kinerja penyuluh baik terkait dengan kuantitas (jumlah) maupun kualitas (mutu) penyuluh, termasuk kejelasan informasi yang disampaikan, dan kesungguhan penyuluh dalam menyampaikan informasi; serta kemampuan penyuluh dalam membangun komunikasi yang baik dengan warga.

- b. Persepsi terhadap Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim

Persepsi masyarakat terhadap kegiatan adaptasi perubahan iklim berada pada kategori “baik” (54%), sehingga kondisi ini perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan mutunya baik terkait

dengan kegiatan adaptasi untuk menangani kekeringan seperti: meningkatkan tempat penampungan air, membuat sumur resapan, dan pembatasan penggunaan air. Meningkatkan adaptasi dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, membangun saluran drainase, ketersediaan alat penyampaian informasi ketinggian muka air sungai bencana banjir, rute evakuasi untukantisipasi banjir, membangun rumah panggung, menanam pohon, penanaman terpadu, tumpang sari, menanam berbagai jenis tanaman untuk mengatasi gagal panen, mengurangi penggunaan pestisida, menanamkan lahan pekarangan dengan tanaman bermanfaat, melakukan 3M (menguras, menimbun, dan menutup) untuk menghindari penyakit, mengetahui lebih dini mengenai penyakit, seperti diare dan malaria, tersedia akses air bersih dan jamban sehat dan standar, penyuluhan tentang perilaku hidup sehat, mengurangi berbagai kendala dalam melakukan kegiatan adaptasi.

c. Persepsi terhadap Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Sungai Bilu Banjarmasin terhadap kegiatan mitigasi perubahan iklim pada kategori “baik” (67%). Kondisi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan baik terkait dengan perilaku tidak membuang sampah di sungai; melakukan 3R (*reduce, reuse, recycle*); memanfaatkan pupuk organik melalui proses pengomposan; megolah limbah menjadi

sesuatu yang bermanfaat; memanfaatkan gas methane sebagai sumber energi baru; perilaku hemat listrik; penggunaan pupuk organik; melakukan penghijauan; dan tidak membakar hutan dan lahan.

2. Tindakan masyarakat terhadap ProKlim di Kelurahan Sungai Bilu

Kecamatan Banjarmasin Timur

- a. Tindakan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim pada kategori “baik” (46%), “sedang” (51%) dan “buruk” (3%). Kondisi ini masih diperlukan perbaikan agar tindakan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim dapat lebih baik. Beberapa hal yang harus ditingkatkan untuk mengatasi kekeringan adalah, sebagai berikut: (1) membuat lubang penampung air hujan; (2) membuat penampungan air hujan (PAH); (3) menghemat air; (4) membuat biopori; (5) membuat sumur resapan; (6) membuat bangunan terjun air (BTA); (7) memanfaatkan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman, ternak, dan ikan; (8) menerapkan pola 3 M (menguras, menimbun, menutup) sarang nyamuk untuk mengantisipasi terjadinya penyakit (DBD); (9) rumah dengan sirkulasi udara yang baik; (10) menerapkan sistem kewaspadaan dini untuk mengantisipasi terjadinya penyakit, seperti diare, malaria dan DBD.
- b. Tindakan mitigasi perubahan iklim masyarakat kelurahan Sungai Bilu pada kategori “baik” (67%). Kondisi ini harus dipertahankan dan

ditingkatkan baik terkait dengan perilaku tidak membuang sampah di sungai; melakukan 3R (*reduce, reuse, recycle*); memanfaatkan pupuk organik melalui proses pengomposan; mengolah limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat; perilaku hemat listrik; penggunaan pupuk organik; melakukan penghijauan; dan tidak membakar lahan.

3. Harapan masyarakat terhadap ProKlim di Kelurahan Sungai Bilu

Kecamatan Banjarmasin Timur terhadap ProKlim di Kelurahan Sungai Bilu Banjarmasin maka diperoleh hasil pada kategori “tinggi” (78%). Hal ini menunjukkan bahwa ProKlim sangat diharapkan oleh seluruh warga masyarakat kelurahan Sungai Bilu. Harapan itu berupa peningkatan jumlah dan mutu sarana dan prasarana, seperti pengadaan “WC Sehat”, tempat sampah yang representatif serta manajemen pengelolaan yang baik; perbaikan rumah kumuh melalui program “KOTAKU”; penambahan jumlah jembatan (titian) yang menghubungkan jalan ke rumah warga; sarana untuk memanjakan para wisatawan, seperti kursi panjang, *display* hasil *home industry*, seperti krupuk haruan dan udang, kain sasirangan dan berbagai macam makan khas banjar.

Buku hasil penelitian ini merekomendasikan beberapa hal kepada

pemerintah Kota Banjarmasin, baik terkait tentang kegiatan penyuluhan, tindakan adaptasi, dan tindakan mitigasi sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyuluhan

Perlu peningkatan penyuluhan oleh SKPD terkait, baik kuantitas (jumlahnya) maupun kualitas (mutu) baik penyuluhan terkait tindakan adaptasi, seperti: (1) membuat lubang penampung air hujan; membuat penampungan air hujan (PAH); membuat biopori; membuat sumur resapan; memanfaatkan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman, ternak, dan ikan; menerapkan pola 3M (menutup, menguras, menimbun); rumah dengan sirkulasi udara yang baik; dan kewaspadaan dini terhadap penyakit, seperti diare, malaria dan DBD. Begitu pula dengan tindakan mitigasi, seperti: kebiasaan membuang sampah sembarangan khususnya di sungai; menyediakan tempat sampah yang representatif; membuat pupuk organik dari proses pengomposan; menanam pohon di pekarangan; dan melakukan gerakan 3R (*reduce, reuse, recyle*); untuk mengatasi perubahan iklim mendukung ProKlim di Kelurahan Sungai Bilu.

2. Tindakan Adaptasi

- a. Agar Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin bersama-sama dengan instansi lain yang terkait, mendukung melalui program agar masyarakat Kelurahan Sungai Bilu dapat mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan untuk budidaya tanaman, seperti: tomat, lombok, pisang, dll.; bidang peternakan, seperti: ayam, dan budidaya

ikan, seperti ikan nila dan patin yang bertujuan untuk konsumsi sendiri maupun untuk dijual.

- b. Agar Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mendukung melalui program terkait dengan “Gerakan 3M” (menutup, menguras, menimbun) seperti penyuluhan dan aksi bersama warga terkait dengan kebersihan lingkungan bagi masyarakat Kelurahan Sungai Bilu untuk mengatasi timbulnya berbagai penyakit, seperti diare, DBD dan malaria.
 - c. Agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin bekerjasama dengan instansi lain, mendukung melalui program berupa: (1) perbaikan dan pembangunan rumah kumuh, (2) penambahan jumlah jalan (titian permanen yang menghubungkan antar rumah warga); dan (3) penambahan jumlah ketersediaan WC sehat bagi warga kelurahan Sungai Bilu.
3. Tindakan Mitigasi

- a. Agar Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan langkah-langkah efektif, melalui penetapan sanksi dalam menjalankan Perda No. 21 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah/kebersihan dan pertamanan, agar lebih efektif dalam implementasinya, khususnya di Kelurahan Sungai Bilu sebagai daerah percontohan kampung iklim pertama di kota Banjarmasin.

- b. Agar Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin membuat program terkait, seperti: (1) pelaksanaan 3R (*reduce, reuse, recycle*), seperti: pemanfaatan barang bekas untuk dijadikan tas, tempat tissue, dan aksesoris lainnya yang memiliki nilai ekonomis; (2) pembuatan pupuk organik melalui proses pengomposan. Termasuk pemanfaatan eceng gondok untuk berbagai tanaman sayur dan kembang yang tersedia di lingkungan warga; (3) penyediaan bak sampah yang representatif; dan (4) membuat “bank sampah” untuk selanjutnya diolah menjadi barang yang bernilai ekonomis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, D. 2009. Variable Penelitian dan Definisi Operasional. *Jurnal Metodologi*. Program Studi D.III Kebidanan Poltekkes Surakarta.
- Ananta, A. 1993. *Ciri Demografis Kualitas Penduduk Dalam Pembangunan Ekonomi*. Lembaga Demografi. FEUI. Jakarta.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Banunaek, M. F. dkk. 2017. Pemberdayaan untuk Meningkatkan Kinerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penyuluhan*, September 2017 Vol. 13 No. 2. Tersedia: <https://www.researchgate.net/publication/320284557>. (online). Diakses tanggal 1 Desember 2017.
- Badan Pusat Statistik, Kota Banjarmasin Dalam Angka Tahun 2013-2017 Dinas Bina Marga Kota Banjarmasin.
- Berdame, Y Deybie, 2013. Migrasi dan Kepadatan Penduduk di Kota Manado. *Jurnal Online*. (<https://www.google.co.id>, diakses pada 20 Februari 2015).
- Fong, G. Y. 2013. *Perdagangan dan Politik Banjarmasin 1700-1747*. Yogyakarta: Lilin.
- Deliyanto, B. (tt). *Penegenalan Lahan (Modul I)*. <http://repository.ut.ac.id/4348/1/LING1002-M1.pdf>. Diakses tanggal 28 Juni 2020.
- Donald F. Lach and Edwin J. van Kley. 1993. *Asia in the Making of Europe, volume III : a Century of Advance*. London: Univercity of Chicago Press.
- Ghina, N. Y. dan Siti Zunariyah. (2017). Kampung Iklim: Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Sosiologi DILEMA*, Vol. 32, No. 2 Tahun 2017. Published by Lab Sosio, Sosiologi, FISIP, UNS.(Online). Diakses 1 Desember 2018.
- Irwanto, D., 2009. “Produksi dan Reproduksi Atas Jembatan Ampera; Memaknai Konstruksi Fisik dan Ideologis Kota Palembang dari Kolonial ke Pascakolonial, 1930-1960-an”. *Tesis*, Jurusan Ilmu

Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, belum diterbitkan.

- Isa, M., dkk. 2013. Strategi Penguatan Kapasitas Stakeholder Dalam Adaptasi dan Mitigasi Banjir di Kota Surakarta. *BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 17, Nomor 2, Desember 2013, hlm. 99-110. (online). Diakses 25 November 2018.
- Juhadi. 2007. Pola-Pola Pemanfaatan Lahan dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan. *Jurnal Geografi*, Volume 4 No. 1 Januari 2007.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2012. *ProKlim sebagai Penguatan Inisiatif Pengelolaan SDH Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Deputi Bidang Komunikasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017. *Buku Praktis ProKlim*. Jakarta: Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim.
- Lach, D. F. and Edwin J. van Kley. 1993. *Asia in the Making of Europe, volume III : a Century of Advance*. London: University of Chicago Press.
- Luthans, F. 2006. *Perilaku Organisasi*. Edisi Sepuluh, PT. Andi: Yogyakarta.
- Murwati, E. 2014. Persepsi Mahasiswa IPS Terhadap Pembelajaran Kewirausahaan di Jurusan Pendidikan IPS Universitas Negeri Yogyakarta. *Skripsi*, Jurusan Pendidikan IPS UNY. <http://eprints.uny.ac.id/23886/7/9.%20Ringkasan.pdf>. Diakses tanggal 27 Juni 2020.
- Mustangin, M. 2017. Perubahan Iklim dan Aksi Menghadapi Dampaknya: Ditinjau dari Peran Serta Perempuan Desa Pagerwangi. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4 (1), 2017, 80-89. Retrieved from <http://journal.uny.ac.id/index.php/jppm>. Diakses 1 Desember 2018.
- Nabila. 2017. Kampung Iklim: Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Sosiologi DILEMA*, Vol. 32, No. 2 Tahun 2017 ISSN : 0215/9635. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/dilema>.
- Pangestuti, C.D. 2014. Aplikasi Teori Utilitas untuk Melihat Minat Pembelian Produk Asuransi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. repository.upi.edu, perpustakaan.upi.edu.
- Permendagri, Nomor 1 tahun 1987, tentang Prasarana Kota.
- Pembengo, W., dan Suyono Dude. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Iklim (Proklm) Guna Mewujudkan Gerakan Revolusi Mental di Desa Bulota Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *Hasil Penelitian*. Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo.
- PDRB Kota Banjarmasin, 2012 – 2016.
- Prayitno, B. 2004. *Revitalisasi Ruang Publik Tepian Air Perkotaan*. In: Seminar dan Lokakarya Pemberdayaan Area Publik di Dalam

- Arsitek Indonesia, Jakarta, 21-22 Juli 2004, Ikatan Arsitek Indonesia, Jakarta.
- Profil Kelurahan, 2016. *Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin*.
- Rahman, G.R. Farhatul M. 2019. Pengaruh Fasilitas Sosial Terhadap Penjualan Perumahan The Gardens Cirebon. *Jurnal Arsitektur – Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon / Vol 11 / No 1 / April 2019*.
- Rakhmat, J. 2004. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ritohardoyo, S. 2008. *Ekologi Manusia*. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana UGM.
- Robbins, Stephen. P. 2006. *Perilaku Organisasi* (alih bahasa Drs. Benjamin Molan), Edisi Bahasa Indonesia. Klaten: PT Intan Sejati.
- Soekanto, S. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugihartono, dkk. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Tiara, D. 2018. Pengaruh Arus Masuk Penduduk Terhadap Ekspansi Pemukiman di Kecamatan Banjarmasin Tengah. *Prosiding Seminar Nasional Geomatika*.
- Thoha, M. 2010. *Suatu Pendekatan Prilaku*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wade, C., dan Carol Tavis. 2007. *Psychology*. (9th edition), Bahasa Indonesia Language Edition. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Walgitto. 2003. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: PT Andi.

Media Cyber dan Surat Kabar Online

- Banjarmasin Post co. id., (online), Edisi 8 September 2017.
- Banjarmasin Post co. id., (online), Edisi 19 Juni 2018.
- BumiBanjar.com

Daftar Informaan

- Fathur Rahman (57 tahun). Pekerjaan: Ketua RT.02. Alamat: Kelurahan Sungai Bilu, RT. 02, RW. 01. Tanggal wawancara 18 November 2018.
- Hairun Hidayatullah (39 tahun). Pekerjaan: Swasta. Alamat: Kelurahan Sungai Bilu, Nomor 14 RT. 04, RW. 01, Gg. Nyiur. Tanggal wawancara 18 November 2018.
- Hamdalah (41 tahun). Pekerjaan: Ketua RT.04. Alamat: Kelurahan Sungai Bilu, Nomor 52 RT. 04, RW. 01, Gg. Nyiur. Tanggal wawancara 18 November 2018.
- Miftah Ramadhan (27 tahun). Pekerjaan: Swasta, Ketua RT. 03. Alamat: Jl. Teluk Mendung RT 3, RW 01 No. 14 Kelurahan Sungai Bilu Banjarmasin. Wawancara tanggal 18 November 2018.

Normansyah (50 tahun), Pekerjaan: Ketua RT 01. Alamat: Kelurahan Sungai Bilu, Nomor 25 RT. 01, RW. 01. Tanggal wawancara 18 November 2018.

Rahyudi (34 tahun). Pekerjaan: Swasta. Alamat: Kelurahan Sungai Bilu, RT. 02, RW. 01. Tanggal wawancara 18 November 2018.

Rustam (51 tahun). Pekerjaan: Pedagang/wiraswasta. Alamat: Jl. Sungai Bilu RT 05 RW 01 No. 24. Wawancara tanggal 18 November 2018.

Taufik (42 tahun). Pekerjaan: Swasta. Alamat: Jl. Sungai Bilu RT 05 RW 01 No. 22. Wawancara tanggal 18 November 2018.